SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DARUL FALAH MOJOKERTO

Editor :
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd. C.Ed.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd. C.Ed.
H. Deddy Ahmad Fajar, M.Sc., M.M.

Penerbit
YAYASAN DARUL FALAH
Mojokerto - Indonesia

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
DARUL FALAH
MOJOKERTO

PEREKONOMIAN INDONESIA

N U
١٣٤٤
1926

MAHMUD, dkk.
Perekonomian Indonesia /Mahmud dan Deddy Ahmad Fajar
- Cet. 1 – Mojokerto: Yayasan Darul Falah, Oktober 2023
xii – hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978-623-98795-9-4

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed.
H. Deddy Ahmad Fajar, M.Sc., M.M.

Editor:
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed.

Cetakan Pertama: Oktober 2023

Perancang sampul dan lay out: *Tony's Comp.* Group

Diterbitkan Oleh :
YAYASAN DARUL FALAH
Jl. Hasanuddin 54 Mojosari 61382 Mojokerto Jawa Timur
Indonesia

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyajikan buku "Perekonomian Indonesia" ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW. yang telah menunjuki jalan ilmu dan kebenaran.

Perekonomian Indonesia merupakan topik yang begitu penting dan relevan dalam konteks global saat ini. Buku ini menggali berbagai aspek ekonomi yang membentuk negara kepulauan terbesar di dunia ini, serta peranannya dalam kancah ekonomi internasional.

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keragaman budayanya, dan populasi yang besar, memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan perekonomiannya. Buku ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa, mengulas tantangan dan peluang yang dihadapinya, serta perubahan signifikan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Buku sederhana ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi mereka yang ingin lebih memahami dinamika ekonomi Indonesia. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi panduan bagi pembaca dalam memahami kompleksitas ekonomi Indonesia yang sedang berkembang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Terutama kepada keluarga penulis, para kolega dosen dan mahasiswa di STIE Darul

Falah Mojokerto, serta penerbit yang berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perekonomian Indonesia dan menjadi sumbangan positif dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia tercinta ini.

Akhirnya, tegur sapa dan saran kiranya sangat berharga demi kesempurnaan buku ini. Maklumlah tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan bermanfaat, kepada-Mu kami mengabdi dan kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. *Amin ya rabbal Alamin*.

Ngoro, September 2023
Shofar 1445

Mahmud
Deddy AF

DAFTAR ISI

BAB 3 STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

BAB 4 PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB 5 KETENAGAKERJAAN DAN PASAR TENAGA KERJA

BAB 6 KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

BAB 1

PENGANTAR EKONOMI INDONESIA

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam sumber daya alam, budaya yang kaya, dan populasi yang besar, telah menjadi fokus perhatian dalam ranah ekonomi global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menarik perhatian pelaku bisnis, investor, dan analis ekonomi dari seluruh dunia.

Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global, dan pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi Indonesia akan memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk berinvestasi, berbisnis, atau hanya ingin memahami lebih baik perkembangan ekonomi di negara ini.

Dalam perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia telah menghadapi berbagai perubahan ekonomi dalam sejarahnya, termasuk masa kolonial, krisis finansial Asia pada tahun 1997, dan transformasi ekonomi pasca-Reformasi pada tahun 1998. Kita juga akan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur, sektor pertanian, dan sektor jasa.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Indonesia, kita dapat menggali peluang bisnis yang ada, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan negara ini.

A. Sejarah Perkembangan Ekonomi Indonesia

1. Masa Sebelum Penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan, Indonesia memiliki sejarah panjang perkembangan ekonomi yang kaya dan beragam. Perkembangan ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk geografis, budaya, dan perdagangan. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan ekonomi Indonesia sebelum masa penjajahan:

a. Zaman Pra-Aksara dan Aksara Kuno (Prasejarah - Abad ke-7 M): Pada periode ini, masyarakat Indonesia mayoritas masih hidup dalam masyarakat pemburu-pengumpul dan pertanian sederhana. Mereka mengandalkan pertanian seperti padi, jagung, dan ubi sebagai mata pencaharian utama. Perdagangan lokal dan regional juga sudah ada, seperti perdagangan rempah-rempah dan logam.

b. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha (Abad ke-8 - 14 M): Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha tumbuh di wilayah Indonesia, seperti Kerajaan Srivijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Pertanian, perdagangan, dan industri kerajinan menjadi sumber utama perekonomian. Srivijaya terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan emas.

c. Zaman Islam (Abad ke-14 - 16 M): Islam masuk dan menyebar di Indonesia, membawa perubahan budaya dan ekonomi. Kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Demak, dan

Banten menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi. Perdagangan rempah-rempah, hasil pertanian, serta kerajinan seperti batik dan ukiran kayu menjadi komoditas utama.

d. Zaman Kesultanan dan Kolonial Awal (Abad ke-17 - 18 M): Pada masa ini, beberapa kesultanan Islam besar tumbuh dan berkembang, seperti Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Aceh. Kolonial Belanda juga mulai masuk dan mendirikan pos perdagangan. Pada tahap ini, ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh perdagangan, dengan komoditas utama seperti rempah-rempah, kopi, gula, dan hasil pertanian lainnya.

e. Zaman Pertumbuhan Perkebunan (Abad ke-19 M): Pada masa ini, Belanda semakin mengkonsolidasikan kendali atas wilayah Indonesia dan mengubahnya menjadi produsen komoditas pertanian utama. Perkebunan besar, seperti perkebunan kopi, teh, karet, dan kelapa sawit, dikembangkan dengan memanfaatkan tanah dan tenaga kerja lokal.

Itulah beberapa tahap perkembangan ekonomi Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Perkembangan ini mencerminkan dinamika budaya, perdagangan, dan pengaruh agama yang telah membentuk latar belakang ekonomi Indonesia sebelum datangnya penjajahan kolonial.

2. Masa Penjajahan

Selama masa penjajahan di Indonesia, terutama di bawah penjajahan Belanda, ekonomi Indonesia mengalami perubahan besar yang secara signifikan memengaruhi struktur ekonomi dan kehidupan penduduk setempat.

Masa Penjajahan Belanda

Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, terutama dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Berikut adalah gambaran perkembangan ekonomi Indonesia pada masa penjajahan Belanda:

a. VOC dan Monopoli Perdagangan (Abad ke-17 - 18 M): Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Perusahaan Hindia Timur Bersatu, didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dan mendominasi perdagangan di wilayah Hindia Timur, termasuk Indonesia. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan berbagai komoditas lainnya. Fokus utama ekonomi pada periode ini adalah pada perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam.

b. Pengembangan Tanaman Perkebunan (Abad ke-19 - Awal Abad ke-20 M): Belanda mengalihkan fokus ekonomi dari perdagangan rempah-rempah ke produksi tanaman perkebunan seperti kopi, teh, karet, dan gula. Mereka mendirikan perkebunan besar dengan memanfaatkan tanah dan tenaga kerja lokal. Model ekonomi ini mendorong pola kerja paksa di perkebunan-perkebunan tersebut.

c. Pengaruh Kebijakan Tanam Paksa (Abad ke-19): Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau "cultuurstelsel" yang mengharuskan petani pribumi menanam komoditas ekspor di atas sebagian lahan pertanian mereka. Hasil tanaman ini diambil oleh pemerintah kolonial sebagai pajak, yang mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja dan kekurangan pangan bagi masyarakat pribumi.

d. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Modern (Awal - Pertengahan Abad ke-20 M): Pada awal abad ke-20, ekonomi Indonesia mengalami perubahan lebih lanjut dengan pertumbuhan sektor ekonomi modern seperti industri pengolahan dan jasa. Namun, pertumbuhan ini masih lebih banyak menguntungkan kepentingan Belanda dan ekonomi kolonial.

e. Ekonomi Selama Perang Dunia II (1940-1945): Selama Perang Dunia II, Indonesia diduduki oleh Jepang. Pada periode ini, Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perang mereka. Masyarakat Indonesia juga dikenalkan dengan konsep ekonomi yang lebih nasionalis.

f. Kemerdekaan dan Konsolidasi Ekonomi (1945 - 1949): Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 1945, perekonomian Indonesia mengalami periode kacau dengan perang kemerdekaan melawan Belanda. Setelah pengakuan internasional pada 1949, Indonesia memulai upaya untuk mengkonsolidasi ekonomi nasional yang merdeka.

g. Kebijakan Nasionalisasi (1950-an): Pemerintahan Indonesia yang baru mencoba untuk nasionalisasi aset-aset Belanda dan perusahaan asing yang ada. Namun, hal ini tidak selalu berjalan mulus dan ada konflik dengan negara-negara barat terkait nasionalisasi ini.

Periode penjajahan Belanda di Indonesia sangat memengaruhi perkembangan ekonomi negara ini. Meskipun ada usaha-usaha dalam membangun ekonomi modern, banyak dari ekonomi ini masih terfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan produksi komoditas untuk memenuhi kepentingan kolonial.

Masa Penjajahan Jepang

Masa penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama Perang Dunia II, dari tahun 1942 hingga 1945. Selama periode ini, ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat pendudukan Jepang dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Berikut adalah gambaran perkembangan ekonomi Indonesia pada masa penjajahan Jepang:

a. Pendudukan Jepang (1942 - 1945): Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, Jepang diterima dengan

harapan bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, namun harapan ini tidak terwujud.

b. Ekonomi Perang: Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Banyak produk pertanian dan sumber daya alam seperti minyak bumi dieksploitasi untuk kepentingan militer Jepang.

c. Konversi Ekonomi dan Kebijakan Impor Substitusi: Jepang mengubah orientasi ekonomi Indonesia. Pertanian dan industri diarahkan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh Jepang. Jepang mendorong impor substitusi, yang berarti mengurangi ketergantungan pada impor dengan mengembangkan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

d. Tenaga Kerja Paksa: Jepang memaksa warga Indonesia bekerja dalam kondisi yang sering kali sulit dan tidak manusiawi, terutama dalam proyek-proyek pembangunan militer dan infrastruktur. Pekerjaan paksa ini menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang Indonesia.

e. Pembentukan Badan Ekonomi: Jepang membentuk Badan Ekonomi untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan ekonomi di Indonesia. Namun, kebijakan ini lebih menguntungkan kepentingan Jepang daripada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

f. Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi: Meskipun adanya aspek negatif dari pendudukan Jepang, periode ini juga membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Banyak orang Indonesia yang diberi kesempatan untuk terlibat dalam sektor ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh orang asing.

g. Akhir Pendudukan Jepang: Pada tahun 1945, Jepang menyerah pada Sekutu, mengakhiri pendudukan mereka di

Indonesia. Pada saat itu, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka pada 17 Agustus 1945.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Meskipun eksploitasi dan penindasan terjadi, periode ini juga menyebabkan perubahan ekonomi dan sosial yang penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan.

Sejarah perkembangan ekonomi Indonesia selama masa penjajahan mencerminkan perubahan dan penindasan yang dialami oleh penduduk Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan sektor pertanian, pengambilalihan sumber daya alam dan eksploitasi oleh penjajah masih menjadi ciri utama dari periode ini.

3. Masa Pra Kemerdekaan

Pada masa pra kemerdekaan, ekonomi Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat memengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi di wilayah ini. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa pra kemerdekaan:

a. Pertanian dan Perdagangan Prasejarah hingga Kerajaan Hindu-Buddha (Prasejarah - Abad ke-14 M): Pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat pra kemerdekaan, dan hasil-hasil pertanian seperti padi, jagung, dan ubi menjadi sumber makanan utama. Selain itu, perdagangan lokal dan internasional juga berkembang, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang kerajinan.

b. Periode Kesultanan dan Islam (Abad ke-14 - 16 M): Di bawah kesultanan-kesultanan Islam seperti Kesultanan Mataram, Aceh, dan Demak, perdagangan terus berkembang, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan barang-barang

lainnya. Pertanian juga masih menjadi mata pencaharian utama, dengan sistem tanam paksa yang diterapkan di beberapa wilayah.

c. Kolonialisme Awal (Abad ke-17 - 18 M): Setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, perdagangan rempah-rempah menjadi fokus utama. Belanda mendirikan VOC dan memonopoli perdagangan rempah-rempah serta mengendalikan sebagian besar wilayah perdagangan di Indonesia. Ekonomi Indonesia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global dan ekspor Belanda.

d. Pengembangan Ekonomi Kolonial (Abad ke-19 - Awal Abad ke-20 M): Pada abad ke-19, kolonial Belanda mulai mengubah pola ekonomi Indonesia dengan mengembangkan produksi komoditas seperti kopi, teh, karet, dan gula untuk ekspor. Mereka mendorong pembukaan perkebunan besar dan penggunaan kerja paksa di sektor pertanian.

e. Periode Modernisasi (Akhir Abad ke-19 - Awal Abad ke-20 M): Belanda juga membawa modernisasi seperti pengembangan infrastruktur seperti jalan kereta api dan pelabuhan. Namun, upaya ini lebih untuk memudahkan transportasi komoditas keluar dari Indonesia dan bukan untuk membangun ekonomi lokal.

f. Perang Dunia II dan Jepang (1940-an): Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki Indonesia dan memaksa perekonomian untuk mendukung upaya perang. Mereka menggalakkan produksi dalam negeri untuk kepentingan perang.

g. Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan (Akhir 1940-an): Setelah Jepang menyerah pada 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Periode ini ditandai oleh usaha-usaha dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri. Beberapa langkah awal termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, redistribusi tanah kepada petani, dan

pembentukan kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Sejarah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa pra kemerdekaan mencerminkan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan pengaruh asing terhadapnya. Meskipun penduduk Indonesia telah lama berhubungan dengan perdagangan dan pertanian, kolonialisme dan penjajahan telah membentuk dinamika ekonomi yang lebih besar, yang akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

4. Masa Orde Lama

Masa Orde Lama adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966, di mana negara ini baru saja merdeka dari penjajahan Belanda dan sedang mencari bentuk pemerintahan yang tepat. Selama periode ini, Indonesia mengalami berbagai tantangan dan usaha dalam mengatur dan membangun ekonomi yang mandiri. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 12 Maret 1967 yaitu pada masa kepemimpian Soekarno, terdapat 3 (tiga) fase perekomian. Pertama fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kedua fase penguatan ekonomi (melalui nasionalisasi*),* dan ketiga fase krisis ekonomi terpusat (Pratama, 2018:317). Berikut adalah gambaran perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama:

a. Awal Kemerdekaan dan Tantangan Ekonomi (1945 - 1949): Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 1945, Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi nasional. Perang kemerdekaan melawan Belanda menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Selama periode ini, perekonomian lebih difokuskan pada memenuhi kebutuhan perang dan melawan penjajah.

b. Perjanjian Linggarjati dan Roem-Roijen: (1947-1949): Pada periode ini, Indonesia mencoba menjalin negosiasi dengan Belanda untuk mencapai kesepakatan politik dan ekonomi.

Namun, kesepakatan tersebut cenderung menguntungkan Belanda dan mempertahankan struktur ekonomi yang tidak merata.

c. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) (1948-1949): Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang didirikan setelah Agresi Militer I, mencoba mengambil alih kontrol ekonomi dan melakukan reformasi agraria dengan mengambil alih tanah-tanah milik Belanda dan perusahaan swasta.

d. Kemerdekaan Sebenarnya dan Tantangan Konsolidasi (1949-1950): Setelah Perjanjian Roem-Roijen pada 1949, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Namun, perekonomian masih diwarnai oleh ketidakstabilan dan kekurangan sumber daya. Pengelolaan ekonomi masih terbatas dan belum ada kerangka kebijakan yang kokoh.

e. Kebijakan Pembangunan Ekonomi (1950-an): Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri. Pada awal 1950-an, Indonesia menerapkan "Ekonomi Terpimpin" yang menekankan kerja sama antara sektor publik dan swasta. Pemerintah juga memulai program-program industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.

   Pada masa Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1957, terjadi upaya dari pemerintah untuk mengubah dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Pada tahun ini terjadi nasionalisasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset mlik Belanda. Sejumlah program nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat itu, adalah dengan menyelenggarakan program nasionalisasi perkembunan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara. Selanjutnya, dalam perdagangan terjadi nasionalisasi lahir PT Negara. Pada

perindustrian dan pertambangan mengenal Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPIT). Pada bidang perbankan *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Telah lahir juga Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinasionalisasi dari perusahaan listrik dan gas Belanda. Dalam bidang trasportasi, telah lahir PELNI, Garuda Indonesia Airways (GIA), dan Perusahaan Negara Kereta Api (Pratama, 2018:317-318)

f. Krisis Ekonomi (1957-1958): Krisis politik dan ekonomi terjadi pada tahun 1957-1958, terutama akibat pemberontakan PRRI/Permesta dan pengaruh dari Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Krisis ini mengganggu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

g. Ekonomi Terpimpin (1959-1966): Pada tahun 1959, pemerintah menerapkan kebijakan Ekonomi Terpimpin yang lebih mengarah pada nasionalisasi perusahaan asing dan pemerintahan terpusat. Ini menciptakan ketidakpastian bagi investor asing dan sektor swasta.

   Pada era ekonomi terpimpin (tahun 1957 - 1965), dimulai dengan pidato Soekarno pada Tanggal 21 Februari 1957 dengan judul "Menyelamatkan Republik Proklamasi". Inti dari pidato Soekarno tersebut adalah Indonesia tidak cocok dengan sistem ekonomi liberal. Pola parlementer pun dinyatakan sebagai sistem yang tidak cocok dengan sistem pemerintahan Indonesia. Ketidakstabilan di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sehingga, pada masa ini harus dilakukan secara terpimpin. Pada masa itu, Soekarno mencoba menginterpretasikan konsep demokrasi ekonomi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi pada masa itu (Pratama, 2018:318).

h. Pemberangusan Oposisi Politik (1960-an): Pemerintah Orde Lama secara bertahap menghancurkan oposisi politik dan mengonsolidasikan kekuasaan. Hal ini menghasilkan stabilitas politik yang relatif, tetapi juga terkadang meredam kritik dan inovasi dalam ekonomi.

Periode Orde Lama mencatat usaha-usaha awal dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang mandiri. Meskipun terdapat upaya dalam mengembangkan sektor industri dan pertanian, perekonomian masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan hubungan internasional.

5. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Selama periode ini, pemerintah fokus pada program pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan sentralisasi dan otoritarianisme.

Pada era Soeharto (12 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), pada awal pemerintahan Soeharto konstelasi ekonomi, sosial, politik tidak kondusif. Sehingga, Soeharto merancang 3 (tiga) landasan dalam pembangunan nasional (lebih dikenal dengan Trilogi Pembangunan), yaitu: (a) stabilitas nasional yang dinamis, (b) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan (c) pemerataan pembangunan. Bukti konkret dari rehabilitasi ekonomi adalah pada Tanggal 10 Januari 1967 disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Thun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan melihat perkembangan ekonomi pada masa itu, Soeharto fokus pada perubahan sistem komando menjadi mekanisme pasar, disiplin fiskal dan anggaran berimbang, kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, dan memulihkan neraca pembayaran (Pratama, 2018:319).

Berikut adalah gambaran perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru:

a. Stabilitas Ekonomi Awal (1966-1970-an): Setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 1966, pemerintahan Soeharto berusaha memulihkan stabilitas ekonomi yang terganggu oleh inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang disebut "Paket Ekonomi Dasar" (PELITA), yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan membangun dasar ekonomi yang kuat.

b. Pembangunan Ekonomi (1970-an - 1980-an): Pemerintah Orde Baru mengadopsi model pembangunan ekonomi yang disebut "Pembangunan Berencana Terpadu" (Pentakosta). Fokus utamanya adalah pada industrialisasi dan pertanian modern, dengan dukungan bagi sektor manufaktur dan pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan pertanian tradisional.

c. Sektor Manufaktur dan Industri (1980-an): Pemerintah mendorong pengembangan sektor industri dengan memberikan insentif bagi investasi dalam sektor manufaktur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan dan ekspor produk-manufaktur. Namun, industrialisasi ini juga cenderung tidak merata, dengan banyaknya proyek yang terpusat di Pulau Jawa.

d. Program Transmigrasi dan Pertanian Modern (1980-an - 1990-an): Pemerintah meluncurkan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jawa dan mendorong pembangunan pertanian di luar Jawa. Namun, program ini juga memunculkan isu-isu terkait hak asasi manusia dan dampak lingkungan.

e. Ketergantungan pada Utang Luar Negeri (1980-an): Pemerintah Orde Baru mengandalkan pinjaman luar negeri untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Hal ini

menyebabkan akumulasi utang luar negeri yang signifikan, yang akhirnya berkontribusi pada krisis keuangan pada akhir 1990-an.

f. Krisis Ekonomi 1997-1998: Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sangat mempengaruhi Indonesia. Rupiah anjlok nilainya, utang luar negeri terbuka, dan terjadi krisis moneter yang parah. Krisis ini mengungkapkan berbagai masalah struktural dalam ekonomi Indonesia, termasuk ketergantungan pada sektor keuangan dan ketidakmerataan distribusi ekonomi.

g. Akhir Orde Baru (1998): Tekanan sosial dan ekonomi yang meningkat akibat krisis ekonomi, korupsi yang merajalela, dan perasaan tidak puas terhadap pemerintahan Soeharto memicu protes besar-besaran dan kerusuhan. Pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri, mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi demokratisasi dan reformasi ekonomi di Indonesia.

Periode Orde Baru di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, terutama selama tahun 1980-an. Namun, ekonomi yang terlalu terfokus pada sektor tertentu, korupsi yang merajalela, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan menjadi masalah serius yang akhirnya berkontribusi pada krisis ekonomi yang mengguncang negara pada akhir 1990-an.

6. Masa Reformasi

Masa Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Berikut adalah gambaran perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Reformasi:

a. Krisis Ekonomi 1997-1998 dan Akhir Orde Baru: Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 mempengaruhi Indonesia secara dramatis. Rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan sektor perbankan mengalami krisis. Kondisi ekonomi yang memburuk dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru memicu protes besar-besaran, yang akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

b. Pemulihan Ekonomi Awal (1998-1999-an): Setelah pergantian rezim, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas ekonomi. IMF memberikan dukungan finansial dan reformasi struktural diterapkan, seperti kebijakan pengendalian inflasi dan reformasi perbankan.

   Pada era B.J Habibie (21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999), merupakan masa dimana terjadi reformasi ekonomi. Hal yang dilakukan melalui indepensi kebijakan moneter, restruksi perbankan, konsolidasi fiskal, penyehatan korporasi, dan penetapan desentralisasi fiskal. Indepensi kebijakan moneter dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% (tujuh puluh pesen), dan memberikan status independen kepada Bank Indonesia. Restruksi perbankan dilakukan melalui menerbitkan obligasi, dan menutup bank-bank. Penyehatan korporasi dilakukan dengan cara merestrukturisasi utang swasta, dan melarang praktik monopoli Badan Urusan Logistik (BULOG). Konsolidasi fiskal dilakukan dengan cara membatalkan proyek infratruktur, dan membiayai program jaring pengamanan sosial. Penetapan desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara menetapkan undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Pratama, 218:319).

c. Konsolidasi Politik dan Perubahan Kebijakan Ekonomi (Awal 2000-an - Pertengahan 2000-an): Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fokus utama adalah pada konsolidasi politik dan reformasi lembaga. Di sektor ekonomi, pemerintah berupaya menarik investasi asing, mendorong sektor non-migas, dan mengembangkan program-program sosial.

   Pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (22 Oktober sampai dengan 23Juli 2001), ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pada masa ini dibangun juga prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme. Selanjutnya, Gus Dur berfokus pada jaminan atas perlindungan hak- hak buruh, perlindungan minoritas, dan pengetasan kemiskinan. Konkret dari otonomi daerah yang dilakukan pada era Gus Dur adalah dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah, pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah, dan penerapan pajak daerah serta retribusi daerah (Pratama, 218:319-320)

d. Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi (Akhir 2000-an - Awal 2010-an): Indonesia berhasil menarik investasi asing dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama beberapa tahun. Sektor pertambangan dan energi terus menjadi kontributor penting terhadap pendapatan negara.

e. Diversifikasi Ekonomi dan Infrastruktur (2010-an - Sekarang): Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan pada diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor manufaktur dan pertanian. Program pembangunan infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Isu Lingkungan (2010-an - Sekarang): Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disertai dengan isu-isu lingkungan yang meningkat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Perusakan lingkungan dan deforestasi menjadi isu serius yang memerlukan perhatian pemerintah.

g. Pengaruh Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19, yang dimulai pada tahun 2020, berdampak besar pada ekonomi Indonesia seperti halnya di seluruh dunia. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan, termasuk program bantuan sosial dan stimulus ekonomi.

Masa Reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Terlepas dari beberapa tantangan dan kendala, Indonesia terus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta mengatasi masalah-masalah seperti ketidakmerataan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

B. Lingkup Perekonomian Indonesia

Lingkup perekonomian Indonesia mencakup berbagai sektor dan aktivitas yang berkontribusi terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Perekonomian Indonesia sangat beragam, mencakup sektor pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa aspek penting dari lingkup perekonomian Indonesia:

1. **Pertanian dan Perikanan**: Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan palawija serta produk-produk hortikultura, buah-buahan, dan sayuran ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, sektor perikanan juga penting, terutama dalam menyediakan protein hewani.

2. **Industri**: Sektor industri mencakup berbagai aktivitas seperti industri pengolahan, manufaktur, pertambangan, dan energi. Indonesia memiliki industri pengolahan yang mencakup produksi makanan, tekstil, otomotif, elektronik, dan lainnya. Industri pertambangan juga berperan dalam ekonomi dengan produksi batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya.
3. **Jasa**: Sektor jasa memiliki peranan yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Ini mencakup jasa keuangan, perbankan, asuransi, real estat, perdagangan eceran dan grosir, pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan lebih banyak lagi.
4. **Perdagangan**: Perdagangan internasional dan domestik adalah bagian integral dari perekonomian Indonesia. Ekspor dan impor mencakup berbagai komoditas seperti minyak bumi, gas alam, pertanian, produk industri, dan lainnya. Pelabuhan, bandara, dan infrastruktur terkait juga memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan.
5. **Investasi:** Investasi baik dalam bentuk domestik maupun asing menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi mencakup sektor industri, infrastruktur, pertanian, teknologi, dan lainnya. Investasi dapat membantu menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.
6. **Pariwisata**: Pariwisata adalah sektor yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Negara ini memiliki berbagai destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pariwisata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan budaya Indonesia.
7. **Sumber Daya Alam**: Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk hutan tropis, tambang mineral, minyak bumi, dan gas alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini

berdampak pada produksi komoditas dan ekspor, tetapi juga menimbulkan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

8. **Keuangan dan Perbankan**: Sektor keuangan dan perbankan menyediakan layanan perbankan, keuangan, dan investasi yang penting untuk pengembangan bisnis dan investasi. Bank-bank di Indonesia memfasilitasi transaksi ekonomi dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Lingkup perekonomian Indonesia sangat luas dan beragam, mencerminkan keragaman sumber daya dan aktivitas di seluruh negara. Penting untuk mengembangkan sektor-sektor ini dengan bijak, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial.

Selain beberapa lingkup perekonomian sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa aspek lain dari lingkup perekonomian Indonesia yang perlu dijelaskan. Berikut beberapa tambahan lingkup perekonomian Indonesia:

1. **Infrastruktur**: Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas energi adalah elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik memfasilitasi pergerakan barang dan orang serta mendorong investasi.
2. **Energi:** Sektor energi mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi energi, termasuk minyak bumi, gas alam, tenaga surya, tenaga angin, dan lainnya. Kemandirian energi dan keberlanjutan menjadi isu penting dalam pengembangan sektor ini.
3. **Teknologi dan Inovasi:** Pengembangan teknologi dan inovasi berkontribusi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sedang berupaya untuk memajukan sektor teknologi dan mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi.

4. **Pembangunan Berkelanjutan:** Konsep pembangunan berkelanjutan menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. **Keuangan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** UMKM memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berusaha untuk mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan.
6. **Kesejahteraan Sosial**: Pembangunan ekonomi juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah mengupayakan program-program perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
7. **Ekonomi Kreatif:** Sektor ekonomi kreatif mencakup industri kreatif seperti seni, budaya, media, desain, mode, dan teknologi informasi. Ekonomi kreatif merupakan sumber potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan dampak positif pada budaya dan kreativitas lokal.
8. **Pengembangan Wilayah:** Pengembangan wilayah bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur, industri lokal, pariwisata, dan inisiatif lainnya untuk mengurangi disparitas regional.

Lingkup perekonomian Indonesia sangat kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan global. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

bekerja bersama untuk mengelola dan mengembangkan aspek-aspek berbagai sektor ini agar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

C. Faktor-Faktor Geografis, Demografis, dan Budaya Yang Mempengaruhi Ekonomi Indonesia

Faktor Geografis

Faktor-faktor geografis memainkan peran penting dalam membentuk kondisi ekonomi Indonesia karena karakteristik geografisnya yang beragam dan kompleks. Berikut adalah beberapa faktor geografis yang mempengaruhi ekonomi Indonesia:

1. **Kepulauan dan Topografi:** Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan topografi yang beragam, termasuk pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kepulauan ini mempengaruhi konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, yang dapat memengaruhi perdagangan, transportasi, dan distribusi barang.
2. **Posisi Geografis:** Lokasi Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia membuatnya menjadi jalur perdagangan penting sejak zaman kuno. Ini memberikan potensi besar bagi perdagangan internasional, tetapi juga membuat Indonesia rentan terhadap risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
3. **Sumber Daya Alam:** Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil hutan, pertanian, tambang mineral, minyak bumi, dan gas alam. Faktor ini memainkan peranan penting dalam ekonomi, kontribusi ekspor, dan pembangunan industri.

4. **Iklim Tropis:** Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung pertanian dan produksi tanaman tropis seperti padi, kopi, teh, cokelat, dan rempah-rempah. Namun, cuaca yang tidak stabil dan pola curah hujan yang bervariasi dapat mempengaruhi produksi dan ketahanan pangan.

5. **Keanekaragaman Hayati:** Keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi dan memiliki pengaruh langsung terhadap sektor pertanian, perikanan, dan industri. Keanekaragaman hayati ini juga memiliki potensi untuk pengembangan industri farmasi, kosmetik, dan produk-produk berbasis bio.

6. **Perikanan dan Kelautan:** Lautan Indonesia yang luas dan kaya menjadi sumber daya penting dalam sektor perikanan dan kelautan. Namun, eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan laut menjadi masalah serius yang mempengaruhi potensi ekonomi sektor ini.

7. **Pulau-pulau Kecil:** Kepulauan kecil di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam hal transportasi, infrastruktur, dan akses ke sumber daya. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan wilayah.

8. **Kawasan Hutan dan Lahan Basah**: Hutan dan lahan basah di Indonesia memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang besar. Faktor ini mempengaruhi sektor pertanian, keberlanjutan sumber daya alam, serta dampak negatif seperti deforestasi dan kebakaran hutan.

9. **Gempa Bumi dan Aktivitas Gunung Berapi**: Indonesia berada di Cincin Api Pasifik dan memiliki aktivitas gempa bumi dan gunung berapi yang tinggi. Faktor ini dapat berdampak pada infrastruktur, produksi, dan stabilitas ekonomi.

10. **Pariwisata:** Keindahan alam dan budaya Indonesia menjadi daya tarik pariwisata. Faktor geografis seperti pantai,

gunung, dan keanekaragaman budaya memainkan peran penting dalam perkembangan sektor pariwisata.

Faktor-faktor geografis ini membentuk lanskap ekonomi Indonesia dan memberikan tantangan serta peluang yang unik bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara bijaksana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Faktor Demografis

Faktor-faktor demografis, yang melibatkan karakteristik penduduk seperti jumlah, usia, distribusi geografis, tingkat pendidikan, dan komposisi keluarga, memiliki dampak besar pada ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor demografis yang mempengaruhi ekonomi negara ini:

1. **Jumlah Penduduk:** Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia, yang menciptakan pasar konsumen yang besar dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi melalui permintaan dalam negeri. Namun, juga dapat menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menghasilkan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan penduduk.
2. **Struktur Usia Penduduk:** Distribusi usia penduduk Indonesia memiliki dampak pada pasar tenaga kerja dan kebijakan sosial. Jika proporsi penduduk usia produktif lebih besar, potensi tenaga kerja akan tinggi, tetapi perlu didukung dengan peluang pekerjaan yang memadai.
3. **Pertumbuhan Penduduk:** Tingkat pertumbuhan penduduk yang moderat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika didukung dengan peluang pekerjaan dan akses pendidikan yang baik. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat dapat memberikan tekanan pada sumber daya dan layanan sosial.

4. **Urbanisasi:** Tingkat urbanisasi yang tinggi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, memiliki dampak pada pembangunan infrastruktur, perumahan, dan layanan perkotaan. Ini juga menciptakan peluang dan tantangan dalam menciptakan pekerjaan dan mengelola perkembangan perkotaan.
5. **Tingkat Pendidikan:** Tingkat pendidikan penduduk mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan potensi inovasi. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
6. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja**: Proporsi penduduk yang terlibat dalam angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat ekonomi secara keseluruhan.
7. **Migrasi**: Migrasi internal penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain juga memengaruhi distribusi tenaga kerja, sumber daya manusia, dan perkembangan wilayah.
8. **Komposisi Keluarga:** Struktur keluarga, termasuk ukuran keluarga dan tingkat kesuburan, dapat mempengaruhi kebutuhan konsumsi, akses pendidikan, dan dukungan sosial.
9. **Kesehatan dan Harapan Hidup:** Kesehatan dan harapan hidup penduduk memiliki dampak pada produktivitas tenaga kerja dan biaya layanan kesehatan.
10. **Kesenjangan Demografis:** Ketidakmerataan dalam distribusi penduduk, pendidikan, dan kesejahteraan antarwilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Faktor-faktor demografis ini saling terkait dan kompleks dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan sosial harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Budaya mencakup norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan perilaku sosial masyarakat. Faktor-faktor budaya ini dapat mempengaruhi cara orang bekerja, berbisnis, berinteraksi, dan membuat keputusan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor budaya yang mempengaruhi ekonomi Indonesia:

1. **Budaya Kerja dan Produktivitas:** Norma dan nilai budaya dapat mempengaruhi etos kerja masyarakat. Misalnya, budaya yang menghargai kerja keras dan ketekunan dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi.
2. **Kewirausahaan dan Inovasi:** Budaya kewirausahaan dan inovasi dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta mendorong inovasi dalam industri. Masyarakat yang mendukung inisiatif kreatif dan pengembangan produk baru dapat memberikan kontribusi besar pada ekonomi.
3. **Sikap terhadap Risiko:** Budaya juga dapat mempengaruhi sikap terhadap risiko dalam berbisnis dan investasi. Masyarakat yang cenderung konservatif mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil risiko bisnis baru, sementara budaya yang mendukung inisiatif dapat mendorong risiko lebih tinggi.
4. **Konsumsi dan Gaya Hidup:** Budaya konsumsi dan gaya hidup mempengaruhi keputusan konsumen. Pola konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dapat

mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan tertentu.

5. **Pola Pembelian dan Penjualan:** Cara orang Indonesia melakukan transaksi bisnis juga dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, dalam beberapa sektor, transaksi dapat lebih didasarkan pada hubungan personal dan saling percaya daripada kontrak tertulis.
6. **Adat Istiadat dalam Bisnis:** Adat istiadat dan etika dalam bisnis, seperti cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan menjalin hubungan bisnis, dapat sangat dipengaruhi oleh budaya. Memahami norma-norma ini penting untuk menjalin kemitraan yang sukses.
7. **Budaya Kolektivitas dan Individualisme:** Budaya kolektivitas atau individualisme dapat memengaruhi perilaku dalam organisasi dan tim. Budaya yang lebih kolektif mungkin lebih mendukung kerjasama tim, sementara budaya individualistik mungkin lebih mendorong inisiatif individual.
8. **Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial:** Nilai budaya juga dapat mempengaruhi etika bisnis dan pandangan terhadap tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat dapat membentuk cara bisnis dijalankan.
9. **Budaya Kreativitas dan Seni:** Budaya seni dan kreativitas juga dapat berdampak pada ekonomi melalui industri kreatif seperti seni, musik, film, dan desain. Industri ini dapat berkontribusi pada pendapatan dan lapangan kerja.
10. **Budaya Keagamaan:** Budaya keagamaan juga memiliki pengaruh besar pada cara masyarakat berinteraksi dengan ekonomi. Nilai-nilai keagamaan dapat mempengaruhi tata cara berbisnis, etika, dan konsumsi.

Faktor-faktor budaya ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan nilai-nilai ini dapat membantu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam merencanakan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia.

D. Upaya Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam bidang ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi tantangan ekonomi. Berikut adalah beberapa upaya utama pemerintah dalam bidang ekonomi:

1. **Kebijakan Makroekonomi:** Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ini termasuk pengaturan anggaran pemerintah, suku bunga, dan inflasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabil.
2. **Pengembangan Infrastruktur:** Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan layanan energi yang lebih baik.
3. **Pembangunan Manusia:** Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Program-program pendidikan dan pelatihan juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan keterampilan di antara masyarakat.
4. **Pemberdayaan UMKM:** Pemerintah mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program-program pelatihan, akses keuangan, dan dukungan

teknologi. UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. **Investasi Asing:** Pemerintah mendorong investasi asing melalui insentif pajak, fasilitas perizinan, dan kemudahan berbisnis. Investasi asing dapat membantu meningkatkan modal, teknologi, dan keterampilan dalam ekonomi.
6. **Ekonomi Digital dan Inovasi:** Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi digital dan inovasi dengan mendorong start-up, teknologi informasi, e-commerce, dan penerapan teknologi baru dalam berbagai sektor.
7. **Pertanian dan Ketahanan Pangan:** Program-program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
8. **Pariwisata:** Pemerintah mendukung sektor pariwisata melalui promosi dan pengembangan destinasi wisata. Pariwisata berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan devisa, dan mempromosikan budaya Indonesia.
9. **Pengelolaan Lingkungan dan Energi:** Upaya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga berusaha meningkatkan efisiensi energi.
10. **Program Perlindungan Sosial**: Pemerintah meluncurkan program perlindungan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan. Ini mencakup bantuan sosial, program kesehatan, dan pendidikan.
11. **Reformasi Birokrasi:** Upaya dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan birokrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan layanan publik. Reformasi ini diharapkan akan meningkatkan iklim investasi dan bisnis.

12. **Perdagangan dan Investasi Internasional**: Pemerintah menjalin kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara lain untuk membuka peluang ekspor, impor, dan investasi, serta memperluas pasar bagi produk Indonesia.

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas. Namun, tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks juga membutuhkan koordinasi dan adaptasi terus-menerus dari pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain beberapa usaha di atas, masih banyak usaha pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi selain yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut beberapa contoh tambahan:

1. **Pengembangan Industri Strategis**: Pemerintah berfokus pada pengembangan industri-industri strategis yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah tinggi. Contohnya adalah industri manufaktur berbasis teknologi tinggi, industri petrokimia, dan industri otomotif.
2. **Pengembangan Ekonomi Pedesaan:** Pemerintah mendukung pembangunan ekonomi di daerah pedesaan melalui program-program seperti bantuan pertanian, perikanan, dan pengembangan ekowisata. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
3. **Pengembangan Sektor Energi Terbarukan**: Pemerintah mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengatasi masalah lingkungan.
4. **Pengembangan Ekonomi Kreatif:** Pemerintah mendukung sektor ekonomi kreatif, termasuk seni, budaya, fashion, desain, dan industri kreatif lainnya. Sektor ini memiliki

potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

5. **Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):** Pemerintah mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus yang memiliki potensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup KEK industri, pariwisata, teknologi, dan lainnya.
6. **Peningkatan Akses Keuangan:** Pemerintah berupaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dengan mendorong layanan perbankan inklusif dan mikrofinansial.
7. **Pengembangan Klaster Industri:** Pemerintah mendukung pengembangan klaster industri di berbagai wilayah untuk memaksimalkan potensi lokal dan meningkatkan daya saing. Contohnya adalah klaster pariwisata, tekstil, dan makanan.
8. **Kolaborasi dengan Swasta dan Pihak Ketiga:** Pemerintah juga menggandeng sektor swasta dan pihak ketiga dalam membangun proyek infrastruktur, mengembangkan teknologi, serta menciptakan inovasi dan investasi dalam berbagai sektor.
9. **Pengembangan Zona Ekonomi Khusus (ZEK):** Selain KEK, pemerintah juga mengembangkan Zona Ekonomi Khusus yang menargetkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu, sering kali berfokus pada sektor tertentu seperti industri.
10. **Ketahanan Ekonomi Terhadap Krisis:** Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membangun ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal seperti krisis ekonomi global, seperti dengan memperkuat sektor riil, perbankan, dan cadangan devisa.

Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, inklusif, berkelanjutan, dan inovatif.

Pemerintah terus berupaya untuk menyesuaikan kebijakan dan program-programnya dengan perubahan dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri

E. Keterkaitan Ekonomi Indonesia dengan Ekonomi Global

Keterkaitan ekonomi Indonesia dengan ekonomi global sangat signifikan. Indonesia adalah bagian integral dari pasar dunia dan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang melintasi batas-batas nasional. Keterkaitan ini terjadi melalui berbagai saluran, dan dampaknya dapat dirasakan dalam beberapa cara:

1. **Perdagangan Internasional:** Indonesia adalah negara eksportir dan importir, yang berarti perdagangan internasional memiliki peran penting dalam perekonomian. Ekspor dan impor barang dan jasa seperti minyak bumi, gas alam, produk pertanian, tekstil, dan manufaktur menciptakan aliran pendapatan dan permintaan di pasar global.
2. **Investasi Asing Langsung (FDI):** Investasi asing langsung (FDI) berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menghadirkan modal, teknologi, dan keterampilan baru. Perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia membantu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri, dan meningkatkan daya saing.
3. **Pergerakan Modal dan Keuangan:** Arus modal dan keuangan antara Indonesia dan pasar global dapat berdampak pada nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, serta stabilitas pasar keuangan domestik. Investasi portofolio, perdagangan valuta asing, dan arus modal jangka pendek memainkan peran penting dalam aktivitas keuangan.

4. **Pengaruh Harga Komoditas Global**: Indonesia adalah eksportir utama berbagai komoditas seperti minyak, gas, batu bara, dan produk pertanian. Perubahan harga komoditas global dapat mempengaruhi pendapatan ekspor dan neraca perdagangan.

5. **Pasar Tenaga Kerja Global:** Migrasi tenaga kerja internasional dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di Indonesia dan negara-negara lain. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga dapat menghasilkan aliran devisa yang signifikan.

6. **Ketergantungan pada Ekonomi Besar:** Kesehatan ekonomi global, terutama dari negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya, dapat mempengaruhi permintaan ekspor, investasi, dan pasar modal Indonesia.

7. **Perubahan Teknologi dan Inovasi:** Keterhubungan dengan ekonomi global juga berarti akses terhadap teknologi, inovasi, dan best practice internasional. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor tertentu.

8. **Keterkaitan Finansial dan Krisis**: Perkembangan di pasar finansial global dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. Krisis keuangan global dapat menyebar dan memengaruhi stabilitas perbankan, nilai tukar, dan investasi.

9. **Pengaruh Perjanjian Perdagangan:** Kesepakatan perdagangan internasional seperti perjanjian bilateral dan multilateral memiliki pengaruh langsung pada akses pasar, tarif, dan regulasi perdagangan yang dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia.

10. **Kebijakan Moneter dan Fiskal:** Kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh bank sentral dan pemerintah Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi

global, terutama dalam hal inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi makro.

Keterkaitan erat ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan ekonomi global dalam membentuk kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah, bisnis, dan masyarakat perlu memahami dan mengelola dampak keterkaitan ini dengan bijak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi nasional. ***

Allah memberi rizeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya

(HR. Aththusi)

BAB 2

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan sejarah yang kaya, adalah salah satu negara terbesar di dunia yang menunjukkan dinamika unik dalam konteks sistem ekonominya. Sistem ekonomi adalah fondasi yang memandu distribusi sumber daya, produksi, dan pertukaran dalam sebuah negara. Di Indonesia, kita menyaksikan campuran unik antara prinsip ekonomi pasar, peran pemerintah, dan keanekaragaman budaya yang memberikan kekayaan warna dalam setiap aspek ekonomi.

Sistem ekonomi Indonesia memiliki banyak nuansa dan kompleksitas yang layak untuk dijelajahi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem ekonomi Indonesia, kita dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mencari solusi untuk tantangan-tantangan masa depan.

A. Definisi Sistem Perekonomian

Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. sistem perekonomian adalah cara dalam mengelola, mengatur dan

mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat (Putri & Ghazali, 2021). Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didaya gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Febria Lina, 2019). Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-ihwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Anggarini, 2020).

Sistem perekonomian mengacu pada cara suatu masyarakat atau negara mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi, termasuk faktor produksi (tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi), distribusi barang dan jasa, serta alokasi pendapatan. Sistem perekonomian mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti bagaimana produksi dilakukan, cara distribusi hasil produksi, dan cara konsumen mengakses barang dan jasa.

Ada beberapa jenis utama sistem perekonomian, yaitu:

1. **Ekonomi Pasar (*Market Economy*):** Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi diambil oleh kekuatan pasar. Harga dan permintaan menjadi faktor penentu utama dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Perusahaan dan individu bertindak berdasarkan keuntungan ekonomi mereka sendiri, tanpa campur tangan besar dari pemerintah. Contoh negara dengan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat.
2. **Ekonomi Terencana (*Planned Economy*):** Dalam sistem ekonomi terencana, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur semua aspek ekonomi. Keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dibuat oleh perencanaan pemerintah. Pemerintah menentukan alokasi sumber daya dan harga barang. Contoh dari sistem ini adalah model ekonomi yang diterapkan di Uni Soviet pada masa lalu.

3. **Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*):** Mayoritas negara di dunia menerapkan sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ini, terdapat kombinasi antara elemen pasar dan elemen intervensi pemerintah. Pemerintah ikut campur tangan dalam beberapa sektor ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan regulasi lingkungan. Namun, sebagian besar kegiatan ekonomi masih diarahkan oleh kekuatan pasar.
4. **Ekonomi Tradisional (*Traditional Economy*):** Dalam sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan cara-cara lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Biasanya, ada sedikit perubahan dalam jenis pekerjaan atau produksi yang dilakukan oleh masyarakat ini. Contoh dari sistem ini bisa ditemukan dalam beberapa masyarakat suku pedalaman yang menjalani kehidupan berbasis pertanian atau perburuan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, tidak ada sistem perekonomian yang murni dalam bentuk aslinya. Sebagian besar negara mengadopsi kombinasi dari berbagai elemen sistem ekonomi, tergantung pada nilai-nilai budaya, sejarah, dan tujuan ekonomi yang ingin dicapai.

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Secara historis pertumbuhan kapitalisme ialah bagian dari gerakan individualisme. Gerakan ini memunculkan akibat dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan gerakan ini memunculkan reformasi. Dalam perihal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam ikatan warga menimbulkan ilmu-ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Oleh sebab itu peradaban kapitalis legal (*legitimate*) adanya. Di dalamnya tercantum penafsiran kalau kapitalisme merupakan

suatu sistem sosial yang merata lebih dari hanya jenis tertentu dalam perekonomian. Sistem ini tumbuh di Inggris pada abad 18 masehi serta setelah itu menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut serta Amerika Utara (Ebenstein & Fogelman, 1994:148; Maruta, 2014:648).

Kelahiran ekonomi kapitalis tidak dapat dipisahkan dengan Adam Smith, seseorang pemikir terkemuka di abad 18 yang sudah membidani kelahiran ilmu ekonomi melalui karyanya yang monumental "*Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations*" pada tahun 1776 (Saefuddin, 1992: xvi; Maruta, 2014:650).

Smith, dengan sistem pasarnya menimbulkan pengetahuan tingkah laku ekonomi yang belum sempat ditemui lebih dahulu yang setelah itu jadi bahan analisa untuk terjadinya suatu badan ilmu yang kian utuh. Pandangan, pemikiran, analisa serta teori-teorinya yang tertuang secara terperinci dalam bukunya tersebut mendasari lahirnya suatu sistem ekonomi yang hingga saat ini berlaku, ialah sistem ekonomi kapitalis. Buku Smith sebetulnya ialah cerminan kupasan serta sekalian ramalan tentang kehidupan ekonomi pada zamannya. Dengan ketajaman serta kekuatan nalar, kekayaan gagasan dan kepercayaan seseorang filsuf pada jamannya, Smith memandang dibalik indikasi yang menjadi pusat perhatiannya, suatu yang setelah itu disebutnya selaku hukum-hukum sistem pasar. Pondasi analisisnya semata-mata obyektif yang mendasari aksi ekonomi seseorang sebagaimana yang dia tulis dalam bukunya (Saefuddin, 1992: xvi; Maruta, 2014:651): "*It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest*".

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang mengendalikan produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa melalui pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan dan kendali atas sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan

bisnis, berada di tangan individu, perusahaan swasta, atau individu. - menginvestasikan uang. Kapitalisme secara umum mencakup hak-hak individu dan kelompok yang bertindak sebagai "badan hukum" atau korporasi yang memperdagangkan modal, tenaga kerja, dan uang. Menurut Garnham (1999:22), masih banyak pengertian lain tentang kapitalisme. ***Pertama***, kapitalisme merupakan suatu proses yang mulai berkembang di Eropa antara abad ke-16 dan ke-19, terutama pada masa berkembangnya bank-bank komersial Eropa, di mana sekelompok individu atau sekelompok orang dapat bertindak sebagai suatu perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memiliki atau memperdagangkan. kepemilikan pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga kerja manusia, di pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dengan tujuan menciptakan keuntungan di mana negara melindungi status melalui hak milik dan tunduk pada hukum setempat, atau orang lain yang telah terikat kontrak, tugas-tugasnya ditetapkan secara eksplisit maupun implisit dan jelas tidak hanya didasarkan pada tugas dan perlindungan yang diberikan oleh kepenguasaan feodal.

Kedua, kapitalisme merupakan konsep persaingan yang dimulai pada abad ke-19 dalam konteks revolusi industri dan pada abad ke-20 dalam konteks Perang Dingin, yang berupaya mendukung kekuatan modal, untuk menentukan peran pasar yang ada, dan untuk mengarahkan penggunaan atau penghapusan kapitalisme, undang-undang pemerintah mengenai hak milik dan pasar. ***Ketiga,*** kapitalisme dipandang sebagai keyakinan akan nilai benda-benda tersebut. ***Keempat***, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menguasai produksi dan distribusi barang dan jasa dengan ciri-ciri sebagai berikut: sebagian besar alat produksi dan distribusi dimiliki oleh perseorangan; Barang dan jasa dijual di pasar yang bebas dan kompetitif; dan uang (uang dan benda lainnya) diinvestasikan dalam berbagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Kapitalisme sebagai " *a mode of social organization characterized by the domination of exchange relation* ". Terlebih lagi, hubungan pasti antara yang abstrak dan material, atau antara

konsep dan material, yang penting dalam sejarah materialisme sebagai cara menganalisis kapitalisme, berakar pada hubungan antara yang abstrak (relasi pertukaran) dan yang kongkret (pengalaman hidup individu, tenaga kerja, dsb.).

Banyak hal yang sering disebutkan dalam pengertian kapitalisme: sistem, kapital (modal), kepemilikan, proses produksi, persaingan, pasar bebas, investasi dan keuntungan. Isu-isu kunci ini menjadi penentu yang berguna bagi berfungsinya kapitalisme dan dapat dilihat dalam sejarah panjang perkembangan kapitalisme (Garnham, 1999: 22).

Beberapa karakteristik utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan Swasta: Kepemilikan atas sumber daya ekonomi, termasuk perusahaan dan properti, umumnya dimiliki oleh individu atau entitas swasta. Individu memiliki kebebasan untuk memiliki, mengelola, dan mengendalikan aset mereka sesuai dengan tujuan ekonomi dan kepentingan pribadi mereka.

b. Pasar Bebas: Sistem ekonomi kapitalis sangat bergantung pada pasar bebas, di mana harga dan alokasi barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Harga dipengaruhi oleh persaingan dan efisiensi pasar, sehingga harga mencerminkan nilai dan keinginan konsumen.

c. Kebebasan Ekonomi: Individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan ekonomi yang paling menguntungkan bagi mereka. Ini mencakup keputusan tentang apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang akan diproduksi, harga berapa yang akan ditetapkan, dan sebagainya.

d. Kompetisi: Kompetisi antara perusahaan-perusahaan di pasar menjadi pendorong utama inovasi, efisiensi, dan

peningkatan kualitas produk dan layanan. Persaingan ini dapat menghasilkan pilihan yang lebih baik bagi konsumen.

e. Inisiatif Pribadi: Individu dan perusahaan diberi insentif untuk mengambil risiko dan berusaha meraih keuntungan ekonomi. Inisiatif pribadi dan inovasi menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam sistem ini.

f. Ketidakcampuran Pemerintah: Meskipun pemerintah biasanya campur tangan dalam ekonomi kapitalis untuk mengatur dan menjaga adanya aturan main yang adil, campur tangan ini cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

g. Pertumbuhan Ekonomi: Sistem ekonomi kapitalis sering dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat karena mendorong investasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.

Namun, penting untuk diingat bahwa sistem ekonomi kapitalis juga memiliki kritik dan tantangan. Beberapa kritik mencakup kesenjangan ekonomi yang dapat terjadi, risiko monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen, serta potensi mengabaikan dampak lingkungan dan sosial dalam upaya mencapai keuntungan. Karena itu, sebagian besar negara dengan sistem ekonomi kapitalis biasanya mencoba mengimbangi kekuatan pasar dengan regulasi pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga keseimbangan sosial.

Sistem ekonomi kapitalis memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah gambaran singkat tentang kelemahan dan keunggulan sistem ekonomi kapitalis:

Keunggulan Sistem Ekonomi Kapitalis:

a. Inovasi dan Efisiensi: Sistem kapitalis mendorong inovasi dan efisiensi karena perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih

efisien guna memenangkan persaingan pasar. Ini sering menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan peningkatan tingkat kesejahteraan.

b. Kebebasan Individu dan Inisiatif Pribadi: Sistem kapitalis memberi individu kebebasan untuk mengejar tujuan ekonomi dan inisiatif pribadi mereka. Hal ini dapat mendorong semangat kewirausahaan dan inovasi.

c. Pilihan Konsumen: Karena pasar bebas, konsumen memiliki beragam pilihan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Persaingan antarperusahaan mendorong perbaikan kualitas dan harga yang lebih kompetitif.

d. Distribusi Efisien Sumber Daya: Mekanisme harga dan pasar membantu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkannya.

e. Pertumbuhan Ekonomi: Sistem kapitalis cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.

Dalam pasar kapitalistik, kekuatan permintaan dan penawaran yang tampaknya netrallah yang menentukan harga satu produk dan dengan demikian memberi sinyal kepada produsen apakah mereka mesti melakukan ekspansi produk, mengurangi output, atau mengubah teknik produksi, mengurangi struktur biaya, dan sebagainya.

Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis:

a. Kesenjangan Ekonomi: Salah satu kritik utama terhadap sistem kapitalis adalah potensi terjadinya kesenjangan ekonomi yang signifikan. Beberapa individu atau perusahaan dapat mengakumulasi kekayaan yang besar sementara yang lain mungkin mengalami kemiskinan.

b. Ketidakpastian dan Ketidakstabilan: Pasar kapitalis cenderung mengalami fluktuasi dan ketidakstabilan, yang dapat menyebabkan resesi ekonomi, pengangguran, dan ketidakpastian finansial.

c. Pentingnya Keuntungan: Dalam fokus pada mencari keuntungan, ada risiko bahwa masalah etika dan sosial, serta dampak lingkungan, dapat diabaikan.

d. Monopoli dan Oligopoli: Dalam beberapa kasus, persaingan pasar dapat berkurang karena perusahaan besar bisa mengendalikan pasar secara eksklusif (monopoli) atau dalam kelompok yang terbatas (oligopoli), yang merugikan konsumen.

e. Kehilangan Fokus Jangka Panjang: Fokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek mungkin mengabaikan masalah jangka panjang seperti keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis memiliki keunggulan dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kesenjangan ekonomi yang dapat terjadi dan risiko fluktuasi pasar. Banyak negara mencoba menemukan keseimbangan dengan menggabungkan elemen-elemen kapitalis dengan campur tangan pemerintah untuk mengatasi kelemahan yang ada.

Implementasi Sistem Ekonomi Kapitalis Secara Global

Evolusi kapitalisme global selama satu abad terakhir menjadi semakin canggih dan kompleks. Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya meluas hingga memeras pekerja dan mengambil alih usaha-usaha kecil, namun keserakahan mereka telah merambah dan menjarah banyak bidang lain, bahkan dengan dukungan kaum kapitalis, berbagai lembaga dan lembaga yang mereka dirikan. Kami. Kaum kapitalis tidak hanya menginginkan pertumbuhan, mereka juga menginginkan pertumbuhan yang

cepat. Caranya adalah dengan mendirikan lembaga perbankan. Fungsi utamanya adalah menghimpun dana masyarakat secara cepat agar dapat segera digunakan untuk menambah modal perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang pesat. Ternyata keberadaan lembaga perbankan ini dirasa masih kurang, mereka terus mengedepankan kreativitasnya. Akhirnya muncullah ide untuk menciptakan pasar tunggal yang kemudian mereka beri nama bursa efek (pasar saham).

Melalui pasar ini, investor dapat menjual surat berharganya secara publik, sehingga mendapatkan aliran uang cepat yang dapat membuat bisnisnya berkembang lebih cepat. Karena modal aslinya sama, maka tidak ada perpindahan tangan jika duplikatnya ditukar. Ini adalah bentuk modal bebas bunga karena tidak hanya menghasilkan uang tetapi keuntungan modal yang diinvestasikan dapat dibayar kembali dengan menjualnya. Sedangkan kumpulan nama ini mewakili perluasan rel-rel kereta api, pertambangan, kapal laut, dan lain-lain, yang merupakan perluasan dari sistem reproduksi yang sebenarnya (Marx, 1991: 9).

Pertumbuhan jumlah surat utang “mengambang” yang mengkhawatirkan ini dibarengi dengan peningkatan besar utang pemerintah, korporasi, dan rumah tangga yang diperoleh melalui kredit bank, yang terjadi sejak awal depresi panjang di awal tahun 1970an. Alasan rusaknya hal ini adalah sistem penilaian adalah beragamnya kemampuan manufaktur (yaitu, overproduksi aktual dan potensial dari komoditi-komoditi) yang menjangkiti banyak industri di seluruh dunia. Namun, modal baru, seiring dengan apresiasi keuntungan yang diperoleh setiap tahun, yang dengan cepat menemukan peluang investasi yang sangat baik, setidaknya dalam keuntungan rata-rata, terus tertekan dibandingkan dengan tingkatnya pada awal "gelombang panjang ekspansi" pada akhir tahun 1940 sampai 1960-an.

2. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem perekonomian di mana kepemilikan dan kendali atas sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan perusahaan, diletakkan di tangan kolektivitas atau negara.

Sosialisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, namun dengan intervensi pemerintah (Maruta, 2014: 650). Pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian untuk menguasai kehidupan perekonomian negara dan jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah untuk mengurangi atau menghilangkan konflik ekonomi dan sosial dengan mengarahkan sumber daya ekonomi untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sosialisme muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh Revolusi Industri. Revolusi industri ini membawa berkah bagi para pemilik pabrik saat itu, namun di sisi lain para pekerja malah semakin miskin. Ketika konsep sistem produksi kapitalis menyebar, reaksi berupa ide-ide sosialis pun semakin meningkat.

Meski banyak pemikir awal juga mengutarakan gagasan serupa dengan sosialisme, pemikir pertama yang bisa disebut sosialis adalah François Noël Babeuf, yang gagasannya muncul pada masa Revolusi Perancis. Dia memperjuangkan doktrin perjuangan kelas antara modal dan buruh dengan gigih, yang kemudian diperjuangkan oleh Marxisme dengan lebih keras lagi. Pemikir sosialis setelah Babeuf kemudian diidentifikasi sebagai moderat dan sering digambarkan sebagai sosialis, seperti de Saint-Simon, Charles Fourier dan Robert

Owen. Hal-hal tersebut terbatas dalam arti bahwa hal-hal tersebut tidak mengarah pada konflik kelas dan perjuangan dengan kekerasan yang mengarah pada kerja sama dan bukan persaingan. Saint-Simon berpendapat bahwa negara harus mengendalikan produksi dan distribusi, sedangkan Fourier dan Owen meyakini bahwa yang harus berperan besar adalah komunitas kolektif kecil (Maruta, 2014: 651).

Oleh karena itu, komunitas (*communistic settlement*) didirikan berdasarkan gagasan terakhir di banyak tempat di Eropa dan Amerika Serikat, seperti *New Harmony* (Indiana) dan *Brook Farm* (Massachussets). Setelah itu, muncullah pemikir-pemikir yang gagasannya lebih bersifat politis, misalnya Louis Blanc. Blanc sendiri kemudian menjadi anggota Pemerintahan provisional Perancis pada tahun 1848. Di sisi lain, ada juga tokoh anarkis seperti Pierre Joseph Proudhon dan tokoh radikal (pemberontak) Auhuste Blanqui yang juga mempunyai pengaruh besar di kalangan sosialis pada awal dan pertengahan abad ke 19.

Tahun 1840, kata komunis mulai muncul untuk menyebut ke sayap kiri sosialisme. Istilah ini sering merujuk pada tulisan Etienne Cabet dan pandangannya tentang hak-hak sosial. Karl Marx dan Friedrich Engels kemudian menggunakan istilah ini untuk menggambarkan gerakan yang mendukung perjuangan kelas dan memulai revolusi untuk menciptakan masyarakat kooperatif. Karl Marx adalah putra Hirschel dan Henrietta Marx. Ia dilahirkan di Trier, Jerman pada tahun 1818.

Kata sosialisme sering digunakan dalam konteks yang berbeda oleh kelompok yang berbeda, namun hampir semuanya sepakat bahwa kata tersebut berasal dari pemberontakan buruh industri dan buruh petani pada abad ke-19 dan ke-20, berdasarkan prinsip persatuan dan solidaritas. berjuang untuk masyarakat yang setara, dan sistem ekonomi yang mereka yakini akan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit saja. Menurut kaum Marxis, gaya dan gagasan sosialis sudah ada sejak awal sejarah manusia, sebagai sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial.

Sosialisme adalah sebuah ide. Karena mempunyai ide-ide dasar dan cara-cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Secara historis, gagasan sosialisme – termasuk komunisme – merupakan penawar hegemoni kekuasaan di Eropa pada masa Aufklarung. Dalam Manifesto Komunis, Marx membayangkan masyarakat tanpa kelas. Teori dialektika materialisme adalah metode standar yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Materialisme dialektis merupakan suatu cara pandang terhadap fenomena alam yang bersifat dialogis, yaitu suatu metode diskusi dan analisis yang mengungkapkan pertentangan gagasan dan pertentangan antar gagasan yang berbeda melalui dialog dan percakapannya. Selain itu juga karena argumentasi dan pemikirannya tentang berbagai benda alam, yaitu materi dan alam. Ide ini juga dituangkan dalam pembahasan tentang kehidupan masyarakat dan berbagai kasus yang terjadi di dalamnya.

Teori Marx merupakan inspirasi besar bagi para kritikus pada masa itu. Terakhir, Vladimir Illich Ulyanov (Lenin) mendirikan negara komunis pertama – Uni Soviet – dalam revolusi berdarah yang menggulingkan Tsar. Sebagai pemimpin ideologi komunis, Lenin meletakkan dasar bagi komunisme dengan tangan besi. Rezim komunis lainnya mengikuti semangat perlawanan terhadap Lenin. Jutaan orang telah meninggal karena kezaliman mereka. Amartya Sen dalam *The Black Book of Communism* menyebutkan jumlah korban jiwa akibat sosialisme-Komunisme sebanyak 100 juta jiwa (Chomsky, 2003). Gagasan sosialisme - penghapusan penindasan kapitalisme - telah digantikan oleh penindasan tipe komunis, dan tidak ada rasa takut. Pusat kemampuan lengkap untuk mempelajari slogan "state adalah saya". Dalam perkembangannya, berbagai pendapat muncul oleh gagasan sosialisme sosial ini (Marara, 2014: 652).

Beberapa karakteristik utama dari sistem ekonomi sosialisme adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Kolektif atau Negara: Dalam sistem ekonomi sosialisme, sektor-sektor utama ekonomi seperti industri, energi, transportasi, dan kadang-kadang bahkan sektor

pertanian, dimiliki dan dioperasikan oleh negara atau entitas kolektif seperti koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kepemilikan di tangan segelintir individu atau perusahaan.

2. Perencanaan Sentral: Dalam sistem sosialisme, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan ekonomi. Pemerintah merencanakan produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya berdasarkan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan sosial.
3. Penghapusan Kesenjangan Ekonomi: Sistem sosialisme bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada di masyarakat kapitalis. Dengan mengontrol kepemilikan sumber daya, sistem ini berupaya untuk menghindari akumulasi kekayaan yang tidak merata.
4. Redistribusi Pendapatan: Pendapatan dan keuntungan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Sistem ini sering kali menciptakan sistem pajak yang progresif untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk program-program sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.
5. Tujuan Sosial dan Keberlanjutan: Dalam sistem sosialisme, tujuan ekonomi dan sosial seringkali diutamakan daripada tujuan keuntungan individu atau perusahaan. Kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama.
6. Campur Tangan Pemerintah yang Lebih Besar: Pemerintah memiliki campur tangan yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi dalam sistem sosialisme. Ini melibatkan perencanaan, regulasi, dan pengawasan yang lebih besar daripada dalam sistem ekonomi kapitalis.

Namun, sistem ekonomi sosialisme juga memiliki kritik dan tantangan. Beberapa kritik mencakup kurangnya insentif individu untuk bekerja keras dan inovatif karena keuntungan pribadi yang lebih terbatas, serta potensi birokrasi yang berlebihan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, pengaturan dan perencanaan sentral dapat menghadapi kesulitan dalam mengantisipasi kebutuhan dan preferensi individu serta dinamika pasar yang kompleks.

Penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, ada berbagai bentuk sosialisme yang dapat berkisar dari sosialisme demokratis dengan campur tangan pemerintah yang lebih moderat hingga sosialisme otoriter dengan kendali pemerintah yang lebih kuat.

Sistem ekonomi sosialisme memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah gambaran singkat tentang keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi sosialisme:

Keunggulan Sistem Ekonomi Sosialisme:

a. Pemerataan Kesejahteraan: Sistem sosialisme bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial, dengan mengarahkan sumber daya ekonomi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

b. Akses Kepada Layanan Dasar: Sistem sosialisme cenderung memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengendalian Harga dan Inflasi: Dalam sistem sosialisme, pemerintah memiliki lebih banyak kendali atas harga barang dan jasa. Hal ini dapat membantu mencegah inflasi yang tidak terkendali dan mengamankan stabilitas ekonomi.

d. Fokus pada Kebutuhan Sosial: Sistem sosialisme sering mengutamakan kebutuhan sosial dan lingkungan daripada tujuan murni keuntungan. Ini bisa mengarah pada perhatian lebih besar terhadap isu-isu seperti perawatan lingkungan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak pekerja.

e. Pengendalian Monopoli dan Oligopoli: Dalam sistem ini, negara bisa terlibat untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen dan membatasi persaingan.

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialisme:

a. Kurangnya Insentif Individu: Dalam sistem sosialisme, kurangnya insentif individu untuk bekerja keras atau inovatif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena keuntungan pribadi lebih terbatas, beberapa orang mungkin kehilangan motivasi untuk berkontribusi secara maksimal.

b. Kendala Perencanaan Pusat: Perencanaan pemerintah dalam sistem sosialisme bisa menjadi rumit dan kurang fleksibel untuk mengantisipasi perubahan dalam permintaan dan teknologi. Hal ini bisa mengakibatkan kelangkaan atau surplus barang dan jasa.

c. Kurangnya Kebebasan Ekonomi: Sistem sosialisme mungkin membatasi kebebasan ekonomi dan kewirausahaan individu, yang dapat menghambat inovasi dan kemajuan ekonomi.

d. Potensi Birokrasi Berlebihan: Dalam upaya mencapai pemerataan, sistem sosialisme dapat menghasilkan birokrasi berlebihan yang memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat efisiensi.

e. Ketidakpastian Pengalokasian Sumber Daya: Dalam usaha merencanakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sosial, ada risiko pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan keputusan yang tidak selalu mencerminkan preferensi individu atau kebutuhan pasar.

Sistem ekonomi sosialisme memiliki keunggulan dalam pemerataan kesejahteraan dan fokus pada kebutuhan sosial, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kurangnya insentif individu dan kendala dalam perencanaan pusat. Dalam prakteknya, banyak negara mencoba mencapai keseimbangan antara tujuan sosial dan kebebasan ekonomi dengan mengadopsi elemen-elemen sosialisme dalam kerangka ekonomi yang lebih luas.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) merupakan suatu kombinasi dari elemen-elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Sejarah pertentangan yang keras dan bahkan tidak harmonis dari kapitalisme dan sosialisme telah menstimulasi pemikir-pemikir untuk mencari bangun ekonomi dengan ciri dasar, yang merupakan gabungan unsur-unsur terbaik dari keduanya.

Kedua bentuk ekstrim dari sistem ekonomi sebenarnya telah menuju ke arah sistem campuran karena masing-masing berusaha membuang kelemahan–kelemahannya sehingga tersisa unsur-unsurnya, yang dinamis dan positif.Seperti yang dikatakan oleh Hegel bahwa perbaikan dan perkembangan pemikiran akan mencapai suatu bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesa (teori dialektika) (Maruta, 2014:652). Proses sintesa meningkat, kemudian menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran, yang merupakan perpaduan dari sitem kapitalisme dan Marxisme. Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi dialektik sebagai pembenturan kelas di dalam wejarah, yang selalu saling berhadapan satu sama lain.

Motif mencari keuntungan adalah unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya

sebagaimana ditekankan di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanapa motif keuntungan tidak akan ada usaha dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban bila motif ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar, yang terkendali oleh aturan pemerintah.

Dalam sistem ekonomi campuran, terdapat interaksi antara pasar bebas dan campur tangan pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menggabungkan keuntungan dari kedua pendekatan, yaitu efisiensi pasar dan pemerataan sosial.

Karakteristik utama dari sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan Kolektif dan Swasta: Dalam sistem ini, terdapat kepemilikan swasta atas sebagian besar sumber daya ekonomi, seperti perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di pasar. Namun, sektor-sektor strategis atau yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat bisa dimiliki oleh negara atau entitas kolektif.

b. Peran Pemerintah dalam Regulasi: Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi ekonomi. Regulasi ini dapat mencakup pengaturan harga, perlindungan konsumen, regulasi lingkungan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya persaingan yang sehat, mencegah monopoli, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

c. Redistribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial: Pemerintah terlibat dalam upaya mencegah ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan. Ini bisa melalui sistem pajak yang progresif dan program-program bantuan sosial, seperti program kesejahteraan dan pendidikan yang terjangkau.

d. Pengembangan Infrastruktur dan Pendidikan: Pemerintah seringkali berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur

dan sektor pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

e. Kebebasan Ekonomi dan Inovasi: Sistem ekonomi campuran mempertahankan kebebasan individu dan perusahaan dalam berusaha mencapai tujuan ekonomi mereka. Inovasi dan kompetisi tetap diberdayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

f. Kompromi Antara Tujuan: Sistem ekonomi campuran mencoba mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan sosial. Ini bisa berarti bahwa pemerintah ikut campur dalam sektor-sektor tertentu untuk mencapai tujuan sosial tertentu, sementara sektor lain tetap mengikuti logika pasar.

Contoh nyata dari sistem ekonomi campuran adalah mayoritas negara-negara di dunia saat ini, termasuk banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara-negara Eropa. Di dalam sistem ini, proporsi campur tangan pemerintah dan pengaruh pasar bisa bervariasi berdasarkan kebijakan ekonomi dan nilai-nilai budaya dari masing-masing negara.

Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah gambaran singkat tentang keunggulan dan kelemahan sistem ekonomi campuran:

Keunggulan Sistem Ekonomi Campuran:

a. Keseimbangan Antara Kebebasan dan Pemerataan: Sistem campuran berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tujuan pemerataan sosial. Ini memungkinkan insentif bagi inovasi dan kewirausahaan sambil tetap menjaga perlindungan sosial.

b. Efisiensi dan Keadilan: Sistem ini dapat menciptakan lingkungan di mana inovasi dan efisiensi didorong oleh persaingan pasar, sementara pemerintah juga berperan dalam memastikan distribusi yang lebih adil dan perlindungan sosial.

c. Regulasi dan Perlindungan Konsumen: Pemerintah dalam sistem campuran dapat mengatur dan mengawasi pasar, mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen, serta mengontrol risiko ketidakadilan sosial.

d. Kepedulian Lingkungan: Dalam usaha memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan, sistem campuran cenderung lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

e. Fleksibilitas: Sistem campuran memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan sosial, serta memberikan ruang untuk mencoba pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah yang kompleks.

Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran:

a. Kompleksitas: Keseimbangan antara elemen kapitalis dan sosialis dapat memunculkan kompleksitas dalam perencanaan ekonomi dan pengambilan keputusan.

b. Ketidakpastian: Sistem campuran dapat mengalami ketidakpastian karena interaksi antara pasar dan campur tangan pemerintah, yang dapat menghasilkan fluktuasi yang sulit diprediksi.

c. Ketidakpuasan dari Berbagai Pihak: Kebijakan campuran mungkin tidak selalu memuaskan semua pihak, karena ada berbagai kepentingan yang harus diakomodasi.

d. Konflik dan Regulasi yang Berlebihan: Karena campuran dari dua pendekatan ekonomi yang berbeda, ada risiko munculnya konflik antara kelompok yang mendukung pasar

bebas penuh dan kelompok yang mendukung campur tangan pemerintah yang lebih besar. Regulasi yang berlebihan juga bisa menghambat pertumbuhan.

e. Tantangan dalam Perencanaan: Pemerintah dalam sistem campuran harus mengatasi tantangan dalam merencanakan ekonomi dan mengkoordinasikan tindakan yang mungkin saling bertentangan.

Sistem ekonomi campuran dirancang untuk mengambil keuntungan dari kedua sistem ekonomi utama sambil mengurangi kelemahan masing-masing. Namun, karena kompleksitasnya, implementasinya dapat menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pengaturan ekonomi.

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, dalam tataran positifnya, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan nyata sistem perekonomian Indonesia (Anggarini & Permatasari, 2020). Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang berdasarkan pada lima sila Pancasila (Permatasari, 2019).

Pancasila merupakan dasar ideologi negara dengan nilai-nilai tradisional sejak dahulu kala (Permatasari & Anggarini, 2020). Pancasila dikembangkan berdasarkan lima pilar yang dikemukakan oleh para *founding fathers* negara dengan tetap memperhatikan kepentingan negara. Ideologi memegang peranan penting dalam integrasi masyarakat khususnya di negara berkembang, sehingga bukan pendapat suatu kelompok melainkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia (Lina & Permatasari, 2020). Oleh karena itu, Pancasila memuat prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Damayanti, dkk., 2020).

Sistem ekonomi Indonesia, walaupun dengan perumusan yang agak beragam, telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD 45 sebelum diamandemen maupun di UUD 45 setelah diamandemen (Khamisah et al., 2020). Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersiratjenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Octavia et al., 2020).

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus

ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit- unit ekonomi di luar sektor negara.

3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial (Lina & Nani, 2020; Septiani, 2022:2).

Sistem perekonomian Indonesia diperkenalkan oleh berbagai ekonom Indonesia. Misalnya, seorang ekonom Indonesia mengatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah perekonomian bisnis swasta, meskipun negara harus mengaturnya (Nani dan Ali, 2020). Pakar senior lainnya mengatakan bahwa "lima ciri utama sistem ekonomi Pancassia adalah pengembangan kerja sama, penggunaan insentif dan kebajikan sosial, partisipasi dalam upaya yang setara, kebijakan ekonomi nasional dan dan keseimbangan antara perencanaan terpusat, dan pelaksanaan secara terdesentralisasi" (Safitri & Nani, 2021).

Secara umum sistem ekonomi Indonesia dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi campuran dengan ciri khas yang mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan kondisi sosial-politik negara ini. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem ekonomi Indonesia:

1. **Kepemilikan Kolektif dan Swasta**: Indonesia memiliki kombinasi kepemilikan swasta dan publik. Sebagian besar sektor ekonomi dibiarkan beroperasi secara swasta, tetapi ada juga sektor-sektor yang dianggap strategis atau penting bagi kesejahteraan masyarakat yang dimiliki atau diatur oleh pemerintah.

2. **Peran Pemerintah dalam Regulasi:** Pemerintah Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mengatur ekonomi, terutama dalam hal perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga terlibat

dalam mengatur sektor-sektor tertentu seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi.

3. **Redistribusi Pendapatan dan Bantuan Sosial:** Pemerintah Indonesia aktif dalam usaha mengurangi kesenjangan ekonomi dengan berbagai program bantuan sosial, seperti program keluarga sejahtera (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan subsidi untuk bahan-bahan pokok.
4. **Pengembangan Infrastruktur dan Pendidikan:** Pemerintah Indonesia berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Program infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. **Keberlanjutan Lingkungan:** Indonesia juga memiliki perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, terutama mengingat kekayaan alam yang dimilikinya. Regulasi lingkungan diterapkan untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang dapat berdampak negatif pada lingkungan.
6. **Industri Ekstraktif dan Pertanian:** Karena kekayaan sumber daya alamnya, sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia. Namun, negara juga berusaha untuk mengembangkan sektor manufaktur dan jasa sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi.
7. **Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah:** Pemerintah juga berupaya mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.
8. **Investasi Asing dan Perdagangan:** Indonesia mendorong investasi asing untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Dalam prakteknya, sistem ekonomi Indonesia mengalami evolusi seiring waktu dan bergantung pada kebijakan pemerintah yang berkuasa. Nilai-nilai lokal, seperti gotong royong dan kebersamaan, juga memainkan peran dalam pengaturan ekonomi. Meskipun memiliki beberapa tantangan, seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi yang masih signifikan, Indonesia terus berusaha mengembangkan ekonominya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Eksistensi Sistem Ekonomi Campuran di Indonesia: Telaah Kritis

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kekayaan produktif dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, kekayaan produktif dikuasai oleh masyarakat yang diwakili oleh pemerintah. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing (Fauzi et al., 2021). Oleh karena itu, dalam dunia realitas yang kita kenal, terdapat sistem ekonomi campuran (Suwarni & Handayani, 2021). Terakhir, jika dilihat, sistem terakhirlah yang dianggap sebagai pilihan terbaik pemerintah – meskipun kenyataannya perekonomian tidak mudah mengelola sistem campuran yang ada saat ini (Sedyastuti dkk., 2021). Karena nyatanya tidak ada negara di dunia yang hanya menjalankan sistem ekonomi kmando atau sistem ekonomi pasar murni (Febrian & Ahluwalia, 2020).

Penerapan sistem ekonomi Pancasila di dunia bisnis

Dalam dunia bisnis sendiri, penerapan dari sistem ekonomi Pancasila sangat beragam dan sangatlah luas (Larasati Ahluwalia, 2020; Septiani, 2022:3).

1. Penerapan sila ke 1: Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan

mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilaiagama atau Ketuhanan yang Maha Esa (Ahluwalia, 2020).

2. Penerapan sila ke 2: Memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab,serta risiko yang diberikan pada perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Fadly et al., 2020).
3. Penerapan sila ke 3: Memproduksi barang bisnis terbaik, yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyrakat serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indoneisa merupakan suatu bentuk dari sila ke-3 (Fadly & Wantoro, 2019). Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya.
4. Penerapan sila ke 4: Dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila ke-4 yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan (Febrian & Fadly, 2021ab).
5. Penerapan sila ke 5: Terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh raktyat Indonesia (Rosmalasari, 2017).

Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia: Telaah Kritis

Untuk memahami apakah suatu negara bertipe kapitalis atau kebalikannya, yakni sosialisme, hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengkaji sejauh mana para pihak menguasai sektor

perekonomiannya. Jika seluruh perekonomian dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung bertipe kapitalis, dan sebaliknya jika negara menguasai perekonomian, maka secara tubuh ia mempunyai semacam hubungan sosial. Dengan menggunakan kriteria di atas, kita dapat menentukan wilayah kapitalisme Indonesia.

Simbol kapitalisme yang sebenarnya Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa ketika Indonesia mulai memasuki masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai pada Maret 1966. Arah pemerintahan Orde Baru sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan Orde Baru pro-Barat dan di luar opini publik. Dengan semakin banyaknya kebijakan Indonesia di negara-negara Barat, maka modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA (dana asing) dan utang luar negeri mulai meningkat. Sekitar awal tahun 1970-an, bekerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan konsorsium *Intergovermental Group on Indonesia* (IGGI) didirikan, yang mencakup banyak negara industri termasuk Jepang, untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Pada periode inilah Indonesia dianggap mengalami pergeseran sistem ekonomi dari sosial ke kapital (Tambunan, 1998). Pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an, perekonomian Indonesia terus tumbuh. Melihat kebijakan yang diambil oleh banyak pemerintahan, kita dapat menentukan bahwa ada sistem ekonomi dominan yang dipilih atau “dipaksakan” di negara kita (Hasan Jan, 2022: 14).

Banyak persoalan ekonomi politik yang diterapkan pada kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan sektor keuangan, sektor industri, dan sektor komersial. Sektor swasta diperkirakan akan lebih berperan karena pemerintah terlihat tidak memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, atau melalui eksploitasi alam atau utang luar negeri. Pakto '88 dapat dianggap sebagai tonggak kebijakan liberalisasi

ekonomi Indonesia. Kebangkitan sektor perbankan di Indonesia, yang kemudian disusul dengan sangat cepatnya bisnis perusahaan swasta dan utang luar negeri, mewarnai kancah perekonomian Indonesia saat ini (Rachbini, 2001: 15). Era perkembangan ekonomi Orde Baru akhirnya akan segera berakhir. Akhir dari kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru adalah pecahnya krisis finansial yang diikuti kegagalan seluruh sektor perekonomian Indonesia.

Pasca krisis moneter dan memasuki masa reformasi, nampaknya kebijakan perekonomian Indonesia tidak mengalami perubahan sama sekali dari model sebelumnya, bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis yang ditentukan IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi (Hasan Jan, 2022: 14-15).

D. Hubungan antara Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

Hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dan membentuk struktur dan dinamika suatu negara. Sistem ekonomi dan sistem politik merupakan dua aspek penting dalam mengatur bagaimana suatu masyarakat beroperasi dan bagaimana keputusan-keputusan diambil. Berikut adalah beberapa cara hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik:

1. **Pengaturan Kepemilikan dan Pengendalian Sumber Daya**: Sistem ekonomi dan politik berkaitan erat dalam menentukan kepemilikan dan pengendalian sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi akan menentukan apakah sumber daya akan dimiliki secara swasta, kolektif, atau publik. Sistem politik akan membentuk hukum dan peraturan untuk mendukung atau mengatur kepemilikan tersebut.

2. **Kebijakan Pajak dan Pengeluaran:** Sistem politik berperan dalam menentukan kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Keputusan mengenai pajak dan bagaimana pendapatan tersebut digunakan akan mempengaruhi alokasi sumber daya dan distribusi kekayaan di dalam ekonomi.
3. **Regulasi dan Hukum:** Sistem politik memiliki peran dalam merumuskan regulasi dan undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi. Regulasi ini dapat berkaitan dengan hak-hak pekerja, perlindungan konsumen, lingkungan, dan sebagainya.
4. **Kebijakan Moneter dan Fiskal:** Sistem politik memiliki dampak pada kebijakan moneter (pengaturan uang dan suku bunga) dan fiskal (pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah). Kebijakan ini dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi, dan mengatasi ketidaksetaraan.
5. **Pengaruh Kelompok Kepentingan:** Sistem politik memengaruhi bagaimana kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi. Kelompok bisnis, serikat pekerja, organisasi lingkungan, dan lainnya dapat berusaha mempengaruhi pembentukan kebijakan melalui proses politik.
6. **Stabilitas Politik dan Investasi Ekonomi:** Stabilitas politik merupakan faktor penting dalam menentukan iklim investasi ekonomi. Jika suatu negara memiliki ketidakstabilan politik, hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
7. **Pengaruh Ideologi dan Nilai:** Sistem politik sering kali mencerminkan ideologi dan nilai-nilai masyarakat. Ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, demokrasi liberal, atau otoritarianisme dapat mempengaruhi arah dan tujuan ekonomi.

Dalam banyak negara, hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam pemerintahan, preferensi politik, dan perkembangan sosial dapat memengaruhi kebijakan ekonomi dan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hubungan ini penting untuk menganalisis dinamika suatu masyarakat dan perekonomian.

Selain itu, ada beberapa aspek lainnya yang terkait dengan hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik:

1. **Pengaruh Globalisasi**: Hubungan antara sistem ekonomi dan politik suatu negara juga terpengaruh oleh globalisasi. Ketika negara terbuka terhadap perdagangan dan investasi internasional, sistem ekonomi dan politiknya akan terhubung dengan pasar global dan lembaga-lembaga internasional.
2. **Keputusan Investasi Infrastruktur dan Pembangunan**: Sistem politik dapat memengaruhi keputusan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
3. **Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi**: Sistem politik memiliki peran dalam merumuskan dan mengatur hukum hak kekayaan intelektual. Ini mempengaruhi inovasi dan perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang dalam ekonomi.
4. **Pengaruh Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja:** Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dipengaruhi oleh kebijakan politik, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas dan kompetitivitas ekonomi.
5. **Krisis Ekonomi dan Respons Politik**: Respons politik terhadap krisis ekonomi, seperti resesi atau kebangkrutan bank, dapat memiliki dampak besar pada perekonomian dan kebijakan ekonomi jangka pendek.

6. **Kebijakan Internasional dan Diplomasi Ekonomi**: Hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Perjanjian perdagangan, kerja sama ekonomi, dan konflik perdagangan semuanya dapat dipengaruhi oleh faktor politik.
7. **Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja**: Sistem politik dapat mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dan kondisi kerja. Kebijakan terkait hak buruh, hak perempuan, dan penghindaran eksploitasi juga dapat berdampak pada ekonomi.
8. **Pengambilan Keputusan Strategis:** Pengambilan keputusan strategis, seperti alokasi dana untuk riset dan pengembangan, investasi dalam energi terbarukan, dan diversifikasi ekonomi, dipengaruhi oleh visi politik pemerintahan.

Semua aspek ini saling terhubung dan mempengaruhi bagaimana suatu negara mengelola perekonomiannya dan mengambil keputusan kebijakan. Hubungan yang kompleks antara sistem ekonomi dan politik membentuk landasan dasar bagi dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

E. Peran Pemerintah dalam Mengatur dan Mengendalikan Ekonomi

Peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi sangat penting dalam memastikan stabilitas, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi, termasuk:

1. **Regulasi dan Hukum:** Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan dan menerapkan regulasi dan undang-undang yang mengatur aktivitas ekonomi. Regulasi ini mencakup

berbagai aspek, seperti perlindungan konsumen, hak pekerja, lingkungan, dan kompetisi.

2. **Pajak dan Pengeluaran Pemerintah:** Pemerintah memungut pajak dari warga negara dan perusahaan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
3. **Kebijakan Moneter:** Pemerintah, melalui bank sentral, memiliki kendali atas kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga, pengeluaran uang, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan moneter digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengelola pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai mata uang.
4. **Kebijakan Fiskal:** Pemerintah memiliki peran dalam mengatur kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketidaksetaraan, dan menjaga keseimbangan anggaran.
5. **Kebijakan Perdagangan dan Investasi:** Pemerintah mengatur kebijakan perdagangan internasional dan investasi asing. Ini melibatkan penetapan tarif, kuota impor, dan perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral.
6. **Pengembangan Infrastruktur:** Pemerintah berperan dalam investasi dan pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
7. **Perlindungan Lingkungan:** Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang dapat berdampak pada lingkungan. Ini mencakup regulasi limbah, emisi, dan praktik ekonomi yang berkelanjutan.

8. **Penanggulangan Krisis Ekonomi:** Pemerintah berperan dalam mengatasi krisis ekonomi, seperti resesi atau kebangkrutan sistem keuangan. Ini melibatkan kebijakan pemulihan ekonomi, dukungan keuangan bagi sektor yang terdampak, dan reformasi struktural.
9. **Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen**: Pemerintah melindungi konsumen dengan memastikan produk aman, menghindari praktik bisnis yang merugikan, dan memberikan informasi yang diperlukan.
10. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**: Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas.

Selain beberapa peran pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peran pemerintah lainnya dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi:

1. **Kebijakan Industri:** Pemerintah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor industri tertentu. Ini bisa termasuk memberikan insentif kepada industri strategis atau inovatif untuk mendorong pertumbuhan dan kompetitivitas.
2. **Pengendalian Harga:** Dalam beberapa situasi, pemerintah dapat mengendalikan harga barang atau jasa yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti harga bahan makanan atau energi.
3. **Pengembangan Teknologi:** Pemerintah dapat berperan dalam merangsang penelitian dan pengembangan teknologi dengan memberikan dana penelitian, insentif fiskal, dan dukungan lainnya.
4. **Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Pemerintah dapat mendukung perkembangan usaha kecil

dan menengah (UKM) melalui penyediaan akses ke kredit, pelatihan, dan bantuan teknis.

5. **Pengendalian Monopoli dan Oligopoli:** Pemerintah dapat memastikan persaingan yang sehat di pasar dengan mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen.
6. **Kebijakan Perumahan**: Pemerintah dapat berperan dalam mengatur sektor perumahan, termasuk memberikan subsidi perumahan atau mengatasi masalah kekurangan perumahan.
7. **Kebijakan Imigrasi dan Tenaga Kerja Asing:** Pemerintah memiliki kebijakan terkait imigrasi dan tenaga kerja asing yang dapat mempengaruhi pasokan tenaga kerja dan dampak pada ekonomi.
8. **Kebijakan Keuangan Publik:** Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi keuangan publik, termasuk pengelolaan defisit anggaran, utang negara, dan pengeluaran pemerintah.
9. **Kebijakan Penelitian Ilmiah:** Pemerintah dapat memfasilitasi penelitian ilmiah melalui dana penelitian dan program-program yang mendukung penelitian di berbagai bidang.
10. **Pengendalian Pasar Modal:** Pemerintah dapat mengatur pasar modal untuk melindungi investor dan mencegah praktik yang merugikan pasar.

Semua peran ini menunjukkan fleksibilitas dan tanggung jawab yang luas dari pemerintah dalam membentuk kebijakan ekonomi dan mengelola berbagai aspek ekonomi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. ***

BAB 3

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Perekonomian suatu negara menjadi fondasi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Di tengah dinamika global dan perubahan yang terjadi, pemahaman yang mendalam tentang struktur ekonomi sebuah negara menjadi kunci untuk merangkul peluang dan menghadapi tantangan yang ada. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memiliki struktur ekonomi yang kompleks dan beragam.

Pada bab ini akan membahas secara mendalam tentang struktur ekonomi Indonesia. Dari sektor pertanian yang berakar pada kekayaan alamnya, hingga sektor industri yang tengah mengalami transformasi menuju keunggulan teknologi, serta sektor jasa yang semakin menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini juga akan diulas bagaimana sektor-sektor ini saling berinteraksi, menggambarkan perubahan seiring waktu, dan bagaimana setiap sektor berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja.

A. Pengertian Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana didalamnya terdiri dari : sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Elemen-elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian (Kosuma, dkk., 2016:508).

Struktur ekonomi merujuk pada organisasi, hubungan, dan pola kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau negara. Ini mencakup bagaimana berbagai sektor ekonomi saling terkait dan bagaimana sumber daya dan produksi dialokasikan di dalamnya. Struktur ekonomi mempengaruhi bagaimana pendapatan dan kekayaan dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam masyarakat.

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki angkatan kerja yang sangat besar. Secara umum pasar kerja Indonesia dicirikan oleh kelebihan penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi,pengangguran yang *masive* dan kualitas tenaga kerja yang rendah (Rivani, 2014:30).

Struktur ekonomi melibatkan beberapa elemen utama:

1. Sektor Ekonomi: Struktur ekonomi mengacu pada komposisi relatif dari sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Di banyak negara, transformasi struktural terjadi seiring waktu, dengan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian ke sektor jasa sejalan dengan perkembangan ekonomi.

2. Produksi dan Pemakaian Sumber Daya: Struktur ekonomi mencerminkan bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dialokasikan di berbagai sektor. Misalnya, dalam ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, banyak sumber daya akan diarahkan ke pertanian dan sektor terkaitnya.

3. Diversifikasi: Diversifikasi mengacu pada keragaman kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu wilayah. Struktur ekonomi yang lebih beragam dapat memberikan ketahanan lebih besar terhadap fluktuasi dalam permintaan pasar tertentu. Diversifikasi juga dapat membantu negara atau wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang mungkin rentan terhadap perubahan ekonomi global.

4. Ketidakseimbangan Regional: Struktur ekonomi juga dapat mencerminkan ketidakseimbangan regional dalam pengembangan ekonomi. Beberapa daerah mungkin lebih maju secara ekonomi daripada yang lain karena sejumlah faktor seperti akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

5. Tenaga Kerja dan Keterampilan: Struktur ekonomi mempengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia dan jenis keterampilan yang diperlukan oleh populasi. Pergeseran struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa juga seringkali diikuti oleh perubahan dalam tuntutan tenaga kerja.

6. Ketimpangan Sosial dan Distribusi Pendapatan: Struktur ekonomi juga dapat berdampak pada ketimpangan sosial dan distribusi pendapatan. Ketika beberapa sektor lebih produktif daripada yang lain, hal ini bisa mempengaruhi cara pendapatan didistribusikan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Penting untuk memahami struktur ekonomi suatu wilayah atau negara karena hal ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi, peluang investasi, serta potensi risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi.

B. Sektor Ekonomi: Pertanian, Industri, Jasa

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia (Isbah, 2019:45).

Struktur ekonomi Indonesia pada sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini. Meskipun telah mengalami pergeseran ke sektor industri dan jasa, sektor pertanian masih merupakan bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai struktur ekonomi sektor pertanian di Indonesia:

a. Kontribusi terhadap PDB: Sektor pertanian di Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini, meskipun kontribusinya telah menurun seiring dengan perkembangan sektor lain. Meskipun begitu, sektor

ini masih menjadi sumber pendapatan dan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

b. Pekerjaan dan Tenaga Kerja: Sektor pertanian adalah salah satu penyedia pekerjaan terbesar di Indonesia. Banyak penduduk di pedesaan masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Namun, sektor ini sering dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya teknologi modern, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan pertanian, serta permasalahan pemilikan tanah.

   Hal lain yang perlu dicatat bahwa pertanian tidak mudah dijangkau oleh kebijakan ketenagakerjaan secara langsung, tetapi perlu ditempuh melalui upaya tidak langsung yaitu melalui pengaturan tata niaga produk pertanian dan harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan sebagainya, serta penyesuaian harga jual pertanian yang layak bagi petani jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak sangat luas dan serius terhadap kesejahteraan petani miskin dan petani serta pedagang berskala kecil, serta akan memberikan dampak yang tidak baik pula bagi memburuknya peluang kerja pada musim panen ataupun musim tanam bagi buruh tani (Rivani, 2014:32).

c. Subsektor Pertanian: Sektor pertanian Indonesia meliputi berbagai subsektor, termasuk tanaman pangan (seperti padi, jagung, dan ubi-ubian), hortikultura (seperti sayuran dan buah-buahan), perkebunan (seperti kelapa sawit, karet, dan kopi), peternakan (seperti ayam, sapi, dan kambing), dan perikanan.

d. Permasalahan dan Tantangan: Sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Ini termasuk rendahnya produktivitas, rendahnya akses terhadap teknologi modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertanian.

e. Modernisasi Pertanian: Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memodernisasi sektor pertanian melalui program-program seperti penyediaan pupuk subsidi, pengembangan teknologi pertanian, dan pelatihan petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada impor produk pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

f. Ekspor Pertanian: Beberapa produk pertanian Indonesia diekspor ke pasar internasional, seperti kopi, minyak kelapa sawit, dan produk perikanan. Ekspor produk pertanian dapat berkontribusi pada pendapatan negara dan meningkatkan perdagangan luar negeri.

g. Ketenagakerjaan dan Pendidikan: Meskipun sektor pertanian masih merupakan sumber pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan, ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan petani agar mereka dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih modern dan produktif.

Penting untuk diingat bahwa struktur ekonomi sektor pertanian Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pergeseran ini akan mempengaruhi cara sektor pertanian berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

2. Sektor Industri

Struktur ekonomi Indonesia pada sektor industri mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan industri di negara ini. Meskipun sektor pertanian dan jasa juga memiliki peran penting, sektor industri memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan nilai tambah dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai struktur ekonomi sektor industri di Indonesia:

a. Kontribusi terhadap PDB: Sektor industri merupakan salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Industri-manufaktur, pengolahan, dan sektor-sektor terkait lainnya memainkan peran penting dalam menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan dalam ekonomi domestik dan juga untuk ekspor.

b. Diversifikasi Industri: Indonesia memiliki beragam subsektor industri, termasuk industri makanan dan minuman, tekstil, elektronik, otomotif, kimia, dan lain-lain. Pemerintah berusaha untuk mendorong diversifikasi industri guna mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.

c. Peningkatan Nilai Tambah: Struktur ekonomi industri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi dalam rantai pasok.

d. Infrastruktur dan Investasi: Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi dan energi yang stabil, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk industri.

e. Tenaga Kerja dan Keterampilan: Tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang sesuai sangat penting dalam perkembangan sektor industri. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

f. Industri Berbasis Teknologi: Pemerintah juga berupaya untuk mendorong perkembangan industri berbasis teknologi, seperti industri teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dan industri kreatif. Ini melibatkan pengembangan teknologi tinggi dan inovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih canggih.

g. Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan pemerintah dan regulasi memiliki dampak signifikan pada perkembangan sektor industri. Kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

h. Ekspor Industri: Beberapa produk industri Indonesia diekspor ke berbagai pasar internasional. Dalam hal ini, industri berperan dalam mendiversifikasi ekspor nasional dan meningkatkan pendapatan negara.

Penting untuk diingat bahwa struktur ekonomi sektor industri Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi, pasar global, dan kebijakan pemerintah. Peningkatan dalam produktivitas industri dan diversifikasi sektor ini dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

3. Sektor Jasa

Sektor jasa merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sektor jasa mencakup berbagai aktivitas yang tidak melibatkan produksi barang fisik, tetapi lebih berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai struktur ekonomi sektor jasa di Indonesia:

a. Kontribusi terhadap PDB: Sektor jasa telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Layanan seperti keuangan, perdagangan, pariwisata, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan

lainnya telah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ini.

b. Peningkatan Permintaan: Pertumbuhan penduduk, perkembangan urbanisasi, dan meningkatnya pendapatan per kapita telah mendorong peningkatan permintaan terhadap berbagai layanan, seperti perbankan, asuransi, perbelanjaan, rekreasi, dan lainnya.

c. Pariwisata: Sektor pariwisata adalah salah satu aspek penting dari sektor jasa di Indonesia. Negara ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang besar, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan pulau-pulau lainnya memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

d. Keuangan dan Jasa Keuangan: Sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal, memiliki peran krusial dalam penghimpunan dana, pendanaan proyek-proyek, manajemen risiko, dan investasi. Kemajuan dalam teknologi juga telah menghasilkan perkembangan fintech (teknologi keuangan) yang berkontribusi pada inklusi keuangan dan efisiensi layanan keuangan.

e. Pendidikan dan Kesehatan: Sektor jasa juga melibatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan adalah hal penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tenaga kerja yang produktif.

f. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam sektor jasa. Layanan online, e-commerce, aplikasi mobile, dan berbagai bentuk komunikasi digital semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari.

g. Tenaga Kerja Berbasis Layanan: Sektor jasa juga menciptakan lapangan kerja untuk berbagai jenis tenaga kerja, termasuk pekerjaan profesional, administratif, dan layanan pelanggan.

h. Peningkatan Kualitas Layanan: Dalam usaha bersaing secara global, peningkatan kualitas layanan menjadi penting. Layanan yang berkualitas dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan membantu mendukung pertumbuhan bisnis.

i. Regulasi dan Keberlanjutan: Dalam sektor jasa, regulasi dan standar layanan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen. Keberlanjutan juga semakin penting, dengan perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial dari layanan yang disediakan.

Sektor jasa terus berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, dan inovasi dalam layanan yang ditawarkan. Pengembangan sektor ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

C. Kontribusi Sektor-Sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Lapangan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 71,0 juta atau US$ 4.783,9.

Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Erlina F Santika (2023) menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun 5 lapangan usaha Indonesia yang memiliki nilai kontribusi terbesar terhadap ekonomi Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

1. Industri pengolahan. Lapagan usaha ini memiliki kontribusi yang nilainya mencapai Rp. 3.591,8 triliun atau setara 18,34% dari total PDB 2022. Angka itu melejit dari capaian 2018 yang mampu menyumbang Rp. 2.947.5 triliun.
2. Perdagangan dan reparasi mobil-motor, sebesar Rp. 2.516,6 triliun pada 2022 atau 12,85%. Angka tersebut juga naik dari capaian 2018 sebesar Rp. 1.931,8 triliun.
3. Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang Rp. 2.428,9 triliun atau 12,4% dari PDB.
4. Pertambangan dan penggalian dengan nilai Rp. 2.393,4 triliun atau 12,22%.
5. Konstruksi dengan nilai Rp. 1.912,9 triliun atau 9,77%.

BPS menyebut, total kontribusi kelima lapangan usaha itu terhadap perekonomian Indonesia sebesar 65,58% pada 2022. Transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum secara konsisten menjadi lapangan usaha degan laju pertumbuhan paling cepat di Indonesia.

1. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Produk Dosmenstik Bruto (PDB)

Sektor-sektor ekonomi berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara melalui berbagai cara, dengan masing-masing sektor memiliki peran khusus dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah penjelasan

tentang bagaimana sektor-sektor ekonomi berkontribusi terhadap PDB:

a. Sektor Pertanian: Sektor pertanian berkontribusi pada PDB melalui produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Produk-produk ini dapat dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi produk-produk lain. Kontribusi sektor pertanian terlihat dalam nilai tambah dari produksi hasil pertanian, termasuk nilai dari bahan pangan yang dihasilkan seperti padi, sayuran, daging, dan produk perikanan.

b. Sektor Industri: Sektor industri, terutama industri-manufaktur dan pengolahan, berkontribusi pada PDB dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nilai tambah yang diciptakan dalam proses produksi dan manufaktur menjadi bagian dari PDB. Contoh kontribusi sektor industri termasuk produksi mobil, tekstil, barang elektronik, dan sejenisnya.

c. Sektor Jasa: Sektor jasa melibatkan penyediaan layanan kepada masyarakat dan bisnis. Ini bisa berupa layanan keuangan, transportasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Kontribusi sektor jasa terlihat dalam biaya layanan yang dibayarkan oleh konsumen atau perusahaan yang menerima layanan tersebut.

d. Sektor Keuangan: Sektor keuangan termasuk dalam sektor jasa, tetapi layanannya sangat penting sehingga layak diberikan perhatian khusus. Ini termasuk perbankan, asuransi, investasi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kontribusi sektor keuangan tercermin dalam biaya bunga, biaya layanan, dan biaya transaksi yang terkait dengan aktivitas keuangan.

e. Sektor Konstruksi: Sektor konstruksi berkontribusi pada PDB melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik seperti gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya.

Kontribusi ini tercermin dalam nilai tambah dari proyek-proyek konstruksi yang selesai.

f. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam: Sektor ini mencakup produksi dan distribusi energi, seperti listrik, minyak, dan gas. Kontribusi juga berasal dari eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan dan pengolahan hasil pertambangan.

g. Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Sektor ini melibatkan layanan TIK, seperti teknologi komputer, perangkat lunak, internet, dan komunikasi digital. Kontribusi datang dari nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan teknologi dan layanan TIK.

Penting untuk diingat bahwa kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB dapat bervariasi antara negara dan seiring waktu. Transformasi ekonomi sering melibatkan pergeseran kontribusi sektor-sektor ini, misalnya dari pertanian ke industri dan kemudian ke sektor jasa seiring dengan perkembangan ekonomi suatu negara.

2. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Lapnagan Kerja

Sektor-sektor ekonomi memiliki peran yang berbeda dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana sektor-sektor ekonomi berkontribusi terhadap lapangan kerja:

a. Sektor Pertanian: Sektor pertanian dapat menjadi penyedia utama lapangan kerja, terutama di negara-negara yang masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertanian menciptakan lapangan kerja untuk petani, buruh tani, dan pekerja di sektor terkait seperti perkebunan dan perikanan.

Meskipun sektor pertanian menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar, namun jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Setidaknya ada tiga hal kemungkinan penyebab berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, yaitu: (1) lahan pertanian yang sempit, sehingga tidak mampu dijadikan mata pencaharian utama untuk anggota keluarga sehingga terpaksa menganggur atau mencari pekerjaan di luar usaha tani, (2) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan (3) keengganan untuk terjun pada sektor pertanian khususnya untuk golongan muda terdidik karena dipandang tidak menarik sehingga lebih memilih pekerjaan lain atau menganggur. Secara makro, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian masih cukup tinggi, sementara sumbangan sektor pertanian terhadap PDB semakin menurun, sehingga mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian (Rivani, 2014:38)

b. Sektor Industri: Sektor industri juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan, terutama di sektor-manufaktur dan pengolahan. Pabrik-pabrik dan fasilitas produksi memerlukan pekerja dalam berbagai bidang, termasuk produksi, manajemen operasional, perawatan mesin, dan logistik.

c. Sektor Jasa: Sektor jasa adalah penyumbang utama lapangan kerja dalam banyak perekonomian modern. Layanan seperti keuangan, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi informasi, dan lainnya, menciptakan peluang kerja bagi berbagai jenis keterampilan dan latar belakang.

d. Sektor Keuangan: Sektor keuangan menciptakan lapangan kerja dalam layanan perbankan, asuransi, manajemen investasi, dan sejenisnya. Pekerjaan di sektor ini meliputi posisi seperti bankir, pialang saham, analis keuangan, dan pegawai administrasi keuangan.

e. Sektor Konstruksi: Sektor konstruksi memberikan lapangan kerja untuk para pekerja konstruksi, arsitek, insinyur, dan lainnya yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur dan properti.

f. Sektor Energi dan Sumber Daya Alam: Sektor ini menyediakan lapangan kerja dalam eksplorasi, produksi, dan distribusi energi serta pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian minyak.

g. Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Sektor TIK menciptakan lapangan kerja untuk pengembang perangkat lunak, ahli keamanan siber, desainer web, spesialis dukungan teknis, dan pekerja lain yang terlibat dalam industri teknologi.

Tergantung pada fase perkembangan ekonomi, sektor yang mendominasi dalam menciptakan lapangan kerja dapat berubah. Misalnya, dalam fase awal pembangunan ekonomi, sektor pertanian dan industri mungkin menjadi penyedia utama lapangan kerja. Namun, dengan waktu, pertumbuhan sektor jasa dan teknologi bisa menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Transformasi ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam kebutuhan konsumen.

Mata pencaharian paling afdhal adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan

(HR. Al-Bazzar dan Ahmad)

BAB 4

PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi telah lama menjadi sorotan utama dalam dunia global yang terus berkembang. Fenomena ini memainkan peran sentral dalam menentukan arah perkembangan suatu negara, masyarakat, dan individu. Dalam era di mana interkoneksi antarbangsa semakin kuat, pemahaman yang mendalam tentang dinamika pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat dicapai menjadi semakin penting.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikkan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikkan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Kosuma, 2016:508).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kuantitatif dari output dan pendapatan suatu negara atau wilayah

dalam periode tertentu. Sementara itu, pembangunan ekonomi melampaui aspek semata-mata kuantitatif dan mencakup perbaikan kualitas hidup, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, diharapkan kita dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan strategi-strategi yang lebih holistik dalam upaya mencapai kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

A. Pengertian Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000:12).

Secara umum pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan menaikkan mutu hidup yang dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut. Ketimpangan yang terjadi dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Rivani, 2014:30)

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait tetapi memiliki makna yang berbeda dalam konteks studi ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Salvatore (2006) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana PDB riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita. Sasaran berapa kenaikan produksi riil per kapita dan taraf hidup (pendapatan riil per kapita) merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan pengarahan sumber-sumber produksi.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kuantitatif dari output atau pendapatan suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. Ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan ekspansi ekonomi dalam hal produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan kemakmuran secara umum. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dalam persentase, yang menunjukkan sejauh mana ekonomi telah berkembang selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab sehat tidaknya perekonomian suatu negara dan pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Apabila suatu negara tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang baru seperti tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi (Salim, dkk., 2021:18).

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada

kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis (Ma'ruf, 2008:46).

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi Harrord-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan modern. Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang ini investasi menambah stok kapital (K). Harrod-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output*. *Output* yang dimaksud adalah *output* potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital yang ada. Sedangkan *output* yang terealisir belum tentu sama dengan *output* potensial, hal ini tergantung pada jumlah permintaan agregat (Ma'ruf, 2008:46-47).

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi melampaui aspek kuantitatif dari pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup perluasan ekonomi, sosial, dan manusia yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pendapatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesetaraan sosial. Selain itu, pembangunan ekonomi juga memperhatikan aspek lingkungan, dengan memastikan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak merusak sumber daya alam atau mengancam keberlanjutan lingkungan.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk aspek sosial, manusia, dan lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi bisa menjadi indikator positif, tanpa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan dan output mungkin tidak berdampak positif secara merata pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Proses Pembangunan ekonomi pada dasarnya mempunyai empat dimensi pokokyaitu: (a) pertumbuhan, (b) penanggulangan kemiskinan, (c) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (d) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Alfarabi, 2014:171).

B. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi: PDB, PDRB

1. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB menggambarkan nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam batas wilayahnya sendiri selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Pengukuran PDB dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung pada sumber data dan pendekatan yang digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode pengeluaran.

a. Metode Pengeluaran dalam Mengukur PDB: Metode ini mengukur PDB berdasarkan total pengeluaran yang terjadi dalam ekonomi. PDB dihitung dengan menjumlahkan empat komponen utama pengeluaran: konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan net ekspor (X - M).

b. Konsumsi Rumah Tangga (C): Ini mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa konsumsi seperti makanan, pakaian, perumahan, dan rekreasi.

c. Investasi (I): Investasi mencakup pengeluaran oleh perusahaan dan individu untuk membeli modal fisik seperti pabrik, peralatan, dan properti. Ini juga mencakup penambahan persediaan perusahaan.

d. Belanja Pemerintah (G): Ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai layanan dan proyek, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan.

e. Net Ekspor (X - M): Ini adalah selisih antara nilai ekspor (X) dan impor (M). Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka net ekspor bernilai positif, yang berkontribusi positif terhadap PDB.

f. Formula PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah: (PDB=C+I+G+(X−M)

   Setelah data dari masing-masing komponen pengeluaran dikumpulkan dan dijumlahkan, maka PDB dapat dihitung dan digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB juga dapat dihitung dalam harga berlaku (nilai sekarang) atau harga tetap (nilai riil) untuk mengabaikan dampak inflasi.

Meskipun metode pengeluaran adalah yang paling umum digunakan, terdapat juga metode pendapatan dan metode produksi dalam mengukur PDB. Ketiga metode tersebut pada

dasarnya harus memberikan hasil yang sama jika dihitung dengan benar, karena mencerminkan pendekatan yang berbeda untuk mengukur total output dan pendapatan dalam ekonomi.

2. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan konsep yang serupa dengan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi fokusnya ditujukan pada tingkat regional atau daerah dalam suatu negara. PDRB mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah tertentu, seperti provinsi, kota, atau kabupaten, dengan cara yang serupa dengan pengukuran PDB untuk seluruh negara.

Menurut Todaro (2000), tujuan dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Sehingga salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Tikson, 2005). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat di daerah tersebut (Simanjuntak, 2001). Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Proses pengukuran pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto melibatkan langkah-langkah yang mirip dengan metode pengukuran PDB secara nasional. Beberapa tahapan penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi PDRB meliputi:

a. Pengumpulan Data: Data ekonomi yang relevan harus dikumpulkan untuk wilayah yang sedang diukur. Data ini mencakup informasi tentang produksi barang dan jasa, pengeluaran konsumen, investasi, belanja pemerintah, dan

perdagangan internasional, serta data-data pendukung lainnya.

b. Penghitungan Nilai-Added: Seperti dalam metode pengukuran PDB, nilai tambah dari setiap sektor ekonomi harus dihitung. Nilai tambah adalah selisih antara produksi bruto dan nilai input dari sektor tersebut.

c. Perhitungan PDRB: Setelah nilai tambah dari semua sektor dihitung, nilai-nilai ini akan dijumlahkan untuk mendapatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari wilayah atau daerah tersebut.

d. Penghitungan Pertumbuhan: Pertumbuhan PDRB dihitung dengan membandingkan PDRB pada periode yang berbeda. Pertumbuhan diukur dalam persentase, yang menggambarkan sejauh mana PDRB wilayah tersebut telah berkembang selama periode tersebut.

e. Pengukuran Berdasarkan Faktor-Faktor Ekonomi: Selain mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, seperti industri yang berkembang, investasi, ketenagakerjaan, dan sektor unggulan.

PDRB memiliki manfaat yang penting dalam merencanakan pembangunan ekonomi regional. Dengan memahami tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah. Selain itu, pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi regional juga membantu mengidentifikasi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang menyebabkan kemajuan yang tidak merata antardaerah (Sultan & Jamzani, 2010). Di Indonesia, dimana wilayahnya terdiri atas kepulauan, menyebabkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah pusat pemerintahan. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah, perbedaan sumber daya alam (SDA) antar wilayah, perbedaan kondisi geografis, dan kurang lancarnya perdanganan antar provinsi (Christianingrum, 2021:106)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor (Haryono, 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68%, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54%, seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% akibat investasi bangunan yang masih terbatas (Haryono, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) (Haryono, 2023).

Menurut Indonesia Investment (2023) pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang kuat dijelaskan oleh hal-hal berikut:

a. Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah
b. Populasi generasi muda, berjumlah banyak dan sedang berkembang
c. Stabilitas politik (yang relatif)
d. Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an
e. Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India
f. Upah tenaga kerja yang rendah
g. Indonesia adalah pasar berkembang, berarti ada banyak yang perlu dibangun/dikembangkan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang kompleks. Beberapa faktor

utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah:

1. **Investasi:** Tingkat investasi dalam infrastruktur, industri, dan sektor-sektor produktif lainnya memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi yang besar dapat mendorong ekspansi produksi dan peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan.

   Dalam teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 2010), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yangakan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.
   Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kurangnya investasi di suatu wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegitanan ekonomi yang produktif. Dan terpusatnya invetasi di suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan distribusi investasi. Hal ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan (Christianingrum, 2021:106).

2. **Ketahanan Politik dan Keamanan:** Stabilitas politik dan keamanan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian politik atau konflik dapat mengganggu iklim investasi dan berpotensi merusak kepercayaan investor.

3. **Kebijakan Moneter dan Fiskal:** Kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, yang pada gilirannya memengaruhi investasi dan pengeluaran konsumen. Kebijakan fiskal, seperti anggaran

pemerintah dan pajak, juga memainkan peran penting dalam mengarahkan arah pertumbuhan ekonomi.

4. **Kestabilan Mata Uang**: Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor, serta inflasi. Kestabilan mata uang penting bagi perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
5. **Perekonomian Global**: Hubungan ekonomi Indonesia dengan perekonomian global juga memiliki pengaruh signifikan. Permintaan global terhadap ekspor Indonesia, fluktuasi harga komoditas internasional, dan perubahan dalam perdagangan internasional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
6. **Infrastruktur:** Kualitas infrastruktur, seperti jaringan transportasi, energi, dan teknologi informasi, dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing sektor ekonomi.
7. **Tenaga Kerja**: Kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi.

   Menurut Adam Smith labour memegang peran penting dalam perekonomian. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkanpendidikan, karena pendidikan dianggap mampu menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang moderen. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan (Putri, 2019:490)

Menurut Bank Dunia, terdapat empat penyebab utama ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Penyebabnya ialah adanya ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi goncangan (Kemenkeu, 2021).

8. **Inovasi dan Teknologi**: Kemajuan teknologi dan inovasi dapat mendorong efisiensi, produktivitas, dan perkembangan sektor ekonomi yang lebih maju.

   Menurut Todaro dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama, yaitu: (a) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; (b) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (c) kemajuan teknologi (Ma'ruf, 2008:46).

9. **Regulasi Bisnis**: Lingkungan bisnis yang kondusif dan regulasi yang jelas dapat mempengaruhi investasi dan perkembangan sektor swasta.
10. **Ketidakpastian Eksternal**: Peristiwa global seperti krisis keuangan atau pandemi dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, baik melalui perubahan permintaan global maupun dampak langsung terhadap sektor ekonomi dalam negeri.
11. **Sumber Daya Alam**: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Kinerja sektor pertambangan dan perkebunan, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit, dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks, dan keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan koordinasi dan perhatian terhadap

banyak aspek yang berbeda. Pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya berperan dalam membentuk kebijakan dan tindakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia.

Selain faktor di atas, ada banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **Ketidaksetaraan Pendapatan dan Kemiskinan**: Tingkat ketidaksetaraan pendapatan dan tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada segmen kecil masyarakat, maka permintaan konsumen dan akses ke pasar bisa terbatas.
2. **Kualitas Layanan Publik**: Kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Investasi dalam layanan publik yang baik dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
3. **Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah**: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah dapat membantu mengurangi tekanan urbanisasi dan menciptakan distribusi pertumbuhan yang lebih merata.

   Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengenai dampak balik pada suatu daerah.

4. **Kualitas Lingkungan dan Keberlanjutan**: Pertumbuhan ekonomi harus diiringi oleh perhatian terhadap lingkungan dan aspek-aspek keberlanjutan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. **Perdagangan dan Liberalisasi Ekonomi**: Keterlibatan dalam perdagangan internasional dan pembukaan ekonomi terhadap pasar global dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi ekspor dan impor.
6. **Stabilitas Keuangan**: Stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal, penting untuk memastikan sumber pembiayaan yang sehat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
7. **Institusi dan Tata Kelola**: Efisiensi dan transparansi institusi pemerintah, penegakan hukum yang baik, serta tata kelola yang kuat dalam sektor publik dan swasta dapat menciptakan iklim bisnis yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
8. **Faktor Demografi**: Pertumbuhan penduduk, struktur demografi, dan kebijakan terkait populasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui dampaknya pada tenaga kerja, konsumsi, dan investasi.
9. **Perubahan Teknologi**: Perkembangan teknologi baru dan adopsi inovasi dapat merubah lanskap ekonomi dengan membuka peluang baru untuk sektor-sektor baru yang berkembang.

Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi,

kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Ma'ruf, 2008:46).

Penting untuk diingat bahwa ekonomi adalah sistem yang kompleks, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat saling berinteraksi dan berdampak melalui banyak jalur yang berbeda. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan mengelola pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan berbagai faktor yang berperan dalam dinamika ekonomi Indonesia.

D. Isu-Isu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - ekonomi terbesar di Asia Tenggara - memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian

Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan aspek-aspek kehidupan manusia. Isu-isu pembangunan ekonomi berkelanjutan mencakup berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan manfaat jangka panjang yang lebih luas. Beberapa isu utama pembangunan ekonomi berkelanjutan meliputi:

1. **Perlindungan Lingkungan**: Pertumbuhan ekonomi tradisional sering kali berdampak negatif pada lingkungan, seperti polusi udara dan air, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Isu-isu lingkungan yang penting termasuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan berupaya meminimalkan dampak negatif ini dan memastikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana.
2. **Ketidaksetaraan Sosial**: Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Isu ini mencakup kesenjangan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang tidak merata antara kelompok masyarakat.
3. **Kemiskinan:** Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan yang signifikan. Beberapa kelompok masyarakat mungkin tetap terpinggirkan dan tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
4. **Kehidupan Berkelanjutan di Perkotaan**: Urbanisasi yang cepat dapat menghasilkan tekanan besar pada infrastruktur perkotaan, termasuk perumahan, transportasi, dan layanan publik. Pembangunan ekonomi berkelanjutan harus mencakup perencanaan perkotaan yang baik untuk mengatasi tantangan ini.
5. **Kesejahteraan Tenaga Kerja**: Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan hak tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial dan eksploitasi.
6. **Ketergantungan pada Sumber Daya Fosil**: Beralih dari energi fosil ke sumber energi terbarukan adalah aspek penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ketergantungan yang berlebihan pada bahan bakar fosil dapat memiliki dampak serius terhadap perubahan iklim dan stabilitas energi.

7. **Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**: Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi oleh akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.
8. **Ketenagakerjaan dan Pendidikan**: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
9. **Pemberdayaan Perempuan**: Memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.
10. **Inovasi dan Teknologi**: Pembangunan ekonomi berkelanjutan memerlukan inovasi teknologi yang berkelanjutan, termasuk teknologi ramah lingkungan dan solusi untuk tantangan sosial.
11. **Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**: Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk transportasi yang efisien, energi terbarukan, dan teknologi informasi yang canggih.
12. **Partisipasi Masyarakat**: Pembangunan ekonomi berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan dan kualitas hidup mereka.

Isu-isu ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi isu-isu ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil,

dan lembaga internasional untuk menciptakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Masih ada isu-isu lainnya yang juga penting dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut beberapa isu tambahan yang perlu dipertimbangkan:

1. **Kebijakan Perdagangan dan Globalisasi**: Kebijakan perdagangan yang tidak seimbang dan tidak adil dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal dan lingkungan global. Pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu mempertimbangkan dampak globalisasi dan mengupayakan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
2. **Keamanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan**: Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan adalah isu yang semakin penting dalam konteks pertumbuhan populasi dan perubahan iklim.
3. **Tata Kelola Sumber Daya Alam**: Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam seperti hutan, perairan, dan lahan pertanian sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
4. **Dampak Teknologi Digital**: Pertumbuhan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 mempengaruhi cara bisnis dan masyarakat berinteraksi. Sementara ini membawa peluang, juga ada kekhawatiran tentang dampaknya pada tenaga kerja tradisional dan privasi data.
5. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dapat membantu memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diakomodasi, sambil mempromosikan budaya lokal dan identitas.
6. **Keamanan Energi**: Ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan sangat penting bagi pertumbuhan

ekonomi. Transisi dari sumber energi fosil ke energi terbarukan dapat menjadi tantangan dalam memastikan pasokan energi yang stabil.

7. **Pembangunan Perdesaan**: Memastikan bahwa wilayah perdesaan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan peluang ekonomi merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
8. **Dampak Kesehatan Masyarakat**: Kesehatan masyarakat yang buruk dapat merugikan produktivitas ekonomi. Dampak pandemi dan penyakit menular lainnya memperlihatkan perlunya memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan.
9. **Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati**: Perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati adalah ancaman serius bagi keberlanjutan planet dan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan harus mencakup langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.
10. **Krisis Keuangan dan Ketahanan Ekonomi**: Ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Membangun ketahanan ekonomi dan sistem keuangan yang kuat menjadi krusial.

Semua isu ini secara bersama-sama menciptakan lanskap yang kompleks dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penting bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk mengenali dan mengatasi isu-isu ini dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. ***

BAB 5

KETENAGAKERJAAN DAN PASAR TENAGA KERJA

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan miminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua persalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi (Soleh, 2017:83).

Pasar tenaga kerja adalah salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi suatu negara. Dinamika ketenagakerjaan memainkan peran krusial dalam membentuk arah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, serta kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pasar tenaga kerja mengalami transformasi yang signifikan, memunculkan berbagai tantangan dan peluang baru bagi individu, perusahaan, dan pemerintah.

A. Pengertian dan Penyebab Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan sedang mencari pekerjaan (Wijayanto, 2019:3). Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota angkatan kerja, yang artinya mereka berusia dan mampu bekerja, tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau sedang aktif mencari pekerjaan, serta siap untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi dan pasar tenaga kerja, pengangguran mencerminkan adanya ketidakcocokan antara jumlah individu yang ingin bekerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia.

Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja dipasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja inilah yang menciptakan pengangguran (Wijayanto, 2019:3).

Pengangguran dapat diukur dengan berbagai indikator dan kriteria, yang umumnya dapat dibagi menjadi beberapa tipe:

a. Pengangguran Terbuka: Orang-orang yang sedang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Mereka umumnya telah mengajukan lamaran kerja atau sedang mengikuti proses seleksi.

b. Pengangguran Tersembunyi: Orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan sebelumnya atau ingin bekerja, tetapi

tidak aktif mencari pekerjaan karena mungkin merasa pesimis tentang peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak tahu cara mencari pekerjaan yang sesuai.

c. Pengangguran Friksional: Jenis pengangguran yang muncul ketika individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau masuk ke pasar tenaga kerja untuk pertama kalinya. Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan sering menyebabkan periode sementara di antara pekerjaan.

d. Pengangguran Struktural: Timbul akibat ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Ini bisa terjadi karena perubahan teknologi atau pergeseran dalam permintaan pasar.

e. Pengangguran Siklis: Juga dikenal sebagai pengangguran konjunktural, terjadi sebagai akibat fluktuasi dalam siklus bisnis ekonomi. Pada saat resesi atau perlambatan ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk merumahkan atau mengurangi jumlah karyawan, sehingga mengakibatkan peningkatan pengangguran.

Pengangguran merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi suatu negara, efisiensi pasar tenaga kerja, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Upaya untuk mengurangi pengangguran sering menjadi prioritas pemerintah dan organisasi ekonomi untuk memastikan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Penyebab Pengangguran

Salah satu persoalan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah masalah pengangguran. Masalah

ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah stabilitas politik, masih sulitnya arus masuk modal asing, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Masalah lain, yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak mendukung penciptaan lapangan kerja atau tidak ramah terhadap tenaga kerja (Rivani, 2014:32).

Dengan demikian, pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum pengangguran:

a. Perubahan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat mengubah cara kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Automatisasi, kecerdasan buatan, dan perkembangan teknologi lainnya dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, mengakibatkan pengurangan lapangan kerja dalam beberapa kasus.

b. Hubungan Industrial: Masih belum terjalinnya hubungan Industrial antara pemerintah, pekerja dan perusahaan dengan baik. Mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan sakah satu penyebab pengangguran sistim hubungan yang terbentuk antarapelaku dalam proses produksi barang dan dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjaburuh dan pemerintah. Permasalahannya hubungan industrial saat ini masih belum harmonis. Seperti : peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), lembaga kerja sama (LKS) bipartit, lembaga kerja sama (LKS) tripartit, peran SP/SB dan asosiasi pengusaha (Wijayanto, 2019:4).

c. Perubahan Permintaan Pasar: Perubahan dalam preferensi konsumen atau tren pasar dapat mengakibatkan pergeseran dalam permintaan terhadap produk atau jasa tertentu. Hal

ini dapat berdampak pada sektor-sektor tertentu dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut.

d. Kurangnya Keterampilan yang Relevan: Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran struktural. Para pencari kerja mungkin tidak memiliki kualifikasi atau pelatihan yang diperlukan untuk mengisi posisi yang ada.

   Dari berbagai servey yang dilakukan oleh BPS dapat disimpulkan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia relatif masih rendah dibandingkan dengan daya saing negara tetangga. Rendahnya daya saing di sebabkan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan (Wijayanto, 2019:4).

e. Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja: Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerja, kerja lembur dan upah antara teanga kerja dan perusahaan.

f. Ketidakcocokan Geografis: Terkadang, pekerjaan yang tersedia mungkin berlokasi di daerah yang jauh dari tempat tinggal para pencari kerja. Ketidakcocokan geografis ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai, terutama jika mobilitas geografis terbatas.

g. Ketidakstabilan Ekonomi: Saat terjadi perlambatan ekonomi atau resesi, banyak perusahaan dapat mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya. Ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran konjunktural.

h. Link and Match: Ketidaksesuaian antara perusahaan dan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian juga merupakan permasalahan dalam menciptakan penganggguran di Indonesia. *Link and Match* merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan. *Link and Match* masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia (Wijayanto, 2019:4).

i. Ketidakpastian Ekonomi: Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan bisnis, atau ketidakpastian politik dapat membuat perusahaan enggan merekrut atau mengambil keputusan investasi. Hal ini dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja baru.

j. Ketidakseimbangan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja: Jika terdapat lebih banyak pencari kerja daripada pekerjaan yang tersedia, maka akan ada lebih banyak individu yang mengalami pengangguran. Ini dapat terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan ekonomi.

   Masih rendahnya peningkatan pasar kerja dibandingkan peningkatan jumlah tenaga kerja, meski pertambahan lapangan kerja selama 5 tahun terahir cukup banyak dibandingkan pertambahan angkatan kerja. Kondisi menyebabkan kelebihan tenaga kerja *(labour surplus economy).* Di samping itu kondisi pasar kerja juga pada pasar yang kurang berkualitas sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah (Wijayanto, 2019:4).

k. Kurangnya Keterampilan Lunak (Soft Skills): Selain keterampilan teknis, keterampilan lunak seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah juga sangat penting dalam dunia kerja modern. Ketidakmampuan dalam mengembangkan keterampilan ini dapat menghambat peluang mendapatkan pekerjaan.

l. Faktor Demografis: Pertumbuhan populasi, perubahan struktur usia, dan tren demografis lainnya dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Meningkatnya angkatan kerja dengan pertumbuhan populasi yang cepat dapat melebihi pertumbuhan lapangan kerja.

   Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sumberdaya atau juga menjadi tantangan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara. Yang dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, bonus demografi hanya ada satu kali. Jika mampu manfaatkan maka akan tercipta jendela kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan. Namun juga sebaliknya jika tidak mampu memanfaatkan akan menjadi masalah dalam suatu negara. Berdasarkan data dari BPS di jelaskan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun kedepan yang puncaknya pada tahun 2025. Dimana pada tahun tersebut usia angkatan kerja atau tenaga kerja kita melimpah, dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkanya (Wijayanto, 2019:3).

m. Ketidaksetaraan Gender dan Diskriminasi: Diskriminasi gender, ras, atau kelompok lainnya dapat menghambat akses individu ke peluang pekerjaan. Ini dapat mengakibatkan pengangguran atau pekerjaan yang tidak sebanding dengan kualifikasi dan potensi individu.

Pengangguran sering kali memiliki penyebab yang kompleks dan beragam, yang melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Solusi untuk mengatasi pengangguran sering melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan untuk pencarian pekerjaan, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak faktor lain yang dapat menyebabkan pengangguran, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Struktural dalam Industri: Perubahan dalam struktur industri atau sektor ekonomi dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, industri tradisional mungkin mengalami penurunan permintaan sementara sektor-sektor baru berkembang.

b. Krisis Keuangan dan Keterbatasan Investasi: Krisis keuangan global atau ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi investasi dan ekspansi, yang berpotensi mengurangi peluang pekerjaan.

c. Perubahan Demografis: Perubahan dalam komposisi penduduk, seperti penurunan laju kelahiran atau peningkatan harapan hidup, dapat mempengaruhi angkatan kerja dan dinamika pasar tenaga kerja.

d. Ketidaksetaraan Akses ke Pendidikan: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membatasi peluang individu untuk memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan yang baik.

e. Krisis Kesehatan atau Bencana Alam: Krisis kesehatan global seperti pandemi atau bencana alam besar dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mengakibatkan penurunan produksi dan hilangnya lapangan kerja.

f. Perubahan Hukum dan Regulasi: Perubahan dalam peraturan pemerintah, kebijakan pajak, atau perubahan hukum ketenagakerjaan dapat mempengaruhi motivasi perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan pekerja.

g. Kemunduran Industri Tertentu: Kematangan industri atau penurunan permintaan global terhadap produk tertentu dapat mengakibatkan penutupan pabrik atau pemangkasan produksi, yang berdampak pada pekerjaan.

h. Tingkat Pendapatan yang Rendah: Di beberapa daerah, tingkat pendapatan yang rendah dapat membuat para pencari kerja enggan untuk menerima pekerjaan yang tidak memberikan imbalan yang memadai.

i. Kesenjangan Keterampilan Antar Generasi: Generasi yang lebih tua mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan teknologi dan tren baru, sementara generasi yang lebih muda mungkin menghadapi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan pekerjaan yang tersedia.

j. Ketidakstabilan Politik: Ketidakpastian politik atau konflik dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja.

Setiap ekonomi memiliki dinamika dan faktor khusus yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Mengidentifikasi dan memahami berbagai penyebab pengangguran ini penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

B. Jenis-Jenis Pengangguran

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran (Wijayanto, dkk., 2019:2).

Terdapat beberapa jenis atau bentuk pengangguran yang umumnya diidentifikasi dalam analisis ekonomi dan pasar tenaga kerja. Setiap jenis pengangguran mencerminkan kondisi atau

situasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi para pencari kerja dan dinamika pasar tenaga kerja. Berikut adalah beberapa jenis pengangguran yang penting:

1. **Pengangguran Terbuka:** Ini adalah jenis pengangguran yang paling umum dan merujuk pada individu yang sedang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan. Mereka mengajukan lamaran kerja, menghadiri wawancara, dan berusaha secara aktif mendapatkan pekerjaan.
2. **Pengangguran Tersembunyi:** Pengangguran tersembunyi merujuk pada individu yang ingin bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka mungkin merasa pesimis tentang peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin tidak tahu cara mencari pekerjaan yang sesuai. Pengangguran tersembunyi sering sulit diukur secara akurat.
3. **Pengangguran Siklis:** Juga dikenal sebagai pengangguran konjunktural, jenis ini terjadi sebagai hasil dari fluktuasi dalam siklus bisnis ekonomi. Selama periode perlambatan ekonomi atau resesi, perusahaan mungkin mengurangi produksi atau melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi biaya, mengakibatkan peningkatan pengangguran.
4. **Pengangguran Struktural:** Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Perubahan teknologi atau pergeseran dalam permintaan pasar bisa menjadi penyebabnya.
5. **Pengangguran Friksional:** Ini adalah jenis pengangguran yang timbul karena peralihan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya atau masuknya individu ke pasar tenaga kerja untuk pertama kalinya. Mencari pekerjaan yang cocok

dan sesuai dengan keterampilan sering memerlukan waktu, sehingga ada periode sementara di antara pekerjaan.

6. **Pengangguran Musiman:** Terkait dengan fluktuasi musiman dalam permintaan untuk pekerjaan tertentu. Contoh pengangguran musiman termasuk pekerjaan di sektor pariwisata atau pertanian yang mungkin hanya tersedia dalam jangka waktu tertentu dalam setahun.
7. **Pengangguran Defisit Permintaan:** Jenis pengangguran ini terjadi ketika permintaan agregat dalam ekonomi tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja yang mencukupi bagi seluruh angkatan kerja yang tersedia. Ini seringkali terjadi dalam situasi resesi ekonomi.
8. **Pengangguran Voluntary (Sukarela):** Pengangguran sukarela terjadi ketika individu secara sadar memilih untuk tidak bekerja karena mereka memiliki sumber daya finansial atau dukungan lain yang memungkinkan mereka untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu.
9. **Pengangguran Involuntary (Tidak Sukarela):** Pengangguran tidak sukarela terjadi ketika individu ingin bekerja dan mencari pekerjaan, tetapi tidak mampu menemukan pekerjaan yang sesuai.
10. **Pengangguran Jangka Panjang:** Merujuk pada individu yang telah menganggur dalam jangka waktu yang lebih lama, seringkali selama beberapa bulan atau bahkan tahun. Pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan keterampilan dan motivasi kerja.
11. **Pengangguran Generasi Muda**: Merujuk pada pengangguran yang lebih tinggi di antara kelompok usia muda. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman kerja atau ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh generasi muda dengan permintaan pasar tenaga kerja.

12. **Pengangguran Struktural Frictional (Transitional)**: Kombinasi dari pengangguran struktural dan friksional, yang mencakup tantangan berpindah dari satu pekerjaan atau sektor ke yang lain sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan.

Pemahaman tentang berbagai jenis pengangguran ini membantu analis ekonomi, pemerintah, dan organisasi terkait untuk merancang kebijakan yang lebih tepat guna dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

C. Tingkat Pengangguran dan Dampaknya

Tingkat pengangguran merujuk pada persentase jumlah angkatan kerja yang sedang menganggur dalam total angkatan kerja yang tersedia. Tingkat ini digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara dan kinerja pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap peluang pekerjaan yang layak, serta bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak pada lapangan kerja.

Selain menjadi beban dan penghambat dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, pengangguran juga digunakan menjadi salah satu indikator dari pasar tenaga kerja yang ada. Rendahnya pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu negara demikian juga sebaliknya (Soleh, 2017:83).

Pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat, oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk menyesuaikan rencana pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja. Dengan begitu, jelas bahwa perencanaan pembangunan erat hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan karakteristik kelompok tertentu dalam angkatan kerja. Ini memberikan wawasan lebih rinci tentang distribusi pengangguran di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa tingkat pengangguran yang umumnya diidentifikasi:

1. **Tingkat Pengangguran Total**: Merupakan persentase total angkatan kerja yang sedang menganggur, baik yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun yang tidak mencari pekerjaan. Ini adalah tingkat pengangguran yang paling umum dilihat dan diukur.
2. **Tingkat Pengangguran Terbuka**: Ini mencakup individu yang sedang menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat ini merupakan bagian dari tingkat pengangguran total dan merupakan ukuran pengangguran yang lebih spesifik.
3. **Tingkat Pengangguran Tersembunyi**: Mengukur individu yang ingin bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan karena alasan tertentu, seperti rasa putus asa atau ketidakpastian. Ini juga merupakan bagian dari tingkat pengangguran total.
4. **Tingkat Pengangguran Siklis**: Ini adalah tingkat pengangguran yang terkait dengan fluktuasi siklus bisnis. Tingkat ini dapat naik selama resesi ekonomi dan turun saat ekonomi membaik.
5. **Tingkat Pengangguran Struktural**: Mengukur kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Ini berkaitan dengan pengangguran jangka panjang akibat perubahan struktural dalam ekonomi.
6. **Tingkat Pengangguran Friksional**: Merujuk pada pengangguran yang muncul sebagai hasil dari peralihan

antara pekerjaan atau masuknya individu baru ke pasar tenaga kerja. Ini mungkin disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai.

7. **Tingkat Pengangguran Musiman**: Mengukur pengangguran yang terjadi karena fluktuasi musiman dalam permintaan untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, industri pariwisata atau pertanian mungkin memiliki musim tertentu di mana permintaan pekerja meningkat.
8. **Tingkat Pengangguran Generasi Muda**: Merupakan tingkat pengangguran di antara kelompok usia muda, yang seringkali lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya karena kurangnya pengalaman kerja.
9. **Tingkat Pengangguran Lama**: Merujuk pada individu yang telah menganggur selama periode yang lebih lama, seringkali lebih dari 27 minggu. Pengangguran jangka panjang ini dapat menyebabkan penurunan kualifikasi dan motivasi kerja.
10. **Tingkat Pengangguran berdasarkan Pendidikan**: Mengukur pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat ini dapat membantu mengidentifikasi apakah ada kesenjangan keterampilan di antara para pencari kerja.
11. **Tingkat Pengangguran berdasarkan Wilayah Geografis**: Mengukur pengangguran berdasarkan lokasi geografis. Beberapa wilayah mungkin mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada yang lain.

Pemahaman tentang tingkat-tingkat pengangguran ini membantu dalam menganalisis dan merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik.

Dampak dari tingkat pengangguran yang tinggi atau rendah dapat berpengaruh luas terhadap berbagai aspek dalam masyarakat dan ekonomi:

1. **Dampak pada Individu dan Keluarga:**
    a. Pengurangan Pendapatan: Pengangguran dapat mengakibatkan penurunan pendapatan individu dan keluarga, yang dapat mengganggu kestabilan keuangan dan kesejahteraan.
    b. Stres dan Kesejahteraan Mental: Ketidakpastian pekerjaan dan tekanan finansial dapat menyebabkan stres dan masalah kesejahteraan mental pada individu dan keluarga yang terkena dampak.
2. **Dampak Sosial:**
    a. Ketidakstabilan Sosial: Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya tingkat ketidakstabilan sosial, termasuk peningkatan kejahatan dan gangguan sosial.
    b. Peningkatan Kesenjangan Sosial: Ketidaksetaraan dalam akses ke lapangan kerja dan pendapatan dapat meningkat, menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial.
3. **Dampak Ekonomi:**
    a. Menurunnya Konsumsi: Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat karena orang memiliki pendapatan yang lebih rendah untuk dibelanjakan.
    b. Penurunan Produksi: Jika banyak pekerja kehilangan pekerjaan, produksi dan output ekonomi umumnya akan menurun.
    c. Pengurangan Pendapatan Pajak: Pengangguran dapat mengurangi penerimaan pajak bagi pemerintah, membatasi kemampuan mereka untuk memberikan layanan publik.

4. **Dampak Politik dan Stabilitas**:

   Pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi dukungan politik dan stabilitas politik. Kondisi ekonomi yang buruk dapat mengarah pada ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.

5. **Dampak Pendidikan dan Keterampilan**:

   Pengangguran yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja di masa mendatang.

6. **Dampak Pertumbuhan Ekonomi**:

   Pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikator perlambatan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah cenderung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak konsumsi dan produksi.

Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi ekonomi sering berusaha untuk menjaga tingkat pengangguran pada tingkat yang dapat diterima. Upaya ini melibatkan perumusan kebijakan ekonomi, pelatihan keterampilan, dukungan pencarian pekerjaan, dan berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja yang memadai dalam ekonomi.

D. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Pasar dikenal sebagai titik pertemuan antara penawaran dan permintaan akan produk-produk berharga. Menurut Al-Ghazali (dalam Azid et al., 2013), sebaiknya pasar berjalan dengan baik dan bebas dari segala jenis korupsi, kejahatan dan eksploitasi serta tetap dalam kerangka hukum syariah. Jika kita memahami pasar

dari segi jual beli barang dan jasa sebagai hasil proses produksi, berbeda dengan konsep pasar tenaga kerja dimana tenaga kerja merupakan bagian dari proses produksi. Tenaga kerja merupakan masukan dalam proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa. Pangsa pasar tenaga kerja menunjukkan kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Huda, dkk (2008:207) mendefinisikan pasar tenaga kerja sebagai suatu keadaan dimana pekerjaan dapat diperoleh dari pekerja dan adanya permintaan pekerjaan dari perusahaan. Permintaan jasa berasal dari usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dalam proses produksinya memerlukan input, termasuk tenaga kerja. Kebutuhan pekerjaan seperti permintaan juga bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Secara umum diketahui bahwa keadaan perekonomian berkaitan dengan keadaan pasar tenaga kerja. Perekonomian yang baik atau berkembang menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap pekerjaan yang berarti tingkat pengangguran rendah.

Pasar tenaga kerja memegang peranan penting dan menjadi faktor penentu kinerja perekonomian suatu negara. Jelasnya, pasar tenaga kerja akan menentukan rantai pasokan secara keseluruhan. Jika diawasi dengan cermat, skema penawaran agregat akan menentukan jumlah pendapatan nasional dan dapat mempengaruhi harga umum dalam kondisi yang seimbang.

Menurut Mankiw, dkk (2012:240), kurva penawaran agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu. Bentuk kurva penawaran agregat untuk jangka panjang dan jangka pendek memiliki perbedaan yaitu untuk jangka panjangberbentuk vertikal sedangkan pada kondisi jangka pendek kurva penawaran agregat ini miring keatas, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa (PDB riil) bergantung pada pasokan tenaga kerja, modal dan sumber daya alam serta teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa, sedangkan

untuk kurva penawaran agregat jangka pendek bergantung pada tingkat harga harapan karena ketika tingkat harga menyimpang dari yang diharapkan dapat membuat output menyimpang dari tingkat alamiahnya sehingga memberikan dampak bagi pengurangan tenaga kerja hingga produksi (Mankiw et al, 2012: 258).

Pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam suatu ekonomi. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia, sementara situasi lapangan kerja juga dapat mempengaruhi kesehatan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja:

1. Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Lapangan Kerja:

   Ketika ekonomi tumbuh, banyak perusahaan cenderung meningkatkan produksi mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Ini sering mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan operasi yang lebih besar.

2. Lapangan Kerja Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:

   Ketika lebih banyak orang bekerja dan mendapatkan penghasilan, konsumsi cenderung meningkat. Konsumsi yang lebih tinggi memicu permintaan produk dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

3. Investasi dan Inovasi:

   Pertumbuhan ekonomi sering diiringi oleh peningkatan investasi dan inovasi. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produksi baru dapat menciptakan peluang kerja di sektor tersebut.

4. Keterampilan dan Produktivitas:

Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan dalam pelatihan keterampilan dan pendidikan. Ini membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

5. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja:

   Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja dengan permintaan yang lebih tinggi. Ini dapat mengarah pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan upah karena persaingan untuk tenaga kerja yang lebih sedikit.

6. Keterkaitan Sektor Ekonomi:

   Pertumbuhan di satu sektor ekonomi dapat merembes ke sektor lainnya. Misalnya, pertumbuhan di sektor manufaktur dapat mendorong permintaan tenaga kerja di sektor jasa seperti distribusi dan penjualan.

7. Kesetaraan dan Distribusi Pendapatan:

   Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

8. Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel:

   Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan memberikan peluang bagi perusahaan untuk merekrut dan mengembangkan tenaga kerja. Ini dapat memberikan fleksibilitas dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan individu.

Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bukanlah satu arah atau sederhana. Ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi keterkaitan ini, seperti perubahan teknologi, dinamika pasar global, serta kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang

diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan atau tidak inklusif dapat menghasilkan dampak negatif pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

E. Masalah Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Pelatihan

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. Teknologi yang canggih pun mungkin tidak bisa menandingi bagaimana kemampuan manusia, karena penggerak teknologi atau sumber daya adalah manusia/tenaga kerja .

Tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam permasalahan ini tenaga kerja dikelompokkan menjadi :

1. Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Misalnya dokter, guru, insinyur dsb.
2. Tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya sopir, montir, dsb.
3. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu. Misalnya tukag sapu, tukang sampah, dsb. (Wijayanto, dkk., 2019:2)

Rosyidi (2014:56) mengartikan secara rinci istilah tenaga

kerja kedalam istilah *human resource* dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lan-lain.

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda- beda antara negara satu dengan yang lain. Batasusia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan (Mantra, 2000:225)

Lebih lanjut, angkatan yang bekerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. *Pekerja* adalah orang yang mempunyai pekerjaan, termasuk orang yang mempunyai pekerjaan dan sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara menganggur. Yang dimaksud dengan *pengangguran* adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, termasuk mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Rivani, 2014: 31).

Masalah ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelatihan adalah tiga aspek yang saling terkait dalam dunia kerja dan ekonomi. Tidak hanya ada ketergantungan antara mereka, tetapi juga adanya tantangan yang terkait dengan memastikan bahwa individu memiliki keterampilan yang relevan dan peluang yang layak dalam dunia kerja.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti masalah pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Selain itu, investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang harus didukung dengan pembiayaan yang memadai dan merata (Wardana, 2016:186).

Berikut adalah beberapa masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelatihan:

1. **Ketidaksesuaian Keterampilan**: Salah satu masalah utama adalah ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran struktural, di mana banyak pekerjaan tidak dapat diisi karena kualifikasi yang tidak cocok.
2. **Kekurangan Keterampilan Teknis**: Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan kekurangan keterampilan teknis dalam angkatan kerja. Pekerjaan yang membutuhkan pemahaman tentang teknologi modern memerlukan pendidikan dan pelatihan yang relevan.
3. **Perubahan dalam Permintaan Pasar**: Perubahan dalam preferensi konsumen dan tren pasar dapat mengubah permintaan terhadap jenis keterampilan tertentu. Ini dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.
4. **Kesenjangan Pendidikan**: Tidak semua individu memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Kesenjangan

pendidikan dapat mengakibatkan kesenjangan dalam keterampilan dan peluang pekerjaan.

5. **Kurangnya Akses ke Pendidikan Berkualitas**: Kurangnya akses ke pendidikan yang baik dapat menghambat pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia kerja.
6. **Kualitas Pendidikan yang Rendah**: Meskipun akses ke pendidikan, kualitas pendidikan yang rendah dapat menghasilkan lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan atau cukup kuat untuk bersaing di pasar tenaga kerja.
7. **Pendidikan Tidak Relevan**: Sering kali ada kesenjangan antara apa yang diajarkan di lembaga pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar dapat menghasilkan lulusan yang kesulitan mencari pekerjaan.
8. **Pentingnya Pelatihan Keterampilan**: Pelatihan keterampilan memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu untuk memasuki pasar tenaga kerja. Namun, akses terhadap pelatihan berkualitas dan relevan dapat menjadi masalah.
9. **Pelatihan yang Tidak Sesuai**: Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja atau kurangnya hubungan dengan dunia industri dapat menyebabkan ketidakcocokan keterampilan dan pekerjaan.
10. **Biaya Pendidikan dan Pelatihan**: Biaya pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan bagi individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kolaborasi antara sektor pendidikan, pelatihan, dan industri. Pendidikan yang relevan dan berkualitas, pelatihan keterampilan yang tepat, serta

dukungan dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang terus berkembang.

F. Hubungan Pengangguran dengan Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014:161). Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013:147).

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan (Salim, dkk., 2021:18)

Hubungan antara pengangguran dan inflasi merupakan konsep yang dikenal sebagai Kurva Phillips, yang menggambarkan hubungan invers antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam ekonomi. Konsep ini menggambarkan bagaimana

perubahan dalam tingkat pengangguran dapat berdampak pada tingkat inflasi, dan sebaliknya.

Secara umum, hubungan antara pengangguran dan inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hubungan Invers**: Dalam jangka pendek, terdapat kecenderungan bahwa ketika tingkat pengangguran turun, tingkat inflasi akan meningkat, dan sebaliknya. Ini disebut juga dengan konsep "trade-off" antara pengangguran dan inflasi.
2. **Permintaan Terhadap Barang dan Jasa**: Ketika tingkat pengangguran rendah, angkatan kerja cenderung lebih terpakai dan banyak orang memiliki pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan yang tinggi dapat mendorong peningkatan harga, sehingga berkontribusi pada inflasi.
3. **Peningkatan Upah**: Dengan penurunan tingkat pengangguran, perusahaan cenderung bersaing untuk menarik dan mempertahankan pekerja dengan menawarkan upah yang lebih tinggi. Peningkatan upah ini dapat menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi, yang kemudian dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan harga produk mereka, berkontribusi pada inflasi.
4. **Kapasitas Produksi**: Ketika tingkat pengangguran rendah, kapasitas produksi ekonomi mungkin sudah hampir mencapai batasnya. Ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut, yang dapat menyebabkan peningkatan harga produk yang ada.
5. **Ekspektasi Inflasi**: Harapan individu terhadap inflasi juga berperan dalam hubungan ini. Jika masyarakat mengharapkan inflasi tinggi di masa depan, mereka mungkin menaikkan harga dan upah sekarang, yang dapat memicu spiraling inflasi.

6. **Pertumbuhan Ekonomi**: Peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Pertumbuhan yang cepat dapat mendorong permintaan yang lebih besar, yang dapat menyebabkan peningkatan inflasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini mungkin tidak selalu konsisten dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, konsep Kurva Phillips ini bisa bergeser dan menjadi lebih datar, mengindikasikan bahwa tidak mungkin untuk secara berkelanjutan memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Pada akhirnya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengangguran dan inflasi, termasuk kebijakan moneter, perubahan struktural dalam ekonomi, ekspektasi masyarakat, dan faktor global.

G. Hubungan Pengangguran dengan Harga-Harga

Hubungan antara pengangguran dan harga-harga (termasuk inflasi) adalah bagian penting dari analisis ekonomi makro. Hubungan ini tercermin dalam konsep "Kurva Phillips" yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini, hubungan antara pengangguran dan harga-harga bisa diuraikan sebagai berikut:

1. **Hubungan Invers dalam Jangka Pendek**: Dalam jangka pendek, terdapat kecenderungan hubungan invers antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, yang dikenal sebagai "trade-off" antara pengangguran dan inflasi. Ketika tingkat pengangguran rendah, ada peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa karena banyak orang bekerja. Permintaan yang tinggi dapat mendorong kenaikan harga-harga, menyebabkan inflasi.

2. **Permintaan Agregat**: Tingkat pengangguran yang rendah dapat mendorong pertumbuhan permintaan agregat (permintaan total dalam ekonomi). Ini bisa memicu peningkatan produksi dan penjualan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.
3. **Ketersediaan Tenaga Kerja**: Ketika tingkat pengangguran rendah, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai. Ini bisa mendorong perusahaan untuk menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Peningkatan upah dapat mengarah pada biaya produksi yang lebih tinggi dan potensi kenaikan harga-harga.
4. **Kapasitas Produksi**: Penggunaan angkatan kerja yang lebih intensif karena tingkat pengangguran rendah dapat membuat kapasitas produksi ekonomi mendekati batasnya. Ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut tanpa mengalami peningkatan biaya produksi.
5. **Ekspektasi Inflasi**: Antisipasi masyarakat tentang inflasi juga dapat mempengaruhi harga-harga. Jika masyarakat mengharapkan inflasi tinggi di masa depan, mereka mungkin menaikkan harga-harga dan upah saat ini, yang dapat memicu lebih banyak inflasi.

Namun, dalam jangka panjang, konsep Kurva Phillips ini bisa bergeser dan menjadi lebih datar. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk menjaga tingkat pengangguran yang rendah secara berkelanjutan tanpa mengalami inflasi yang terus meningkat. Faktor seperti perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebijakan pemerintah juga berperan dalam mengatur hubungan antara pengangguran dan harga-harga.

Tidak ada "trik ajaib" untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara tingkat pengangguran dan inflasi. Kebijakan moneter dan fiskal yang cermat serta pemahaman tentang faktor-faktor

ekonomi yang mempengaruhi hubungan ini menjadi kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik.

H. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum dalam upaya mengatasi permasalahan-permaslahan yang menyangkut tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut (Wijayanto, 2019:6-8; Soleh, 2017:90-92):

1. **Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja**
   Peningkatana ini dapat dilakukan melalui:
   a. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, daerah dan negara dalam kerangka keterbukaan pasar dengan beberapa strategi;
      - Penetapan standar kompetensi seluruh sektor.
      - Peningkatan daya saing tenaga kerja nasional
      - Peningkatan produktivitas dan kompetensi nasional
      - Peningkatan sumber pendanaan dalam rangka peningkatan keahlian tenaga kerja (penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja (*skilled based industries*)
      - Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggara pelatihan (mutu dan standarisasi)

   b. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)
   c. Pengembangan pola pendanaan pelatihan
   d. Penataan lembaga berbasis kompetensi
   e. Peningkatan kualitas sistim tata kelola program pelatihan untuk mempercepatsertifikasi pekerja
   f. Identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapatan tenaga kerja yang tinggi

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

Peningkatan pada aspek ini dapat dilakukan melalui:

a. Penataan lembaga berbasis kompetensi
b. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja.
c. Identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapatan tenaga kerja yang tinggi
d. Peningkatan akses angkatan kerja pada sumber daya produktif dalam rangka peningkatan keterampilan pekerja melalui:
   - Penciptaan lapangan kerja
   - Pengembangan kredit mikro untuk UKM
   - Meningkatkan kegiatan yang bersifat padat karya
   - Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memamnfaatkan SDA, SDM dan teknologi tepat guna.
e. Mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat melalui :
   - Pemberdayaan dan pendampingan untuk usaha mandiri
   - Peningakatan sarana dan prasaranaperekonomian
   - Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi
   - Perbaikan iklim usaha melalui penyediaan informasi yang lengkap
f. Fasilitasi mobilitas teanga kerja internal dan eksternal, serta memfungsikan pasar tenaga kerja melalui:
   - Meningkatakan efektivitas dan efisiensi pasar teanga kerja
   - Mengintegresikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan
   - Kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan serta pemberi kerja sehingga terbangun dengan

kerjasama berkelanjutan
- Membangunan jejaringan kemitraan dengan berbasis instansi atau organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah

g. Perlindungan pekerja migran dilakukanmelalui :
   - Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan
   - Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan
   - Membekali pekera migran dengan pengetahuan pendidikan dan keahlian
   - Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja

3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan Memperbaiki iklim ketenagakerjaan

Penciptaan hubungan industrial ini dapat dilakukan melalui:

a. Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
b. Mewujudkan sistim pengupahan yang adil
c. Meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh
d. Menerapkan prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaianhubungan industrial
e. Meningakatkan tata kelola persyaratan kerja, kesejahteranaan dan analisisdiskriminasi

4. Peningkatan perlindungan tenagakerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistim pengawasantenaga kerja melalui

a. Mengembangakan sistim pengawasan ketenagakerjaan
b. Meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan dan K3
c. Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek

Strategi Dalam Mengurangi Pengangguran

1. Peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan cara:
    a. Memperkuat perundingan bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha dalam melakukan perundingan upah, kondisi kerja dan syarat kerja
    b. Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong penguatan kelembagaanhubungan industrial

2. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam dalam memasuki pasar tenaga kerja secra global dengan cara:
    a. Meningkatkan upaya harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor
    b. Memperkuat kelembagaan untuk mengelola dana pelatihan secara potensial untuk mempercepat peningkatan keahlian
    c. Moderisasi lembaga pelatihan kerja milik pemerintha agar menjadi elmabga pelatihan yang dapat secara fleksibel memenuhi kebutuhan pasar
    d. Memperbaiki tatakelola dan manajemen lembaga pelatihan sehingga dapat tercipta pengelolaan yang profesional
    e. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan peningkatan keahlianprofesi sektor prioritas

3. Perlindungan pekerja migran
    a. Menerapkan perhentian dan pelarangan PLRT ke 21 negara timur tengah secara bertahap
    b. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja
    c. Meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap prisip prinsip hak asasi manusia untuk membekali pekerja migran dengan pengetahuan yang cukup atas hak haknya selama bekerja di luar negeri.

d. Menerapkan tata kelola penyelenggaraan penempatan pekerja migran dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam proses pelayanan dan pengawasan melalui dana dekonsentrasi kepada pemda provinsi dan kab/kota
e. Memperluas kerjasama baik dengan negara tujuan maupun dengan pemda dan unsur-unsur masyarakat dalam rangkan meningkatkan perlindungan pekerja.

BAB 6

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Kemiskinan dan ketimpangan adalah dua permasalahan sosial yang menjadi sorotan utama dalam berbagai konteks global. Dalam era modern ini, di mana kemajuan teknologi dan ekonomi semakin pesat, fenomena ini tetap menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi. Artikel ini akan membahas dengan lebih mendalam tentang kemiskinan dan ketimpangan, dua aspek yang seringkali saling terkait dan membawa dampak serius bagi kehidupan individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk hidup yang layak. Ini mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Ketika individu atau kelompok mengalami kemiskinan, mereka berisiko mengalami kelaparan, penyakit, dan kehidupan yang tidak stabil secara finansial. Masalah ini melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Ketimpangan, di sisi lain, mencerminkan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Ini bisa berarti ketidaksetaraan dalam

pendapatan, kesempatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbedaan dalam kekuatan politik. Ketimpangan dapat memperburuk masalah kemiskinan dan menciptakan lingkungan di mana beberapa individu atau kelompok memiliki keuntungan yang besar sementara yang lain terpinggirkan.

A. Pengertian Kemiskinan dan Ketimpangan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, meskipun pendapatan rendah adalah salah satu indikator utama. Ini juga mencakup keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, pangan yang cukup, pekerjaan yang layak, dan sejumlah faktor lain yang berperan dalam menentukan kualitas hidup seseorang.

Menurut Jhingan (2012:16), ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri *kedua*, saranakesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektorpertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Indikator kemiskinan dikemukakan oleh Bappenas (2004) (dalam Machmud, 2016:286) yaitu: (1)Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; (2) Terbatasnya

kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) Kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial danekonomi; (6) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; dan (7) Akses ke ilmu pengetahuanyang terbatas.

Adapun karakteristik kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2008) yaitu:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m^2 per orang.
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
c. Jenis dinding tempat tinggal dari rumbia/bambu/kayu berkualitas rendah/temboktanpa diplester.
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
j. Hanya sanggup makansebanyak satu/dua kali dalamsehari.
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
l. Sumber panghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m^2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,-perbulan.
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kemiskinan bisa bersifat relatif atau absolut. Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses bahkan ke kebutuhan dasar, seperti makanan yang mencukupi dan tempat tinggal yang layak. Kemiskinan relatif, di sisi lain, melibatkan perbandingan dengan tingkat kehidupan rata-rata di masyarakat tertentu. Seseorang dapat dianggap hidup dalam kemiskinan relatif jika tingkat pendapatannya jauh di bawah rata-rata di masyarakatnya, bahkan jika kebutuhan dasarnya terpenuhi (Yustika, 2016:27).

Kemiskinan juga dapat bersifat sementara atau kronis. Kemiskinan sementara terjadi ketika seseorang atau kelompok mengalami kesulitan finansial dalam jangka pendek, mungkin karena kehilangan pekerjaan atau situasi darurat lainnya (Yustika, 2016:27). Kemiskinan kronis, di sisi lain, mengacu pada kondisi kemiskinan yang berkepanjangan, di mana seseorang atau kelompok telah hidup dalam kemiskinan dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, ketidakstabilan ekonomi global, konflik, perubahan iklim, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak tepat.

Menurut Novianto (2003), esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang

termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya.Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu: 1) akses untuk mendapatkan makanan yang layak, 2) akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3) akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4) akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, 5) akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, 6) akses kepada leisure dan entertainment, dan 7) akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sangat besar diharapkan. Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

Pengentasan kemiskinan sering menjadi tujuan utama dalam kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan, karena kemiskinan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan, dalam konteks sosial dan ekonomi, mengacu pada ketidaksetaraan atau perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, pendapatan, kekuatan, atau kesejahteraan di antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu dalam suatu masyarakat atau ekonomi. Ketimpangan bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk:

a. Ketimpangan Pendapatan: Ini adalah bentuk ketimpangan yang paling sering dibahas. Ketimpangan pendapatan mengukur sejauh mana pendapatan individu atau kelompok berbeda dalam masyarakat. Biasanya diukur dengan menggunakan indeks Gini atau perbandingan antara pendapatan tertinggi dan terendah dalam populasi.

b. Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan: Ketimpangan pendidikan terjadi ketika sebagian besar populasi tidak memiliki akses yang sama ke peluang pendidikan yang berkualitas. Ini dapat menghasilkan kesenjangan dalam keterampilan, pengetahuan, dan peluang karier.

c. Ketimpangan Akses Terhadap Kesehatan: Ini mencakup perbedaan dalam akses ke layanan kesehatan, kualitas perawatan medis, dan kondisi kesehatan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ketimpangan kesehatan dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam tingkat harapan hidup dan kualitas hidup.

d. Ketimpangan Kesejahteraan Sosial: Ini melibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan sosial dan dukungan pemerintah, seperti perumahan, layanan sosial, dan keamanan sosial. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

e. Ketimpangan Kekuasaan Politik: Ini terkait dengan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, akses terhadap pengambilan keputusan politik, dan pengaruh politik. Ketimpangan ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam pengaruh dan kebijakan publik yang diadopsi.

Ketimpangan bisa menjadi masalah yang serius dalam masyarakat karena dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial, konflik, dan ketidakadilan. Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengurangi ketimpangan dalam berbagai bentuknya. Ini termasuk kebijakan redistribusi pendapatan, program akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang merata, serta upaya untuk memperluas peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

B. Penggolongan Penduduk Miskin di Indonesia

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Purba, 2012:77):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan minimum dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka, atau hitungan per kepala, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga kita dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

Garis Kemiskinan (GK) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs appsroach*). Konsep ini tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. GK adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makananyang setara dengan 1.200 kilo kalori per kapita

per hari, dan kebutuhan pokok non-makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua Nonmakanan (GKNM), sehingga GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM (Machmud, 2016:288).

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada gartis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalamdistribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuandari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam satu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkansuburnya kemiskinan.

Menurut Sinaga dan White (1987) sebagaimana dikutip Purba (2012), kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang ada membuat sekelompok masyarakat yang tidak menguasai sarana ekonomi (produksi) dan fasilitas secara merata. Dalam kemiskinan struktural sebagian anggota masyarakat akan tetapmiskin walaupun total produksi yang dihasilkan masyarakat secara rata-rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Kemiskinan alamiah dan Kemiskinan buatan (*artificial*).

1. Kemiskinan Alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Menurut Sinaga dan White (1987) dalam Purba (2012), kemiskinan alamiah terjadi akibat langkahnya sumber daya dan rendahnyaproduktifitas.
2. Kemiskinan Buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Penggolongan penduduk miskin di Indonesia biasanya dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria dan parameter tertentu, yang seringkali digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kemiskinan. Beberapa parameter yang digunakan dalam penggolongan penduduk miskin di Indonesia antara lain:

1. **Pendapatan per Kapita**: Salah satu metode utama untuk menggolongkan penduduk miskin adalah berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Pemerintah menentukan batas pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan individu atau keluarga yang pendapatannya di bawah batas tersebut dianggap sebagai penduduk miskin. Batas pendapatan ini dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis (misalnya, perkotaan versus pedesaan) dan waktu.
2. **Indeks Kesejahteraan**: Pemerintah juga dapat menggunakan indeks kesejahteraan atau indeks kemiskinan yang mencakup beberapa variabel, seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kondisi perumahan, dan aspek-aspek lain dari kesejahteraan. Dengan menggabungkan berbagai faktor ini, pemerintah

dapat mengidentifikasi keluarga atau individu yang mengalami kemiskinan multidimensi.

3. **Kriteria Geografis**: Beberapa wilayah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, pemerintah sering menggunakan kriteria geografis untuk menggolongkan daerah atau provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada rata-rata sebagai daerah dengan "kemiskinan tinggi."
4. **Kriteria Sosial dan Demografi**: Pemerintah juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan demografi dalam penggolongan penduduk miskin. Ini termasuk usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kemiskinan.
5. **Kriteria Penyandang Masalah Khusus**: Beberapa penduduk miskin mungkin memiliki masalah khusus, seperti disabilitas fisik atau mental, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mencari nafkah. Pemerintah dapat mempertimbangkan kriteria ini dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan.

Pemerintah Indonesia biasanya menggunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan data dan menghitung tingkat kemiskinan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Penggolongan penduduk miskin ini penting karena membantu pemerintah dalam merancang program-program bantuan sosial, kebijakan redistribusi, dan upaya-upaya lain untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial penduduk guna memahami sejauh mana kemiskinan memengaruhi masyarakat. Berikut adalah

beberapa elemen kunci yang terlibat dalam analisis tingkat kemiskinan di Indonesia:

1. **Pengumpulan Data**: Analisis tingkat kemiskinan dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif dan akurat. Data ini dapat mencakup informasi tentang pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan berbagai faktor lain yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk. Data ini biasanya dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terkait.
2. **Penentuan Garis Kemiskinan**: Salah satu langkah penting dalam analisis tingkat kemiskinan adalah menentukan garis kemiskinan, yaitu batas pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di Indonesia, garis kemiskinan bisa bervariasi berdasarkan lokasi geografis (misalnya, perkotaan versus pedesaan) dan waktu. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan ini sebagai acuan untuk mengidentifikasi penduduk miskin.
3. **Perhitungan Tingkat Kemiskinan**: Dengan menggunakan data pendapatan yang dikumpulkan, tingkat kemiskinan dihitung dengan cara membandingkan pendapatan individu atau keluarga dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Jika pendapatan individu atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, mereka dianggap sebagai penduduk miskin.
4. **Analisis Demografis**: Selain tingkat kemiskinan secara keseluruhan, analisis juga dapat memfokuskan pada karakteristik demografis penduduk miskin, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan wilayah geografis. Hal ini membantu dalam memahami kelompok mana yang paling rentan terhadap kemiskinan.
5. **Analisis Multidimensi**: Selain analisis pendapatan, analisis tingkat kemiskinan juga dapat melibatkan faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini

memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan multidimensi yang mungkin melampaui hanya masalah pendapatan.

6. **Interpretasi dan Kebijakan**: Hasil analisis kemiskinan membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang sesuai untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini juga memungkinkan evaluasi dampak program-program bantuan sosial dan kebijakan lain yang telah diimplementasikan.

Pentingnya analisis tingkat kemiskinan adalah untuk mengidentifikasi dan memahami masalah kemiskinan secara lebih mendalam, sehingga langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Analisis ini juga memungkinkan pemantauan progresifitas dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan adalah dua masalah kompleks yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang seringkali saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan:

Faktor-faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

1. **Pendapatan Rendah**: Pendapatan yang tidak mencukupi adalah penyebab utama kemiskinan. Orang yang memiliki pendapatan rendah atau tidak memiliki pekerjaan yang stabil cenderung berisiko mengalami kemiskinan.

2. **Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan**: Kurangnya pendidikan atau akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar dengan baik. Ini dapat menyebabkan kemiskinan generasional.
3. **Kurangnya Akses Terhadap Layanan Kesehatan**: Biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dapat menyebabkan pengeluaran medis yang besar dan menambah beban keuangan keluarga, terutama jika tidak ada asuransi kesehatan.
4. **Pengangguran:** Ketersediaan pekerjaan yang terbatas atau tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan banyak individu kehilangan sumber pendapatan utama mereka.
5. **Perumahan yang Tidak Layak**: Hidup dalam kondisi perumahan yang tidak layak, seperti pemukiman kumuh atau rumah yang tidak aman, dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan keluarga, serta menghabiskan banyak sumber daya.
6. **Krisis Ekonomi**: Krisis ekonomi, seperti resesi atau gejolak ekonomi, dapat mengakibatkan pengurangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan peningkatan kemiskinan di seluruh masyarakat.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan sebagai masalah mendasar dalam pembangunan diupayakan untuk terus ditekan serendah mungkin. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi (pada 2023) harus terus mengupayakannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemerataan pembangunan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketimpangan antar daerah dan tidak ada muncul pembagian daerah atau wilayah yang maju dan wilayah terbelakang (Rahmadi, 2019:55).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan, antara lain:

1. **Ketidaksetaraan Pendapatan**: Perbedaan besar dalam pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Ketidaksetaraan pendapatan sering kali menjadi penyebab utama ketimpangan. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat (Alesina dan Rodrik, 1994).
2. **Akses Terhadap Pendidikan yang Tidak Merata:** Ketimpangan pendidikan dapat muncul ketika sebagian kelompok tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam keterampilan dan peluang pekerjaan.
3. **Ketidaksetaraan Akses Terhadap Layanan Kesehatan**: Ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dapat menghasilkan perbedaan dalam harapan hidup dan kualitas hidup antara kelompok-kelompok yang berbeda.
4. **Perbedaan dalam Kekuasaan Ekonomi dan Politik**: Perbedaan dalam kekuasaan ekonomi dan politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengaruh dan kebijakan yang diadopsi, memungkinkan kelompok tertentu untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka.
5. **Ketidaksetaraan Pemilikahan Aset**: Pemilikahan aset seperti tanah, properti, dan modal juga bisa menjadi

penyebab ketimpangan. Kelompok yang memiliki akses lebih besar ke aset-aset ini cenderung memiliki kekayaan dan pengaruh yang lebih besar.

6. **Diskriminasi dan Bias Sosial**: Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnisitas, atau faktor-faktor lain dapat memperburuk ketimpangan dalam masyarakat.

Sjafrizal (2012) menjelaskan, ketimpangan pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah atau daerah. Mydral, (1975) (dalam Jhingan, 2013) menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan akibat adanya *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Perbedaan yang terjadi mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda dan menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagaiwilayah tersebut (Sukirno, 2012).

Terjadinya gap atau jurang kesejahteraan antar wilayah atau daerah akan mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan dan memperbesar kemiskinan antar daerah atau wilayah (Adelman dan Morris, 1973 dalam Jhingan, 2013). Ketimpangan pendapatan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan, sangat dirasakan Indonesia sampai saat ini. Dimana masyarakat dipulau Jawa memiliki pendapatan yang cenderung lebih tinggi dan lebih merata dibanding pendapatan yang diterima oleh masyarakat di luar Pulau Jawa.

Ketimpangan dan kemiskinan seringkali berkaitan erat dan saling memengaruhi. Ketika ketimpangan meningkat, biasanya terjadi peningkatan kemiskinan, dan sebaliknya. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan tindakan yang holistik dan terkoordinasi yang mencakup kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkelanjutan.

E. Program-Program Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Program-program ini bertujuan untuk membantu individu dan keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, beberapa program utama untuk mengurangi kemiskinan termasuk:

1. **Program Keluarga Harapan (PKH):** Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat-syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak menerima pendidikan dasar dan layanan kesehatan yang sesuai. Tujuan PKH adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT):** Program ini memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan tertentu. BPNT bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin memiliki akses ke pangan yang cukup dan bergizi.
3. **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM):** PNPM adalah program yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat miskin melalui pendanaan proyek-proyek produktif, infrastruktur desa, dan program pelatihan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan pendapatan mereka sendiri.
4. **Program Kredit Usaha Rakyat (KUR):** Program ini menyediakan akses ke kredit usaha dengan suku bunga rendah kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu.

KUR bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah.

5. **Program Rumah Sejahtera (PRS):** PRS adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perumahan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan untuk perbaikan rumah atau pembangunan rumah yang lebih layak.
6. **Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** PMT memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang mengalami malnutrisi atau risiko malnutrisi. Program ini berfokus pada anak-anak usia dini untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
7. **Program Bantuan Sosial Tunai (BST):** BST adalah program pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin yang tidak tercakup oleh program-program lain. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.

Selain program-program ini, pemerintah Indonesia juga terlibat dalam berbagai upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah miskin, serta kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program-program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program ini masih ada, dan seringkali diperlukan perbaikan dan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan

(HR. Athabrani dan Al-Bazzar)

BAB 7

INVESTASI

Investasi merupakan salah satu hal yang tak bisa diabaikan dalam kehidupan kita. Sejak zaman dahulu, manusia telah mengenal konsep investasi sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan mereka. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dunia investasi, mengungkapkan pentingnya investasi dalam meraih masa depan yang lebih mapan, serta memberikan wawasan tentang berbagai jenis investasi yang dapat dipertimbangkan.

Investasi bukan hanya sekadar penyimpanan uang di bawah bantal atau di bank, melainkan suatu bentuk strategi keuangan yang cerdas. Dengan berinvestasi, seseorang dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan nilai uangnya seiring berjalannya waktu. Namun, investasi juga mengandung risiko, dan penting bagi setiap individu untuk memahami dengan baik berbagai pilihan investasi yang ada, serta tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing.

Investasi adalah langkah penting dalam meraih stabilitas keuangan di masa depan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang investasi, setiap individu dapat membangun rencana keuangan yang kuat dan mencapai tujuan finansial mereka.

A. Pengertian Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Christianingrum, 2021:105). Menurut Mankiw (2006), investasi adalah komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengkaitkan masa kini dan masa depan.

Penanaman modal (investasi) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa akan datang (Sadono, 2008). *Menurut Smith,* Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan keuntungan, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Investasi merupakan penambahan barang modal secara netto yang positif (Fahrika, dkk., 2020:208).

Investasi merujuk pada tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah dana, sumber daya, atau aset tertentu ke dalam suatu proyek, bisnis, atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pengembalian di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai dari dana atau aset yang diinvestasikan, sehingga menghasilkan pertumbuhan kekayaan atau pendapatan pasif. Investasi melibatkan pengorbanan sejumlah uang atau aset pada saat ini untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang.

Ada beberapa aspek penting yang terkait dengan pengertian investasi:

1. **Alokasi Sumber Daya**: Investasi melibatkan pengalokasian sumber daya yang terbatas, seperti uang tunai, waktu, tenaga kerja, atau aset fisik, ke dalam berbagai pilihan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
2. **Risiko dan Pengembalian**: Semua investasi memiliki tingkat risiko yang terkait. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan kerugian atau ketidakpastian dalam mencapai hasil yang diharapkan. Pengembalian investasi juga bervariasi tergantung pada jenis investasi dan kondisi pasar.
3. **Tujuan Finansial**: Orang berinvestasi dengan berbagai tujuan finansial, seperti merencanakan masa pensiun, membeli rumah, pendidikan anak-anak, atau sekadar mencapai kebebasan finansial. Tujuan investasi akan mempengaruhi strategi dan instrumen investasi yang dipilih.
4. **Instrumen Investasi**: Terdapat berbagai jenis instrumen investasi, termasuk saham, obligasi, reksadana, properti, mata uang asing, komoditas, dan banyak lainnya. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda.
5. **Waktu:** Investasi bisa jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tujuan dan preferensi investor. Beberapa investasi mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diharapkan.
6. **Diversifikasi**: Diversifikasi adalah strategi penting dalam investasi yang melibatkan penyebaran dana atau aset ke berbagai jenis investasi atau aset untuk mengurangi risiko.
7. **Evaluasi Kinerja**: Investor harus secara teratur mengevaluasi kinerja portofolio investasi mereka untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan tujuan dan harapan.

Investasi adalah bagian integral dari perencanaan keuangan yang sukses dan dapat membantu individu atau organisasi mencapai berbagai tujuan finansial mereka. Namun, penting untuk

diingat bahwa semua investasi mengandung risiko, dan keputusan investasi harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pasar dan instrumen investasi yang dipilih.

B. Perbedaan Investasi dan Menabung

Investasi dan menabung adalah dua konsep keuangan yang berbeda, meskipun keduanya melibatkan penggunaan uang. Berikut adalah perbedaan utama antara investasi dan menabung:

1. **Tujuan Utama:**
   a. Investasi: Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengalokasikan uang atau aset ke dalam instrumen atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang lebih besar di masa depan. Investasi seringkali memiliki potensi pertumbuhan nilai uang.

   b. Menabung: Tujuan utama menabung adalah untuk menyimpan uang dalam rekening atau tempat penyimpanan yang aman dan likuid, biasanya di bank, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi uang tersebut. Menabung biasanya tidak memiliki potensi pertumbuhan besar dalam jangka pendek.

2. **Risiko:**
   a. Investasi: Investasi selalu melibatkan risiko, terutama risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Tingkat risiko dapat bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Beberapa investasi memiliki risiko yang lebih tinggi daripada yang lain.

   b. Menabung: Menabung di rekening tabungan atau deposito biasanya dianggap sebagai pilihan yang lebih aman. Uang yang ditabung cenderung tetap utuh atau

bahkan mendapatkan bunga yang rendah, dengan risiko kecil atau tidak ada risiko kehilangan modal.

3. **Potensi Pengembalian:**

   a. Investasi: Investasi memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada menabung. Ini termasuk pengembalian dari keuntungan modal, pendapatan dividen, bunga, atau sumber penghasilan lainnya, tergantung pada jenis investasi yang Anda pilih.

   b. Menabung: Menabung biasanya menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada investasi. Bunga dari rekening tabungan atau deposito umumnya lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan yang bisa dicapai melalui investasi.

4. **Liquidity (Likuiditas):**

   a. Investasi: Beberapa investasi mungkin tidak segera likuid, yang berarti Anda mungkin perlu waktu untuk menjualnya dan mengakses uang Anda. Ini terutama berlaku untuk investasi jangka panjang seperti properti atau saham.

   b. Menabung: Menabung di rekening bank umumnya lebih likuid, yang berarti Anda dapat dengan mudah mengakses uang Anda kapan saja, bahkan dengan menggunakan ATM atau cek.

5. **Waktu Horisontal:**

   a. Investasi: Investasi seringkali diperencanakan untuk jangka waktu yang lebih panjang, dengan harapan hasil yang lebih besar di masa depan.

   b. Menabung: Menabung dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kebutuhan dan tujuan finansial individu.

Dalam prakteknya, sebagian besar individu dan keluarga akan menggabungkan investasi dan menabung dalam strategi keuangan mereka. Menabung dapat digunakan sebagai cadangan dana darurat atau untuk tujuan pendek jangka, sedangkan investasi digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pertumbuhan kekayaan. Keputusan untuk menabung atau berinvestasi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan dan tingkat risiko yang sesuai dengan situasi keuangan individu/pengusaha.

C. Jenis-Jenis Investasi

Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yakni: (1) investasi tetap bisnis (*business fixed invesment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi; (2) investasi residensial (*residential invesment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan; (3) investasi persediaan (*inventory invesment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barangdalam proses, dan barang jadi (Christianingrum, 2021:105).

Investasi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham,obligasi, dan surat bukti hutang lainnya (Hellen, 2017)

Ada berbagai jenis investasi yang tersedia, masing-masing dengan karakteristik, risiko, dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis investasi yang umum:

1. **Saham:**
    - Saham adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Memegang saham berarti Anda memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut.
    - Potensi pengembalian saham sangat besar, tetapi juga berisiko tinggi. Harga saham dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat.
    - Investasi saham biasanya cocok untuk jangka panjang dan memerlukan pemahaman pasar yang baik.
2. **Obligasi:**
    - Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lain sebagai cara untuk meminjam uang dari investor.
    - Obligasi biasanya memiliki tingkat bunga yang tetap dan tanggal jatuh tempo tertentu. Mereka dianggap sebagai investasi yang lebih stabil daripada saham, tetapi pengembalian cenderung lebih rendah.
3. **Reksadana:**
    - Reksadana adalah dana yang diatur yang mengumpulkan uang dari banyak investor dan menginvestasikannya dalam portofolio saham, obligasi, atau aset lainnya.
    - Reksadana memungkinkan diversifikasi yang mudah dan diatur oleh manajer investasi profesional.
    - Terdapat berbagai jenis reksadana, termasuk reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang.
4. **Properti:**
    - Berinvestasi dalam properti melibatkan pembelian properti fisik seperti rumah, apartemen, atau komersial

dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan sewa atau pengembalian melalui apresiasi nilai properti.

- Properti umumnya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang stabil, tetapi memerlukan modal yang besar.

5. **Investasi dalam Bisnis:**
   - Anda dapat berinvestasi dalam bisnis Anda sendiri atau bisnis lain. Ini bisa berupa investasi langsung (menjadi pemilik bisnis) atau investasi pasif (misalnya, sebagai pemegang saham minoritas).
   - Investasi dalam bisnis dapat memberikan potensi pengembalian besar jika bisnis berhasil, tetapi juga memiliki risiko bisnis yang berkaitan.
6. **Mata Uang Asing (Forex):**
   - Forex melibatkan perdagangan mata uang dari berbagai negara. Investor mencoba menghasilkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang.
   - Perdagangan Forex sangat likuid tetapi juga sangat berisiko dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar valuta asing.
7. **Komoditas:**
   - Komoditas adalah barang-barang dasar seperti minyak, emas, logam, dan sereal. Anda dapat berinvestasi dalam komoditas melalui kontrak berjangka atau ETF (Exchange-Traded Fund).
   - Harga komoditas dapat sangat fluktuatif dan terpengaruh oleh faktor-faktor seperti cuaca, produksi, dan permintaan global.
8. **Kriptoaset:**

- Kriptoaset seperti Bitcoin dan Ethereum adalah aset digital yang beroperasi di dalam teknologi blockchain. Mereka diperdagangkan di berbagai platform pertukaran.
- Kriptoaset memiliki potensi pengembalian yang tinggi tetapi juga sangat volatil dan memiliki risiko yang tinggi.

9. **Logam Mulia:**
   - Investasi dalam logam mulia seperti emas dan perak dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.
   - Logam mulia sering dibeli dalam bentuk fisik atau melalui instrumen investasi seperti logam mulia yang diperdagangkan di bursa.

Setiap jenis investasi memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda, dan pemilihan investasi harus disesuaikan dengan tujuan, toleransi risiko, dan pengetahuan investor. Diversifikasi portofolio, atau menggabungkan beberapa jenis investasi, dapat membantu mengurangi risiko dan mencapai tujuan finansial jangka panjang.

D. Sumber Dana Investasi

Sumber dana investasi mengacu pada sumber-sumber uang atau aset yang digunakan untuk melakukan investasi. Sumber dana ini dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada individu atau organisasi yang melakukan investasi. Berikut adalah beberapa sumber dana investasi yang umum:

1. **Pendapatan Pribadi:**
   - Banyak individu menggunakan pendapatan pribadi mereka sebagai sumber utama dana investasi. Ini bisa termasuk gaji, bonus, komisi, atau penghasilan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis mereka.

- Bagi individu yang memiliki pendapatan yang cukup, berinvestasi secara teratur dari penghasilan mereka adalah cara umum untuk membangun kekayaan.

2. **Tabungan Pribadi:**
   - Tabungan pribadi, seperti uang yang disimpan di rekening tabungan atau deposito di bank, sering digunakan sebagai modal awal untuk investasi.
   - Uang yang diinvestasikan dari tabungan pribadi cenderung lebih likuid dan aman.
3. **Warisan atau Hadiah:**
   - Beberapa individu menerima warisan atau hadiah dari keluarga atau kerabat yang dapat digunakan sebagai dana investasi.
   - Warisan ini dapat berupa uang tunai, properti, atau aset lainnya yang dapat diinvestasikan.
4. **Kredit atau Pinjaman:**
   - Beberapa orang menggunakan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan atau pemberi pinjaman pribadi untuk melakukan investasi. Ini dapat mencakup pinjaman pribadi, pinjaman berjaminan, atau pinjaman bisnis.
   - Penggunaan kredit untuk investasi dapat meningkatkan potensi pengembalian, tetapi juga membawa risiko yang lebih besar karena harus membayar bunga atau mengembalikan pinjaman.
5. **Pendapatan Investasi:**
   - Pendapatan dari investasi yang sudah ada, seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi, atau penghasilan sewa dari properti, dapat digunakan untuk menginvestasikan lebih lanjut.

- Pendapatan investasi dapat membantu memperbesar portofolio investasi tanpa harus menarik dana tambahan dari sumber lain.

6. **Investor Institusional:**
   - Investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi besar, memiliki sumber dana yang signifikan untuk melakukan investasi.
   - Sumber dana institusi ini sering berasal dari kontribusi karyawan, premi asuransi, atau dana yang diinvestasikan oleh pelanggan.

7. **Modal Ventura dan Pendanaan Bisnis:**

   Bisnis dapat mendapatkan sumber dana investasi melalui modal ventura (venture capital) atau pendanaan bisnis (business funding). Investor bisnis ini memberikan dana kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau kepemilikan dalam bisnis tersebut.

8. **Dana Publik:**

   Perusahaan publik dapat mengumpulkan dana investasi melalui penjualan saham mereka kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Pendapatan dari penjualan saham ini dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis atau proyek baru.

9. **Pendanaan Crowdfunding:**
   - Crowdfunding adalah model di mana sejumlah individu atau investor kecil berkontribusi untuk mendukung proyek atau bisnis tertentu melalui platform crowdfunding online.
   - Crowdfunding dapat menjadi sumber dana investasi untuk bisnis startup dan proyek-proyek kreatif.

Sumber dana investasi akan bervariasi tergantung pada keadaan dan tujuan individu atau organisasi yang melakukan investasi. Pemilihan sumber dana yang tepat dan pengelolaan yang bijak dari dana tersebut sangat penting untuk kesuksesan investasi.

E. Investasi Dalam Negeri

1. Pengertian Investasi Dalam Negeri

Investasi dalam negeri mengacu pada kegiatan pengalokasian dana atau sumber daya ekonomi dalam negeri suatu negara dengan tujuan untuk mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan produksi, infrastruktur, bisnis, atau aset lainnya di dalam negeri tersebut. Investasi dalam negeri dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk individu, perusahaan swasta, pemerintah, dan investor asing. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengertian investasi dalam negeri:

a. Penggunaan Dana: Investasi dalam negeri melibatkan penggunaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti modal sendiri, pinjaman, atau dana dari investor lain.

b. Tujuan Ekonomi: Investasi dalam negeri bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ini dapat mencakup peningkatan produksi barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor tertentu seperti industri, pertanian, atau teknologi.

c. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Investasi dalam negeri adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor kunci, negara dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan potensi ekonomi.

d. Keuntungan Bisnis: Bagi perusahaan swasta, investasi dalam negeri dapat membantu mereka memperluas bisnis mereka

dan mencapai keuntungan yang lebih besar. Ini bisa termasuk investasi dalam peningkatan fasilitas produksi, penelitian dan pengembangan, atau ekspansi pasar.

e. Keputusan Pemerintah: Pemerintah sering memiliki peran besar dalam investasi dalam negeri. Mereka dapat memberikan insentif, mengatur kebijakan, dan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek strategis yang mendukung pembangunan nasional.

f. Pengaruh terhadap Ketenagakerjaan: Investasi dalam negeri dapat berdampak pada tingkat pengangguran dan lapangan kerja. Peningkatan investasi biasanya berarti peningkatan peluang pekerjaan bagi penduduk lokal.

g. Pendanaan Proyek: Investasi dalam negeri sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pembangkit listrik, pabrik, atau fasilitas kesehatan dan pendidikan.

h. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam negeri sering berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Investasi dalam negeri penting karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja dan akses ke layanan dan fasilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam negeri sering menjadi fokus kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan ekonomi.

2. Latar Belakang Investasi dalam Negeri

Latar belakang investasi dalam negeri berkaitan dengan sejumlah faktor dan tren ekonomi yang mendorong aktivitas

investasi di dalam negeri suatu negara. Beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang investasi dalam negeri meliputi:

a. Pertumbuhan Ekonomi: Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif cenderung menarik investasi dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang bisnis yang lebih besar, meningkatkan permintaan atas produk dan layanan, dan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan ekspansi.

b. Stabilitas Politik: Stabilitas politik adalah faktor penting dalam menarik investasi. Ketidakstabilan politik atau ketidakpastian kebijakan dapat membuat investor ragu-ragu dan menghindari suatu negara.

c. Peraturan dan Kebijakan Investasi: Kebijakan dan peraturan yang mendukung investasi dalam negeri, seperti insentif pajak, perlindungan hukum bagi investor, dan fasilitasi prosedur bisnis yang lebih cepat, dapat membantu meningkatkan minat investor.

d. Infrastruktur yang Berkembang: Negara dengan infrastruktur yang berkembang, termasuk jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang baik, akan lebih menarik bagi investor. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis.

e. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih adalah faktor penting dalam investasi dalam negeri. Keahlian dan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global.

f. Akses ke Pasar: Lokasi geografis yang strategis dan akses mudah ke pasar domestik dan internasional dapat menjadi dorongan bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam negeri.

g. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang bisnis baru dan memotivasi perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan serta inovasi produk.

h. Keamanan dan Stabilitas Sosial: Keamanan dan stabilitas sosial merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Lingkungan yang aman dan stabil cenderung lebih menarik bagi investor.

i. Kecukupan Pasokan Sumber Daya: Kecukupan pasokan bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk operasi bisnis dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi dalam negeri.

j. Kemudahan Berbisnis: Faktor seperti kemudahan dalam mendirikan bisnis, mengurus izin, dan menjalankan operasi bisnis tanpa hambatan berlebihan adalah penting bagi investor.

Latar belakang investasi dalam negeri akan bervariasi antara negara dan wilayah, tergantung pada situasi ekonomi, politik, dan sosial yang ada. Bagi pemerintah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dalam negeri adalah strategi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi perusahaan, investasi dalam negeri dapat memberikan peluang pertumbuhan dan keuntungan yang signifikan jika dijalankan dengan baik.

3. Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri

Investasi dalam negeri dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dan investor untuk mengalokasikan dana atau sumber daya mereka di dalam negeri suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam negeri meliputi:

a. Stabilitas Politik: Kondisi politik yang stabil dan prediktabil merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan yang mendadak, atau ketidakpastian politik dapat membuat investor ragu-ragu.

b. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait investasi, seperti insentif pajak, peraturan investasi, dan perlindungan hukum bagi investor, dapat memengaruhi minat investor. Kebijakan yang mendukung investasi cenderung lebih menarik.

c. Infrastruktur: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi memengaruhi investasi. Infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis.

d. Sumber Daya Manusia: Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja sangat penting. Investasi dalam negeri akan lebih menarik jika ada akses ke tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

e. Kecukupan Pasokan Sumber Daya: Jika bisnis bergantung pada pasokan bahan baku atau sumber daya tertentu, ketersediaan dan harga sumber daya tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi.

f. Akses ke Pasar: Lokasi geografis yang strategis dan akses mudah ke pasar domestik dan internasional dapat menjadi dorongan bagi investasi dalam negeri.

g. Regulasi Lingkungan: Peraturan lingkungan yang ketat atau biaya lingkungan yang tinggi dapat memengaruhi investasi, terutama dalam industri-industri yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan.

h. Kemudahan Berbisnis: Kemudahan dalam mendirikan bisnis, mengurus izin, dan menjalankan operasi bisnis tanpa

hambatan berlebihan dapat meningkatkan daya tarik investasi.

i. Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang bisnis baru dan memotivasi investasi dalam riset dan pengembangan serta inovasi produk.

j. Keamanan dan Stabilitas Sosial: Keamanan dan stabilitas sosial merupakan faktor penting dalam menarik investasi. Lingkungan yang aman dan stabil cenderung lebih menarik bagi investor.

k. Pasar Konsumen: Ukuran dan pertumbuhan pasar konsumen dalam negeri dapat memengaruhi keputusan investasi. Pasar yang besar dan berkembang dapat menjadi motivasi untuk berinvestasi.

l. Kondisi Ekonomi Global: Faktor ekonomi global seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, dan situasi ekonomi global dapat memengaruhi investasi dalam negeri, terutama jika bisnis terkait dengan perdagangan internasional.

m. Tingkat Risiko: Persepsi risiko investasi dalam negeri, termasuk risiko politik, ekonomi, dan hukum, dapat memengaruhi minat investor. Tingkat risiko yang lebih rendah cenderung lebih menarik.

Faktor-faktor ini saling terkait dan dapat berubah seiring waktu. Pemerintah dan pelaku bisnis sering kali berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan mengelola faktor-faktor ini secara bijak. Keputusan investasi juga sangat dipengaruhi oleh tujuan bisnis, strategi perusahaan, dan kondisi pasar saat itu.

F. Investasi Luar Negeri

1. Pengertian dan Kelebihan Ivestasi Luar Negeri

Investasi luar negeri, juga dikenal sebagai investasi langsung luar negeri (foreign direct investment atau FDI), merujuk pada tindakan perusahaan atau individu untuk mengalokasikan modal atau sumber daya ekonomi mereka untuk memperoleh kepemilikan atau kendali atas aset, proyek, atau bisnis di luar wilayah negara asalnya. Investasi luar negeri dapat berupa pembelian saham di perusahaan asing, mendirikan pabrik atau cabang di luar negeri, atau berinvestasi dalam proyek-proyek bisnis yang berlokasi di negara lain.

Kelebihan investasi luar negeri meliputi

a. Akses ke Pasar Baru: Investasi luar negeri memberikan akses langsung ke pasar asing. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan baru di negara tujuan investasi.

b. Diversifikasi Risiko: Investasi luar negeri dapat membantu mengurangi risiko bisnis dengan diversifikasi geografis. Ketika bisnis beroperasi di berbagai negara, dampak perubahan kondisi ekonomi atau politik di satu negara dapat diimbangi oleh kinerja positif di negara lain.

c. Sumber Daya Lokal: Investasi luar negeri dapat memberikan akses ke sumber daya lokal seperti tenaga kerja terlatih, bahan baku, atau infrastruktur yang mungkin tidak tersedia di negara asal perusahaan.

d. Ketahanan Terhadap Perubahan Nilai Tukar: Investasi luar negeri dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketika perusahaan memiliki operasi di berbagai negara, mereka dapat memanfaatkan nilai tukar yang menguntungkan.

e. Penghematan Biaya Produksi: Beberapa negara menawarkan biaya produksi yang lebih rendah atau insentif pajak kepada perusahaan asing. Hal ini dapat membantu perusahaan menghemat biaya produksi.

f. Akses ke Teknologi dan Keahlian: Investasi luar negeri dapat memberikan akses kepada teknologi, pengetahuan, dan keahlian baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi perusahaan.

g. Peningkatan Keuntungan: Investasi luar negeri dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan dengan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan.

h. Kemitraan Strategis: Investasi luar negeri dapat menciptakan peluang kemitraan strategis dengan perusahaan atau pemerintah lokal. Ini dapat membantu perusahaan mengatasi hambatan hukum atau regulasi dan mendapatkan dukungan lokal.

i. Pemahaman Pasar Global: Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat memahami lebih baik perilaku pasar global dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan.

j. Kepemilikan dan Kendali: Investasi luar negeri memungkinkan perusahaan untuk memiliki dan mengendalikan aset dan operasi di negara tujuan investasi, memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar.

Kelebihan investasi luar negeri tergantung pada strategi dan tujuan perusahaan, serta kondisi ekonomi dan politik di negara yang menjadi tujuan investasi. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi luar negeri juga melibatkan risiko, termasuk risiko politik, ekonomi, dan hukum, serta tantangan dalam manajemen operasi di lingkungan yang berbeda secara budaya dan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan

analisis yang cermat dan perencanaan yang matang sebelum melakukan investasi luar negeri.

2. Fungsi PMA bagi Indonesia

Penanaman modal asing (PMA) adalah proses di mana investor atau perusahaan dari luar negeri mengalokasikan modal atau sumber daya mereka ke dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. PMA memiliki beberapa fungsi yang penting bagi Indonesia:

a. Sumber Pendanaan: Penanaman modal asing memberikan sumber pendanaan tambahan bagi proyek-proyek dan bisnis di Indonesia. Dana yang diinvestasikan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, mendukung sektor-sektor industri, dan membiayai proyek-proyek pembangunan lainnya.

b. Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi asing seringkali menciptakan peluang kerja bagi penduduk lokal. Proyek-proyek PMA dapat menghasilkan lapangan kerja baru, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Transfer Teknologi: Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia sering membawa teknologi, pengetahuan, dan keahlian baru. Ini dapat membantu peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing industri dalam negeri.

d. Peningkatan Ekspor dan Daya Saing: Investasi asing dapat meningkatkan produksi dan ekspor barang dan jasa Indonesia. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat memanfaatkan keahlian lokal dan akses ke pasar global, yang dapat menguntungkan ekonomi nasional.

e. Diversifikasi Ekonomi: Investasi asing dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi Indonesia. Dengan mendukung berbagai sektor industri dan bisnis, PMA dapat membantu

mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

f. Peningkatan Pendapatan dan Penerimaan Pajak: Investasi asing dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi ekonomi lainnya. Ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.

g. Stimulasi Persaingan: Keberadaan perusahaan asing dapat merangsang persaingan dalam pasar domestik. Ini dapat mendorong inovasi, kualitas produk yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif, yang menguntungkan konsumen.

h. Peningkatan Infrastruktur: Beberapa investasi asing terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur di Indonesia, seperti jalan raya, pelabuhan, dan pembangkit listrik.

i. Kemitraan Strategis: Investasi asing dapat menciptakan kemitraan strategis antara perusahaan asing dan lokal. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi hambatan hukum atau regulasi serta mendapatkan dukungan lokal.

j. Pengembangan Wilayah: Investasi asing dapat mendukung pengembangan wilayah tertentu di Indonesia, terutama di daerah yang kurang berkembang. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa pengelolaan investasi asing harus dilakukan secara bijak. Pemerintah Indonesia harus menjaga keseimbangan antara mendukung investasi asing dan melindungi kepentingan nasional serta menjaga hak-hak pekerja dan lingkungan. Dengan manajemen yang baik, investasi

asing dapat memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia.

3. Tujuan PMA dan Faktor Menurunya PMA

Penanaman modal asing (PMA) dilakukan dengan berbagai tujuan, baik oleh investor atau perusahaan asing yang berinvestasi di suatu negara. Tujuan-tujuan tersebut dapat mencakup hal-hal berikut:

a. Mengakses Pasar Baru: Salah satu tujuan utama PMA adalah untuk memasuki pasar baru. Investor ingin memanfaatkan peluang yang ada di negara tujuan investasi, seperti meningkatnya permintaan konsumen, pertumbuhan ekonomi, atau kebutuhan untuk produk atau layanan tertentu.

b. Diversifikasi Portofolio: Diversifikasi portofolio adalah strategi umum dalam investasi. Investor atau perusahaan mungkin ingin menyebarkan risiko dengan berinvestasi di berbagai negara atau sektor industri. Dengan demikian, jika satu investasi mengalami kerugian, portofolio secara keseluruhan tetap aman.

c. Penghematan Biaya Produksi: Beberapa negara menawarkan biaya produksi yang lebih rendah atau insentif pajak kepada perusahaan asing. Investor mungkin tertarik untuk berinvestasi di negara-negara tersebut untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.

d. Akses ke Sumber Daya Lokal: Investasi luar negeri dapat memberikan akses kepada sumber daya lokal seperti tenaga kerja terlatih, bahan baku, atau infrastruktur yang mungkin tidak tersedia di negara asal investor.

e. Peningkatan Daya Saing Global: Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Mereka dapat memanfaatkan

keahlian lokal dan memahami lebih baik perilaku pasar global.

f. Peningkatan Keuntungan: Investor ingin mencapai keuntungan yang lebih besar. Investasi luar negeri dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnis mereka dan mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan dan keuntungan.

g. Peningkatan Pendapatan: Investasi luar negeri sering membawa peningkatan pendapatan bagi negara tujuan investasi melalui pembayaran pajak, royalti, dan kontribusi ekonomi lainnya.

h. Peningkatan Infrastruktur: Beberapa investasi luar negeri terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut.

i. Kemitraan Strategis: Investasi luar negeri dapat menciptakan kemitraan strategis antara perusahaan asing dan lokal. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi hambatan hukum atau regulasi serta mendapatkan dukungan lokal.

j. Pengembangan Wilayah: Investasi luar negeri dapat mendukung pengembangan wilayah tertentu di negara tujuan investasi, terutama di daerah yang kurang berkembang. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah.

Tujuan PMA akan bervariasi tergantung pada situasi dan strategi perusahaan atau investor, serta kondisi ekonomi dan politik di negara tujuan investasi. Keberhasilan mencapai tujuan-tujuan tersebut tergantung pada manajemen yang bijak, analisis risiko, dan pemahaman mendalam tentang pasar dan lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan.

Penanaman modal asing (PMA) dapat mengalami penurunan atau hambatan berdasarkan sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup hal berikut:

a. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik di negara tujuan investasi dapat menjadi hambatan utama bagi PMA. Konflik politik, perubahan pemerintahan yang tidak stabil, atau ketidakpastian kebijakan dapat membuat investor enggan berinvestasi.

b. Regulasi yang Tidak Ramah Investasi: Regulasi yang kompleks, birokrasi yang lambat, atau hukum yang tidak ramah investasi dapat menjadi hambatan besar. Investor cenderung mencari negara dengan lingkungan bisnis yang lebih ramah.

c. Risiko Hukum dan Kepemilikan: Negara yang tidak memiliki sistem hukum yang kuat dan adil atau yang tidak melindungi hak kepemilikan properti dengan baik dapat membuat investor ragu-ragu.

d. Risiko Ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, atau ketidakpastian makroekonomi dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di suatu negara.

e. Ketidakpastian Mata Uang: Nilai tukar mata uang yang tidak stabil atau penurunan nilai mata uang lokal dapat membuat investasi menjadi lebih berisiko, terutama jika investor harus mengalihkan keuntungan mereka kembali ke mata uang asal.

f. Isu Politik dan Keamanan: Masalah politik dan keamanan seperti terorisme, kerusuhan sosial, atau permasalahan etnis dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan dan menurunkan minat investor.

g. Risiko Lingkungan: Isu-isu lingkungan seperti polusi berat, pengelolaan limbah yang buruk, atau ketidakpatuhan

terhadap standar lingkungan internasional dapat menciptakan risiko hukum dan reputasi bagi investor.

h. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba, seperti perubahan pajak, regulasi, atau kebijakan perdagangan, dapat menghambat investasi yang sudah ada atau membuat investor berpikir ulang tentang investasi baru.

i. Tingkat Risiko yang Tinggi: Beberapa negara memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, terutama negara-negara yang sedang berkembang atau mengalami konflik. Investasi di negara-negara dengan tingkat risiko yang tinggi dapat memerlukan pengelolaan risiko yang lebih cermat.

j. Ketidakpastian Pasar: Faktor-faktor seperti ketidakpastian politik, ekonomi global, atau perubahan tren pasar dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

k. Tingkat Suku Bunga Tinggi: Tingkat suku bunga yang tinggi di negara tujuan investasi dapat membuat biaya pinjaman menjadi mahal, yang dapat menghambat investasi.

l. Kompleksitas Perizinan: Proses perizinan yang rumit dan lambat dapat membuat investor enggan berinvestasi di negara tersebut.

m. Tingkat Korupsi yang Tinggi: Korupsi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko tambahan bagi investor.

Faktor-faktor ini dapat berdampak negatif pada arus PMA suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah investasi, stabil, dan dapat diprediksi untuk menarik investasi asing. Hal ini melibatkan reformasi kebijakan, perbaikan hukum, upaya untuk meningkatkan keamanan, dan berbagai langkah lainnya untuk menciptakan iklim investasi yang menguntungkan.

G. Prediksi Ekonomi dan Investasi

Sebagian besar para ahli tidak memiliki kemampuan untuk membuat prediksi ekonomi atau investasi yang akurat, terutama karena informasi terbaru dan data ekonomi tidak tersedia pada saat ini. Prediksi ekonomi dan investasi memerlukan analisis mendalam atas berbagai faktor, termasuk data ekonomi terbaru, kebijakan pemerintah, perkembangan global, dan berbagai aspek lainnya yang berubah dari waktu ke waktu.

Namun, di sini dapat diberikan pandangan umum tentang beberapa faktor yang sering memengaruhi perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia, yang mungkin menjadi pertimbangan dalam analisis lebih lanjut:

1. **Kondisi Ekonomi Global**: Kondisi ekonomi global dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama karena negara ini memiliki ketergantungan terhadap perdagangan internasional. Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi global, perang dagang, dan fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia.
2. **Kebijakan Pemerintah**: Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, serta langkah-langkah untuk mendorong investasi dalam negeri dan asing, akan berdampak pada kondisi ekonomi dan investasi di negara ini.
3. **Infrastruktur:** Kemajuan dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat membuka peluang investasi yang lebih besar dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing. Hasil penelitian Christianingrum (2021:114) menyimpulkan bahwa pembangunan infastruktur dan kebijakan yang menjaga iklim investasi merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

4. **Ketahanan Ekonomi**: Kemampuan Indonesia untuk mengatasi perubahan ekonomi yang tak terduga, seperti krisis ekonomi global atau bencana alam, akan memengaruhi ketahanan ekonomi dan kepercayaan investor.
5. **Reformasi Struktural**: Reformasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan regulasi bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang.
6. **Perkembangan Industri dan Teknologi:** Perkembangan industri dan teknologi, terutama dalam sektor digital dan teknologi informasi, dapat membuka peluang baru untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
7. **Ketahanan Energi dan Lingkungan**: Upaya untuk mencapai ketahanan energi dan lingkungan dapat berdampak pada investasi dalam sektor energi terbarukan dan keberlanjutan.
8. **Ketidakpastian Politik dan Keamanan**: Kondisi politik dan keamanan yang stabil penting untuk mempertahankan kepercayaan investor.
9. **Pasar Tenaga Kerja dan Demografi**: Kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan demografi populasi dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi.
10. **Tren Global:** Tren global seperti revolusi industri keempat, perubahan iklim, dan perubahan dalam perilaku konsumen juga dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu di Indonesia.

Dalam menyusun prediksi ekonomi dan investasi yang akurat, diperlukan analisis yang komprehensif, data terbaru, serta pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar. Oleh karena itu, disarankan untuk mengacu pada laporan ekonomi resmi, analis pasar, dan sumber daya yang dapat memberikan wawasan terkini tentang prospek ekonomi dan investasi Indonesia.

H. Peran Investasi dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia

Investasi memainkan peran kunci dalam pengembangan ekonomi Indonesia dengan berbagai cara yang positif. Model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik menyatakan, bahwa peningkatan investasi suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi (Wahiba, 2014), karena dengan investasi atau adanya ketersediaan modal yang bisa berubah dan perubahan itu mengarah ke pertumbuhan ekonomi (Solow dalam Mankiw, 2016).

Berikut adalah beberapa peran penting investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia:

1. **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**: Investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, perusahaan baru, ekspansi bisnis, dan proyek-proyek lainnya dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan nasional.
2. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas**: Investasi dalam teknologi, peralatan, dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produksi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Ini membantu meningkatkan output dan daya saing produk dan layanan Indonesia di pasar global.
3. **Diversifikasi Ekonomi**: Investasi dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi, dengan memungkinkan perkembangan sektor-sektor baru atau pengembangan sektor-sektor yang lebih kuat. Diversifikasi dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu dan membuat ekonomi lebih tahan terhadap perubahan ekonomi global.

4. **Peningkatan Infrastruktur**: Investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam ekonomi. Infrastruktur yang baik membantu dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan perdagangan.
5. **Peningkatan Daya Saing:** Investasi dalam riset dan pengembangan, inovasi, dan teknologi dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global. Ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang membantu ekspor produk dan layanan Indonesia.
6. **Penciptaan Lapangan Kerja**: Investasi dapat menciptakan peluang kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lapangan kerja yang layak juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan permintaan atas produk dan layanan.
7. **Pengembangan Wilayah**: Investasi dapat membantu dalam pengembangan wilayah tertentu, termasuk wilayah yang kurang berkembang. Ini dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara wilayah-wilayah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.
8. **Peningkatan Pendapatan Nasional**: Investasi yang sukses dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional melalui penciptaan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi. Ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak untuk pemerintah.
9. **Kemitraan Internasional**: Investasi asing dapat memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara lain. Hal ini menciptakan peluang untuk kolaborasi bisnis lintas batas dan pertukaran teknologi dan pengetahuan.
10. **Peningkatan Kualitas Hidup**: Investasi dalam infrastruktur sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan dapat

meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah Indonesia, bersama dengan pelaku bisnis dan investor, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Ini melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan kepastian hukum, insentif investasi yang sesuai, dan upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya investasi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. ***

BAB 8

INDUSTRI KREATIF DAN INOVASI

Industri kreatif dan inovasi adalah dua konsep yang tak terpisahkan dalam dunia bisnis dan perkembangan ekonomi saat ini. Keduanya merupakan pilar utama yang mendorong pertumbuhan dan transformasi dalam berbagai sektor industri di seluruh dunia. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, industri kreatif dan inovasi telah menjadi motor penggerak utama bagi negara-negara yang ingin tetap relevan dan kompetitif di panggung internasional.

Industri kreatif mengacu pada sektor ekonomi yang menggabungkan keahlian, ekspresi budaya, dan kreativitas untuk menciptakan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah. Ini termasuk industri seperti seni, musik, film, desain, periklanan, mode, dan banyak lagi. Industri kreatif tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada identitas budaya suatu negara dan dapat menjadi sumber pendapatan ekspor yang signifikan.

Di sisi lain, inovasi adalah proses yang mendorong perubahan, peningkatan, dan pengembangan baru dalam berbagai aspek kehidupan kita. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk atau teknologi baru, tetapi juga tentang cara berpikir yang

baru, pemecahan masalah yang kreatif, dan pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks. Industri kreatif seringkali menjadi sarana yang sangat efektif untuk mendorong inovasi, karena kreativitas dan ide-ide segar sering kali menjadi kunci utama dalam menghadirkan perubahan signifikan.

A. Pengertian Industri Kreatif dan Inovatif

Industri kreatif dan inovatif adalah dua konsep yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan perkembangan sosial di berbagai negara. Mari kita jelaskan pengertian keduanya secara lebih rinci:

1. **Industri Kreatif:** Industri kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang fokus pada penggunaan kreativitas, keahlian, dan ekspresi budaya untuk menciptakan produk, layanan, atau konten yang memiliki nilai tambah dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Industri kreatif mencakup beragam bidang, seperti seni visual, musik, film, periklanan, desain grafis, perancangan mode, arsitektur, permainan video, dan banyak lagi. Ciri khas dari industri kreatif adalah kemampuannya untuk menggabungkan inovasi dengan unsur-unsur budaya dan seni, menciptakan produk yang unik dan menarik.

   Industri kreatif juga memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan keberagaman budaya. Produk-produk dalam industri ini seringkali dihasilkan melalui kolaborasi, pengeksplorasian, dan pemikiran kreatif yang berkelanjutan.

2. **Inovasi:** Inovasi merujuk pada proses pengembangan ide, konsep, produk, atau layanan baru yang dapat menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. Inovasi tidak terbatas pada pengembangan teknologi baru, tetapi juga

mencakup perubahan dalam cara berpikir, pengorganisasian proses bisnis, dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Inovasi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk teknologi, manufaktur, layanan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnya.

Ada beberapa jenis inovasi, seperti inovasi produk (pengembangan produk baru atau perbaikan pada produk yang sudah ada), inovasi proses (perubahan dalam cara produksi atau pengiriman layanan), inovasi model bisnis (pengembangan model bisnis baru yang mengubah cara bisnis beroperasi), dan inovasi sosial (solusi baru untuk masalah sosial yang ada).

Kunci dari inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan positif, meningkatkan daya saing, dan memenuhi kebutuhan pasar atau masyarakat secara lebih baik. Inovasi seringkali mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan manfaat sosial, dan menciptakan peluang baru.

Ketika industri kreatif dan inovasi saling berinteraksi, mereka dapat menciptakan lingkungan yang dinamis dan produktif di mana ide-ide kreatif diimplementasikan secara inovatif. Kreativitas dapat mengilhami inovasi, dan inovasi dapat memperkuat industri kreatif dengan menghadirkan solusi baru dan lebih efisien. Kombinasi kedua konsep ini sering menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya di berbagai negara.

B. Bentuk-Bentuk Industri Kreatif Dan Inovatif

Industri kreatif dan inovatif mencakup berbagai bentuk dan sektor yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh bentuk-bentuk industri kreatif dan inovatif yang umum dijumpai:

Industri Kreatif

1. Seni Visual: Ini termasuk seni lukis, patung, dan karya seni visual lainnya. Pelukis, pematung, dan fotografer adalah contoh profesional yang beroperasi di sektor ini.
2. Musik: Industri musik mencakup penciptaan, produksi, dan distribusi musik. Ini mencakup artis, produser musik, label rekaman, dan penyiaran musik.
3. Film dan Hiburan: Ini termasuk produksi film, televisi, dan teater, serta industri hiburan seperti video game, festival musik, dan pertunjukan live.
4. Mode: Industri mode melibatkan perancangan pakaian, manufaktur, ritel, dan promosi produk fashion. Ini juga mencakup desainer busana, model, dan toko pakaian.
5. Desain Grafis dan Multimedia: Desainer grafis menciptakan elemen visual untuk berbagai media, termasuk periklanan, web, dan cetakan. Ini juga mencakup pembuatan konten multimedia, seperti animasi dan grafik interaktif.
6. Periklanan dan Pemasaran: Industri ini berkaitan dengan promosi produk dan layanan melalui berbagai saluran, termasuk iklan cetak, iklan televisi, dan pemasaran digital.
7. Arsitektur: Arsitek merancang bangunan dan lingkungan fisik. Mereka juga terlibat dalam perencanaan kota dan desain interior.

Industri Inovatif

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Ini mencakup pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan teknologi terkait lainnya. Inovasi dalam TIK dapat mencakup pengembangan aplikasi baru, perangkat cerdas, atau teknologi terkait keamanan.
2. Kesehatan: Industri kesehatan terus berkembang dengan inovasi dalam perawatan medis, perangkat medis, obat-

obatan, dan teknologi kesehatan yang mendukung diagnosis dan perawatan.

3. Energi dan Lingkungan: Inovasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi hijau berperan penting dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.
4. Transportasi: Kendaraan otonom, transportasi berbagi, dan pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien adalah contoh inovasi dalam industri transportasi.
5. Pendidikan: Teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif, seperti e-learning, juga merupakan bagian penting dari industri inovatif.
6. Keuangan dan Fintech: Inovasi dalam layanan keuangan, seperti teknologi keuangan (fintech), telah mengubah cara kita bertransaksi, mengelola keuangan, dan berinvestasi.
7. Industri Manufaktur: Inovasi dalam proses manufaktur, termasuk penggunaan otomatisasi dan teknologi 3D printing, telah meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi.

Setiap sektor industri ini memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial melalui kreativitas dan inovasi. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide kreatif dengan solusi inovatif yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan pasar.

C. Peran Industri Kreatif Dalam Ekonomi Indonesia

Industri kreatif dan inovatif memainkan peran yang semakin penting dalam ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga tentang

meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan mendukung perkembangan budaya. Berikut adalah beberapa peran kunci dari industri kreatif dan inovatif dalam ekonomi Indonesia:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Industri kreatif dan inovatif telah menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai sektor yang terus berkembang, industri kreatif menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan PDB negara.
2. Diversifikasi Ekonomi: Diversifikasi ekonomi adalah salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Industri kreatif dan inovatif membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar.
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri kreatif seperti seni, desain, dan hiburan menciptakan peluang kerja untuk sejumlah besar individu. Selain itu, inovasi dalam sektor-sektor seperti teknologi informasi juga menciptakan banyak pekerjaan di bidang pengembangan perangkat lunak, TI, dan layanan terkait.
4. Ekspor dan Pariwisata: Produk-produk industri kreatif, seperti film, musik, seni, dan produk fashion, memiliki potensi untuk menjadi daya tarik ekspor dan mendorong pariwisata. Merek-merek Indonesia yang dikenal secara internasional dalam seni dan karya kreatif lainnya dapat meningkatkan citra negara di mata dunia.
5. Pengembangan Budaya: Industri kreatif adalah wadah penting untuk mempromosikan budaya Indonesia. Ini memungkinkan penghargaan dan pelestarian budaya tradisional sambil menggabungkannya dengan elemen-elemen baru dan kontemporer.

6. Inovasi Teknologi: Indonesia telah melihat perkembangan signifikan dalam inovasi teknologi, terutama dalam sektor fintech dan teknologi informasi. Ini menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis dan pemberdayaan ekonomi digital.
7. Pendekatan Berkelanjutan: Beberapa inovasi dalam industri kreatif dan inovatif telah mendorong pendekatan berkelanjutan. Misalnya, desain berkelanjutan dalam industri fashion dan penggunaan energi terbarukan dalam produksi film dan televisi.
8. Pemberdayaan UMKM: Industri kreatif dan inovatif dapat membantu meningkatkan kapasitas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui digitalisasi, pelatihan, dan akses ke pasar yang lebih luas.

   Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Indonesia Investment, 2023).

Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran industri kreatif dan inovatif dalam ekonomi Indonesia, pemerintah, sektor swasta, dan individu perlu bekerja sama dalam mendukung pengembangan sektor-sektor ini. Hal ini mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan kreatif, dukungan untuk startup dan inovator, serta upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memfasilitasi akses ke pasar global. Dengan pendekatan yang baik, industri kreatif dan inovatif dapat terus menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya Indonesia.

D. Faktor-Faktor Pendukung Inovasi Dan Kewirausahaan

Inovasi dan kewirausahaan adalah dua elemen penting dalam pengembangan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. Ada sejumlah faktor yang dapat mendukung dan memfasilitasi inovasi dan kewirausahaan. Berikut adalah beberapa faktor pendukung utama:

1. **Lingkungan Regulasi yang Mendukung:**

   Regulasi yang kondusif dan berorientasi pada bisnis dapat memberikan insentif bagi kewirausahaan dan inovasi. Ini mencakup pengurangan birokrasi berlebihan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

2. **Akses ke Sumber Daya Finansial:**

   Akses ke modal, baik melalui investasi modal ventura, kredit usaha, atau pendanaan dari berbagai sumber, menjadi faktor penting untuk mendukung inovasi dan kewirausahaan.

3. **Infrastruktur Teknologi dan Akses ke Informasi:**

   Akses yang baik ke infrastruktur teknologi, internet, dan sumber daya informasi memungkinkan pelaku bisnis untuk mengakses pengetahuan terbaru, mengembangkan produk, dan mencapai pasar global.

4. **Kultur Kewirausahaan:**

   Budaya yang mendukung kewirausahaan dan inovasi, yang mencakup penghargaan terhadap risiko, kegagalan yang diterima dengan baik sebagai pelajaran, dan penghargaan atas usaha kreatif, dapat mendorong lebih banyak individu untuk menjadi pengusaha.

5. **Pendidikan dan Pelatihan:**

Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keterampilan kewirausahaan dan pengembangan kemampuan inovatif dapat membantu calon pengusaha untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan.

6. **Riset dan Pengembangan (R&D):**

   Investasi dalam R&D memungkinkan pengembangan teknologi baru dan penemuan produk yang dapat memicu inovasi. Fasilitas penelitian dan dukungan untuk kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta penting dalam hal ini.

7. **Akses ke Pasar dan Jaringan Bisnis:**

   Memiliki akses ke pasar yang luas dan jaringan bisnis yang kuat dapat membantu pelaku bisnis memasarkan produk dan layanan mereka, serta menemukan peluang kerjasama yang bermanfaat.

8. **Kepemimpinan dan Manajemen yang Berkualitas:**

   Kemampuan manajemen yang kuat dan kepemimpinan yang visioner dapat membimbing perusahaan atau startup menuju inovasi yang berhasil dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

9. **Fasilitas dan Infrastruktur Fisik:**

   Infrastruktur fisik yang baik, seperti transportasi yang andal, energi yang stabil, dan pusat bisnis yang modern, dapat memfasilitasi operasi bisnis dan distribusi produk.

10. **Kerjasama dan Kolaborasi:**

    Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta, dapat menghasilkan sinergi yang memicu inovasi.

Faktor-faktor ini tidak selalu saling terpisah dan dapat saling memengaruhi. Sebagai contoh, budaya kewirausahaan yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, sementara akses yang baik ke sumber daya finansial dapat membantu pembiayaan ide-ide inovatif. Kombinasi dari faktor-faktor ini, bersama dengan komitmen dan semangat para pengusaha dan inovator, berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat yang dinamis.

BAB 9

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal merupakan salah satu aspek kunci dalam upaya memajukan dan mengembangkan suatu daerah. Masyarakat lokal, yang seringkali merupakan garda terdepan dari kehidupan ekonomi suatu wilayah, memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memiliki dampak positif yang jauh lebih luas, seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kedekatan sosial dalam komunitas.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang membangun kapasitas, meningkatkan akses ke sumber daya, dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang relevan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi adalah kunci keberhasilan. Dengan demikian, artikel ini akan mengulas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pemberdayaan ekonomi.

Semakin kuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, semakin besar potensi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Melalui artikel ini, kita akan mendalami konsep ini dan merumuskan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana menggerakkan roda pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah suatu konsep dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat lokal memiliki potensi, sumber daya, dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi mereka sendiri, sehingga mereka dapat lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Menurut Rusmini, dkk (2023:61), pemberdayaan ekonomi lokal memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1. Menekankan kolaborasi aktif dan proses partisipatif antar komunitas pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan dunia usaha (sektor swasta) untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
2. Membangun hubungan yang lebih strategis dan kolaboratif dukungan yang menguntungkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal.
3. Mengupayakan keterpaduan dan pengembangan sarana, prasarana dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.
4. Memiliki strategi terapan dan kolaboratif yang mendukung

untuk pengembangan UKM yang memiliki dampak ekonomi kontinu.

5. Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan dan juga terukur.
6. Berjuang untuk pemerataan ekonomi, menolak pengangguran dan kemiskinan serta kemandirian finansial ekonomi lokal.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal:

1. Partisipasi Aktif: Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program ekonomi. Ini berarti masyarakat memiliki suara dan peran penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan ekonomi mereka.
2. Peningkatan Kapasitas: Upaya pemberdayaan ekonomi seringkali mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi anggota masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola usaha mereka.
3. Akses ke Sumber Daya: Pemberdayaan ekonomi mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses yang cukup dan adil terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan, modal, teknologi, dan pasar. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung hak kepemilikan, pembiayaan mikro, atau dukungan akses pasar.
4. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Marginal: Pemberdayaan ekonomi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok-kelompok

marginal memiliki kesempatan yang setara dalam pengembangan ekonomi. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

5. Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan. Ini mencakup pertimbangan terhadap dampak lingkungan, sosial, dan budaya dari kegiatan ekonomi.
6. Kemitraan dan Kolaborasi: Pemberdayaan ekonomi seringkali melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Kemitraan ini dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga tentang membangun kapasitas, meningkatkan akses, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tujuannya adalah memberikan masyarakat lokal kontrol lebih besar atas nasib ekonomi mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

B. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melibatkan serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan komunitas setempat. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. **Pendidikan dan Pelatihan**: Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Ini termasuk pelatihan teknis, kewirausahaan, manajemen usaha, dan keterampilan soft skills.
2. **Pengembangan Infrastruktur**: Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, dan teknologi informasi. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang baru dan mempermudah akses ke pasar.
3. **Pendukung Keuangan**: Mendorong akses masyarakat lokal ke sumber-sumber pembiayaan, termasuk mikro-kredit, modal usaha, dan program-program bantuan keuangan. Ini membantu individu dan kelompok lokal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.
4. **Penguatan Koperasi**: Mendukung pembentukan dan pengelolaan koperasi atau asosiasi lokal yang dapat memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam produksi, pengolahan, atau pemasaran produk mereka. Koperasi dapat meningkatkan daya tawar dan keuntungan bersama.
5. **Akses ke Pasar**: Membantu masyarakat lokal untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik melalui bantuan dalam pemasaran produk mereka atau melalui pengembangan saluran distribusi yang efektif. Ini dapat melibatkan kemitraan dengan perusahaan swasta atau pemangku kepentingan lainnya.
6. **Pengembangan Produk dan Inovasi**: Mendorong inovasi dalam produk dan layanan lokal yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Ini dapat mencakup dukungan untuk riset dan pengembangan, serta promosi produk lokal.

7. **Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Marginal**: Memastikan bahwa perempuan dan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan juga mendapat perhatian khusus dalam program pemberdayaan ekonomi. Ini dapat mencakup program-program khusus untuk meningkatkan akses mereka ke sumber daya dan peluang ekonomi.
8. **Partisipasi Masyarakat**: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait ekonomi lokal. Ini memastikan bahwa program-program pemberdayaan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
9. **Pembangunan Berkelanjutan**: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam strategi pemberdayaan ekonomi, seperti memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan ekonomi.
10. **Monitoring dan Evaluasi**: Memantau dan mengevaluasi dampak program-program pemberdayaan ekonomi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Strategi-strategi ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan khusus masing-masing komunitas, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

C. Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melibatkan serangkaian strategi, kebijakan, dan tindakan yang

dirancang untuk memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal:

1. **Partisipasi Aktif:** Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program ekonomi. Masyarakat lokal harus memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan ekonomi mereka.
2. **Pendekatan Berbasis Asas Kesejahteraan**: Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup perhatian terhadap pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
3. **Penguatan Kapasitas**: Meningkatkan kemampuan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan keterampilan. Ini memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam mengelola usaha ekonomi mereka.
4. **Akses ke Sumber Daya**: Memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan, air, modal, teknologi, dan pasar. Ini dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan dan dukungan akses kepada sumber daya tersebut.
5. **Penguatan Koperasi dan Asosiasi**: Mendorong pembentukan dan pengelolaan koperasi atau asosiasi yang memungkinkan kolaborasi dan penggabungan sumber daya antara masyarakat lokal. Ini dapat meningkatkan daya tawar dan efisiensi ekonomi.

6. **Pemberdayaan Perempuan**: Mengakui peran penting perempuan dalam ekonomi lokal dan memberikan dukungan khusus untuk meningkatkan partisipasi dan kepemilikan perempuan dalam usaha ekonomi.
7. **Inklusi Sosial**: Memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas atau minoritas etnis, juga mendapat perhatian khusus dan kesempatan yang setara dalam pembangunan ekonomi.
8. **Pengembangan Infrastruktur**: Investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi.
9. **Pembangunan Berkelanjutan**: Memasukkan pertimbangan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang.
10. **Pendekatan Holistik**: Melihat masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan mempertimbangkan semua aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
11. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal adalah kunci dalam mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat setempat dapat mengambil kendali atas kehidupan ekonomi mereka sendiri, mengurangi ketergantungan ekonomi eksternal, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ini melibatkan proses yang panjang, dan keberhasilannya tergantung pada komitmen jangka panjang dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat.

D. Peran Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat di tingkat lokal, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin atau rentan. Berikut adalah beberapa peran pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam pengentasan kemiskinan:

1. **Meningkatkan Pendapatan**: Salah satu tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dengan memberikan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, atau peluang kerja, masyarakat lokal dapat meningkatkan pendapatannya dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
2. **Penciptaan Lapangan Kerja**: Pemberdayaan ekonomi seringkali melibatkan pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor-sektor ekonomi lokal lainnya. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
3. **Pengurangan Ketimpangan**: Dengan memberdayakan masyarakat lokal, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi, termasuk mereka yang berada dalam kondisi miskin.
4. **Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya**: Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal seringkali melibatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur

lokal, seperti jalan, listrik, air bersih, dan sumber daya lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. **Penguatan Kapasitas**: Pemberdayaan ekonomi juga melibatkan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dan usaha ekonomi mereka. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pembangunan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih mandiri dan efisien dalam mengelola usaha mereka.
6. **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**: Pemberdayaan ekonomi juga mencakup memberikan masyarakat lokal akses yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
7. **Peningkatan Kualitas Hidup**: Selain aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum. Ini termasuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat lokal untuk mengambil kendali atas masa depan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Dengan cara ini, pemberdayaan ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. ***

BAB 10

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dewan Pembangunan Ekonomi Amerika (*American Economic Development Council*/AEDC) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses menciptakan kemakmuran melalui mobilisasi sumber-sumber daya manusia, finansial, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan (Last, 2007). Masalah pembangunan ekonomi di suatu daerah tergantung dari banyak faktor. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi (Christianingrum, 2021:102).

Pada era globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang terus berkembang, peran pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi menjadi semakin penting. Kebijakan ekonomi pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam bab ini, akan membahas secara mendalam tentang peran serta dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Kebijakan ekonomi pemerintah mencakup berbagai langkah, seperti pengaturan pajak, pengeluaran publik, kebijakan moneter,

perdagangan internasional, dan banyak aspek lainnya yang memengaruhi iklim ekonomi suatu negara. Bab ini akan mengulas bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sektor keuangan.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan dampak kebijakan ekonomi pemerintah, diharapkan akan dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat membentuk arah ekonomi suatu negara dan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

A. Definisi Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam suatu negara untuk mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut seringkali mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan berbagai aspek lainnya yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk:

1. **Kebijakan Moneter**: Ini berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral suatu negara. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
2. **Kebijakan Fiskal**: Ini melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, pengaturan pajak, dan pengeluaran publik. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menggerakkan

pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau mengendalikan inflasi.

3. **Kebijakan Perdagangan**: Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang memengaruhi impor dan ekspor barang dan jasa. Ini bisa berupa tarif, kuota, atau perjanjian perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri atau mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. **Kebijakan Regulasi**: Pemerintah mengatur berbagai aspek ekonomi melalui regulasi, seperti peraturan lingkungan, keamanan, atau ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas sistem ekonomi.
5. **Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**: Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih rentan atau miskin. Ini bisa mencakup program-program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan investasi dalam infrastruktur sosial.
6. **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan**: Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja menjadi lebih produktif dan lebih siap menghadapi perubahan dalam ekonomi global.
7. **Kebijakan Investasi dan Pengembangan Infrastruktur**: Investasi dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi, dan telekomunikasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan ekonomi mencerminkan filosofi dan tujuan pemerintah serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Mereka dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan dalam prioritas pemerintah dan perubahan dalam kondisi ekonomi global. Kebijakan ekonomi yang baik dan terkoordinasi

dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Fungsi-Fungsi Kebijakan Ekonomi

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip Ma'ruf (2008:46) pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian, yaitu: (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.

Fungsi-fungsi kebijakan ekonomi mencerminkan peran dan tujuan utama dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi utama kebijakan ekonomi:

1. **Mengatur Pertumbuhan Ekonomi**: Salah satu fungsi utama kebijakan ekonomi adalah mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan untuk mempromosikan peningkatan produksi barang dan jasa, investasi, dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.

2. **Mengendalikan Inflasi**: Kebijakan ekonomi juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat merusak stabilitas ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Bank sentral seringkali bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter guna menjaga stabilitas harga.

3. **Mengatasi Pengangguran**: Kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Ini bisa melibatkan program pelatihan keterampilan, insentif untuk

menciptakan lapangan kerja, atau pengeluaran pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan pekerjaan.

4. **Redistribusi Pendapatan**: Salah satu fungsi sosial dari kebijakan ekonomi adalah mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mengalihkan sumber daya dari kelompok kaya ke kelompok miskin atau rentan. Ini dapat dicapai melalui sistem pajak yang progresif atau program bantuan sosial.
5. **Mengatur Pasar dan Mencegah Monopoli**: Kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mencegah praktek monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Hal ini dapat mencakup pengaturan harga, regulasi anti-trust, dan perlindungan konsumen.
6. **Stabilisasi Ekonomi**: Kebijakan ekonomi juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi fluktuasi bisnis dan krisis ekonomi. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk merespons perubahan cepat dalam aktivitas ekonomi, seperti stimulus ekonomi selama resesi.
7. **Pengelolaan Defisit Anggaran**: Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola defisit anggaran, yaitu perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Mereka dapat mengambil tindakan untuk mengurangi atau meningkatkan defisit sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal.
8. **Mendorong Investasi dan Pengembangan Infrastruktur**: Kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mendorong investasi swasta dalam sektor ekonomi yang kunci dan pengembangan infrastruktur. Ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.

9. **Mengatasi Masalah Lingkungan**: Kebijakan ekonomi juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim. Ini mencakup insentif untuk teknologi ramah lingkungan dan regulasi lingkungan.

Fungsi-fungsi kebijakan ekonomi ini sering kali saling terkait dan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan prioritas pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik saat merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang optimal

C. Aspek-Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mencapai Kegiatan Ekonomi

Dalam mencapai kegiatan ekonomi yang sukses dan berkelanjutan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini mencakup berbagai elemen yang memengaruhi cara masyarakat, bisnis, dan pemerintah berinteraksi dalam konteks ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kegiatan ekonomi yang efektif:

1. **Sumber Daya**: Identifikasi dan pengelolaan sumber daya merupakan aspek mendasar dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya termasuk tenaga kerja, modal, tanah, energi, bahan baku, dan lainnya. Penting untuk mengelola sumber daya ini dengan bijak untuk memaksimalkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.
2. **Penawaran dan Permintaan**: Konsep penawaran dan permintaan adalah landasan ekonomi pasar. Pemahaman yang baik tentang bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi dapat membantu dalam menentukan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya.

3. **Harga**: Harga adalah mekanisme yang penting dalam ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga dan dampaknya terhadap keputusan konsumen dan produsen sangat penting.
4. **Kelembagaan Ekonomi**: Sistem kelembagaan, seperti hukum, regulasi, dan lembaga keuangan, memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi. Kelembagaan yang efisien dan efektif membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan.
5. **Kebijakan Pemerintah**: Tindakan dan kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak besar pada ekonomi. Ini termasuk kebijakan fiskal (pajak, pengeluaran), kebijakan moneter (suku bunga, pengendalian inflasi), dan regulasi. Kebijakan yang bijaksana dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6. **Inovasi dan Teknologi**: Kemajuan dalam inovasi dan teknologi memiliki dampak signifikan pada kegiatan ekonomi. Perusahaan dan negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru cenderung lebih kompetitif.
7. **Pendidikan dan Keterampilan**: Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi cenderung lebih produktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting.
8. **Kondisi Pasar Internasional**: Ekonomi suatu negara tidak terisolasi; mereka terlibat dalam perdagangan internasional. Kondisi pasar internasional, termasuk tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan, memengaruhi ekspor dan impor, serta stabilitas ekonomi.

9. **Lingkungan dan Keberlanjutan**: Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan keberlanjutan lingkungan. Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.
10. **Kesejahteraan Sosial**: Aspek sosial, seperti keadilan, ketimpangan pendapatan, dan akses ke layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan), juga harus menjadi perhatian dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang penting.
11. **Ketidakpastian dan Risiko**: Setiap kegiatan ekonomi menghadapi ketidakpastian dan risiko. Pengelolaan risiko melibatkan strategi seperti asuransi dan diversifikasi.
12. **Ketertarikan Internasional**: Investasi asing dan modal manusia internasional juga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan ekonomi sangat penting.

Memahami dan memperhatikan semua aspek ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mengintegrasikan faktor-faktor ini dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi suatu negara. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan dan instrumen yang berbeda. Berikut adalah pengertian masing-masing kebijakan:

1. **Kebijakan Fiskal:**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah sehubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan fiskal juga bisa dipahami sebagai tindakan dan keputusan pemerintah terkait dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Hal ini melibatkan penggunaan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak, pengeluaran publik, dan utang pemerintah untuk memengaruhi aktivitas ekonomi (Ma'ruf, 2008:47).

a. Pajak: Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengumpulkan pendapatan dan mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya, pajak penghasilan dapat diatur untuk mengurangi atau meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi individu dan perusahaan.

b. Pengeluaran Publik: Pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi dengan mengatur pengeluaran publik. Investasi dalam infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial adalah contoh dari pengeluaran yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

c. Utang Pemerintah: Pemerintah dapat menggunakan utang untuk mendanai pengeluaran. Namun, penggunaan utang harus dikelola dengan bijaksana untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.

Secara umum tujuan dari kebijakan fiskal yang ingin dicapai antara lain: peningkatan pendapatan nasional, peningkatan kesempa- tan kerja, penurunan laju inflasi, penurunan defisit neraca perdagangan, penurunan defisit neraca pembayaran internasional (Ma'ruf, 2008:47).

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti mengatur tingkat inflasi, mengendalikan defisit anggaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau mengentaskan kemiskinan.

Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu: a) fungsi alokasi yang berupa penyediaan barang sosial atau proses pembagian keseluruhan sumberdaya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial serta bagaimana komposisi barang sosial ditentukan, b) fungsi distribusi yakni penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang adil dan merata, dan c) fungsi stabilisasi sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan yang tepat dengan memperhitungkan dampaknya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran (Ma'ruf, 2008:47).

2. Kebijakan Moneter:

Kebijakan moneter adalah tindakan dan keputusan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur suplai uang, suku bunga, dan kondisi kredit dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menciptakan dan menjaga stabilitas harga, meskipun juga dapat melibatkan aspek-aspek lain seperti pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan.

a. Suku Bunga: Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan aktivitas pinjaman dan investasi di masyarakat. Menaikkan suku bunga dapat mengurangi inflasi, sementara menurunkan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

b. Suplai Uang: Bank sentral juga dapat mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mencetak lebih banyak uang atau menguranginya untuk mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas sistem keuangan.

c. Kondisi Kredit: Bank sentral juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatur kondisi kredit di pasar keuangan. Hal ini dapat mencakup pengaturan persyaratan cadangan, batas pinjaman, dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi ketersediaan kredit.

Kebijakan moneter seringkali dilakukan oleh bank sentral independen dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan keuangan, yang merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua jenis kebijakan ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, saling berhubungan dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Kombinasi yang bijak antara keduanya dapat membantu mengelola berbagai aspek aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

E. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara keduanya:

1. **Kebijakan Fiskal:**

   - Kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah, termasuk pengeluaran dan pendapatan, untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Ini mencakup pengaturan tingkat pengeluaran pemerintah, pajak, dan pembayaran transfer seperti tunjangan sosial.

- Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang atau meredakan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran untuk mendorong konsumsi dan investasi, sehingga meningkatkan permintaan agregat.
- Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi bisa langsung, seperti ketika pemerintah menginvestasikan lebih banyak dalam proyek infrastruktur, atau tidak langsung, seperti ketika pajak yang lebih rendah meningkatkan pendapatan konsumen dan menggerakkan konsumsi.

2. **Kebijakan Moneter:**
    - Kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar di ekonomi dan tingkat suku bunga oleh bank sentral. Bank sentral menggunakan instrumen seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan uang beredar.
    - Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga (kontrol inflasi) dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau menurunkannya untuk merangsang investasi dan konsumsi.
    - Kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, yang selanjutnya memengaruhi pengeluaran investasi dan konsumen serta nilai tukar mata uang negara.

Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Moneter:

1. Kebijakan fiskal dan moneter dapat saling melengkapi atau saling mengimbangi. Misalnya, jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif (meningkatkan pengeluaran),

bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mencegah potensi inflasi akibat peningkatan permintaan.

2. Di sisi lain, jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat (mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak), bank sentral dapat merespons dengan menurunkan suku bunga untuk merangsang aktivitas ekonomi dan menghindari perlambatan ekonomi yang tajam.
3. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting agar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional. Keduanya harus berkerja bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dapat kompleks dan tergantung pada kondisi ekonomi saat itu. Selain itu, dalam beberapa negara, lembaga-lembaga yang mengatur kebijakan fiskal dan moneter dapat berbeda, sehingga koordinasi di antara mereka menjadi penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang konsisten.

F. Penerapan Kebijakan Moneter

Penerapan kebijakan fiskal adalah proses di mana pemerintah menggunakan alat-alat fiskalnya, seperti anggaran pemerintah, pajak, dan pengeluaran, untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan-tujuan tersebut bisa berupa merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, atau mengurangi kesenjangan sosial. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan kebijakan fiskal:

1. **Penetapan Tujuan Ekonomi:**

   Langkah pertama dalam penerapan kebijakan fiskal adalah merumuskan tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh

pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau mengatasi masalah defisit anggaran.

2. **Analisis Ekonomi:**

   Pemerintah perlu melakukan analisis ekonomi yang komprehensif untuk memahami situasi ekonomi saat ini. Ini mencakup memahami tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi ekonomi.

3. **Perencanaan Anggaran:**

   Setelah menganalisis situasi ekonomi, pemerintah merencanakan anggaran tahunan atau multi-tahunan. Anggaran ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk berbagai program dan proyek, serta sumber pendanaannya (pajak, pinjaman, atau pendapatan lainnya).

4. **Penetapan Kebijakan Pajak:**

   Pemerintah dapat memutuskan untuk mengubah tingkat pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Ini bisa berarti menurunkan pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi, atau meningkatkannya untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan.

5. **Implementasi Program dan Proyek:**

   Pemerintah mulai melaksanakan program dan proyek yang termasuk dalam anggaran. Ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

6. **Pemantauan dan Evaluasi:**

   Selama pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah terus memantau dampaknya terhadap ekonomi. Jika kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan atau

menyebabkan masalah lain, pemerintah mungkin perlu melakukan penyesuaian atau perubahan.

7. **Penyesuaian Kebijakan:**

   Berdasarkan pemantauan dan evaluasi, pemerintah dapat memutuskan untuk mengubah kebijakan fiskal. Ini bisa berarti melakukan perubahan dalam anggaran, menyesuaikan tingkat pajak, atau mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih penting.

8. **Komunikasi dan Transparansi:**

   Pemerintah perlu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan pelaku ekonomi tentang kebijakan fiskal yang diimplementasikan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal sangat penting.

Penerapan kebijakan fiskal tidak selalu berjalan mulus, dan hasilnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan dalam situasi ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai.

G. Penerapan Kebijakan Fiskal

Penerapan kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan berbagai instrumen keuangan lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Bank sentral biasanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan moneter, dan tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi) serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan kebijakan moneter:

1. **Analisis Ekonomi:**

Bank sentral melakukan analisis ekonomi yang komprehensif untuk memahami situasi ekonomi saat ini. Ini mencakup memantau tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, permintaan agregat, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi ekonomi.

2. **Penentuan Tujuan Moneter:**

   Bank sentral merumuskan tujuan moneter yang ingin dicapai. Tujuan utama biasanya adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Namun, tujuan lain seperti mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja juga bisa menjadi bagian dari strategi bank sentral.

3. **Penetapan Suku Bunga:**

   Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mendorong tabungan, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Sebaliknya, menurunkan suku bunga dapat merangsang investasi dan konsumsi.

4. **Operasi Pasar Terbuka:**

   Bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka. Ini adalah cara untuk mengendalikan suplai uang beredar dan suku bunga jangka pendek.

5. **Cadangan Wajib Bank:**

   Bank sentral dapat mengatur cadangan wajib yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial. Mengubah persyaratan cadangan ini dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dan mengendalikan suplai uang beredar.

6. **Komunikasi:**

Bank sentral seringkali berkomunikasi secara terbuka dengan publik, pasar keuangan, dan pemerintah tentang kebijakan moneter yang diambil dan alasan di baliknya. Komunikasi yang baik dapat membantu mengarahkan harapan dan perilaku pelaku ekonomi.

7. **Evaluasi dan Pemantauan:**

   Bank sentral terus memantau dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi dan mencocokkan hasilnya dengan tujuan moneter yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, bank sentral dapat melakukan penyesuaian kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

8. **Kebijakan Keseimbangan Eksternal:**

   Selain tujuan moneter, bank sentral juga dapat memperhatikan faktor eksternal seperti nilai tukar mata uang. Intervensi di pasar valuta asing bisa menjadi bagian dari kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal.

Penerapan kebijakan moneter memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi saat ini dan dampak dari berbagai instrumen kebijakan. Bank sentral harus beroperasi secara independen dan berdasarkan prinsip transparansi untuk mencapai tujuan moneter dengan efektif. Kebijakan moneter yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

H. Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan suatu negara. Pengaruh keduanya dapat sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tingkat pengangguran, distribusi pendapatan, dan

berbagai aspek lainnya dalam ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap ekonomi dan pembangunan:

1. **Pengaruh Kebijakan Fiskal:**

    b. Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan fiskal dapat merangsang atau mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak, dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif, seperti pemotongan anggaran atau kenaikan pajak, dapat memperlambat pertumbuhan.

    c. Stabilitas Harga: Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi stabilitas harga. Jika kebijakan fiskal ekspansif dilaksanakan terlalu agresif, dapat menyebabkan inflasi karena meningkatnya permintaan. Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraktif dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran.

    d. Pembangunan Infrastruktur: Kebijakan fiskal sering digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Pembangunan ini dapat memperbaiki kualitas hidup dan daya saing ekonomi suatu negara.

    e. Distribusi Pendapatan: Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meratakan distribusi pendapatan dengan mengenakan pajak progresif (pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang dengan pendapatan lebih tinggi) atau dengan program bantuan sosial yang menyasar kelompok yang rentan.

2. **Pengaruh Kebijakan Moneter:**

a. Stabilitas Harga: Kebijakan moneter memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan.

b. Suku Bunga dan Investasi: Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral memengaruhi keputusan investasi perusahaan dan konsumsi rumah tangga. Suku bunga yang rendah dapat merangsang investasi dan konsumsi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

c. Nilai Tukar Mata Uang: Kebijakan moneter juga dapat memengaruhi nilai tukar mata uang. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memengaruhi nilai tukar mata uang dan mendukung ekspor atau mengendalikan impor.

d. Liquidity Management: Bank sentral dapat mengatur likuiditas di pasar melalui operasi pasar terbuka dan cadangan wajib bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengendalikan suku bunga jangka pendek.

e. Pengangguran: Kebijakan moneter yang tepat juga dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi saat itu. Koordinasi antara keduanya juga penting agar mencapai tujuan ekonomi yang seimbang. Selain itu, perubahan dalam kebijakan fiskal dan moneter harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada ekonomi dan masyarakat

Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu diampuni oleh Allah.

(HR. Ahmad)

BAB 11

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang tidak terelakkan dalam perjalanan evolusi peradaban manusia. Konsep ini melampaui sekadar peningkatan ekonomi atau infrastruktur, dan mencakup kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di dalamnya terkandung upaya untuk memahami, mengukur, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan seluruh penduduk suatu negara atau wilayah.

Salah satu alat yang paling dikenal dan diterima secara luas untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator multidimensi yang mencerminkan sejauh mana suatu masyarakat telah berhasil mencapai potensi maksimum dalam tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dengan kata lain, IPM tidak hanya mengukur kesuksesan suatu negara dalam menciptakan kekayaan ekonomi, tetapi juga kemampuannya untuk memberikan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai kepada warganya.

Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi alat evaluasi yang penting bagi pemerintah dan lembaga internasional,

tetapi juga menjadi panduan untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan. Menggali lebih dalam tentang Indeks Pembangunan Manusia adalah langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Artikel ini akan membantu pembaca memahami konsep tersebut dengan lebih baik, sehingga mereka dapat lebih berperan aktif dalam mengadvokasi pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan manusia dalam berbagai tingkat, dari tingkat lokal hingga global.

A. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara atau wilayah. IPM adalah alat yang dirancang oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan suatu masyarakat, yang melampaui sekadar aspek ekonomi.

Kualitas pembangunan manusia, sebagaimana diungkapkan oleh UNDP, terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup (Wardana, 2016:187). Dengan demikian, IPM mengukur pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu:

1. **Kesehatan:** IPM mempertimbangkan harapan hidup penduduk suatu negara sebagai indikator utama dalam dimensi kesehatan. Harapan hidup mencerminkan tingkat kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.
2. **Pendidikan:** Dimensi pendidikan IPM mencakup dua indikator, yaitu rata-rata tahun-tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan angka partisipasi

sekolah, terutama untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ini mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk suatu negara.

3. **Pendapatan:** Meskipun pendapatan tidak menjadi satu-satunya fokus IPM, namun masih menjadi faktor penting. IPM mempertimbangkan pendapatan riil per kapita sebagai salah satu indikatornya, sehingga mencerminkan tingkat ekonomi dan keadilan pendapatan dalam masyarakat.

Poin-poin di atas diukur dalam satuan tertentu dan kemudian diindekskan untuk menciptakan nilai IPM, yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik, sementara nilai yang lebih rendah mengindikasikan tingkat pembangunan yang lebih rendah. Pencapaian nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu negara telah berhasil menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakatnya.

IPM tidak hanya memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan, tetapi juga memungkinkan perbandingan antara negara-negara berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan ketidaksetaraan dalam kualitas hidup manusia di berbagai belahan dunia. Selain itu, IPM juga berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga internasional untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

B. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah salah satu komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang mencerminkan dimensi kesehatan dalam pembangunan manusia di negara tersebut. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata berapa lama seorang individu dapat diharapkan hidup pada

saat lahir, dan ini adalah indikator yang kuat dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, angka harapan hidup telah mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, mencerminkan perkembangan dalam sektor kesehatan dan kemajuan dalam penyediaan layanan kesehatan. Beberapa faktor yang telah berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup di Indonesia termasuk:

1. **Penurunan Tingkat Kematian Anak**: Upaya untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita telah menjadi prioritas, dengan peningkatan akses ke perawatan medis, vaksinasi, dan edukasi tentang perawatan bayi yang baik.
2. **Perluasan Akses ke Layanan Kesehatan**: Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan akses penduduk ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, sehingga orang dapat mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik.
3. **Peningkatan Gizi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**: Program gizi anak, kampanye untuk mengurangi stunting, serta upaya untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak, semuanya berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup.
4. **Penyuluhan Kesehatan dan Kesadaran** Masyarakat: Kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat, hidup sehat, dan pencegahan penyakit telah meningkat melalui kampanye-kampanye edukasi kesehatan.
5. **Kemajuan dalam Teknologi Medis**: Perkembangan teknologi medis, termasuk perbaikan dalam diagnosis dan perawatan penyakit, juga berperan dalam meningkatkan angka harapan hidup.

Angka harapan hidup yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Indonesia memiliki peluang hidup yang

lebih lama dan lebih sehat. Ini adalah pencapaian positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia di negara tersebut. Tetapi tetap penting untuk terus berupaya memperbaiki sistem kesehatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan berkualitas, dan mengatasi tantangan kesehatan yang masih ada untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di Indonesia.

C. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah salah satu dimensi penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang mencerminkan kemajuan dalam aspek pendidikan dalam pembangunan manusia di negara tersebut. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu dan masyarakat, dan oleh karena itu, indikator pendidikan dalam IPM mencakup dua komponen utama:

1. **Rata-Rata Tahun-Tahun Sekolah (*Average Years of Schooling*):** Ini adalah ukuran rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk dewasa (usia 25 tahun ke atas). Angka ini mencerminkan tingkat pendidikan penduduk dewasa dan menunjukkan sejauh mana mereka telah mengakses pendidikan formal.
2. **Angka Partisipasi Sekolah (*School Enrollment Rate*):** Indikator ini mengukur proporsi anak-anak yang berusia sesuai dengan tingkat sekolah yang tepat dan sedang mengikuti pendidikan formal. Tingkat partisipasi sekolah yang tinggi menunjukkan akses yang baik ke pendidikan dasar dan menengah.

Di Indonesia, ada sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dalam rangka memperbaiki IPM dan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan, antara lain:

1. **Peningkatan Akses Pendidikan**: Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memperluas akses pendidikan dasar dan menengah ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Ini dilakukan melalui pembangunan sekolah baru dan program-program beasiswa.
2. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**: Selain memperluas akses, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini termasuk pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif.
3. **Program Pengentasan Buta Aksara**: Upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat buta aksara di Indonesia dengan memberikan literasi dasar kepada mereka yang belum bisa membaca dan menulis.
4. **Promosi Pendidikan Inklusif**: Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dari kelompok minoritas juga memiliki akses yang sama ke pendidikan.

Pengeluaran atau belanja pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal sumberdaya manusia (*human capital investment*). Oleh karena itu, peranan dan kedudukannya dalam mendorong kemajuan ekonomi di dalam suatu negara amatlah penting. Pentingnya peranan investasi dalam pendidikan juga diperkuat oleh hasil penelitian Widodo, Waridin dan Maria (2011) yang menyatakan bahwa alokasi belanjapemerintah untuk sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) tidak dapat berdiri sendiri sebagai pengubah independen dalam mempengaruhi kemiskinan, tetapi harus berinteraksi dengan pengubah lainnya yaitu indeks pembangunan manusia. Riset Fan, Zhang dan Zhang (2002) di China, juga menyebutkan bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikanlah yang memiliki dampak paling besar terhadap penurunan kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, meningkatkan peluang pekerjaan, akses ke informasi, serta kemampuan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan di Indonesia, tantangan seperti kesenjangan pendidikan antarwilayah dan kesenjangan gender masih ada dan perlu diatasi untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh negeri.

D. Menghitung Indeks Pembangunan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Metodologi penghitungan IPM secara umum adalah sebagai berikut:

1. **Dimensi Kesehatan (Health Dimension):** Ini mencakup angka harapan hidup (life expectancy) sebagai indikator utama. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata berapa lama seorang individu dapat diharapkan hidup pada saat lahir. Untuk menghitung skor kesehatan dalam IPM, langkah-langkah berikut dapat diambil:

   Normalisasi Angka Harapan Hidup: Nilai angka harapan hidup di normalisasi agar berada dalam rentang antara 0 dan 1. Rumus yang sering digunakan adalah (X - X_min) / (X_max - X_min), di mana X adalah angka harapan hidup, X_min adalah angka harapan hidup terendah yang dicapai di seluruh dunia, dan X_max adalah angka harapan hidup tertinggi yang mungkin dicapai.

2. **Dimensi Pendidikan (Education Dimension):** Dimensi pendidikan dalam IPM mencakup dua indikator utama, yaitu rata-rata tahun-tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan angka partisipasi sekolah anak-anak.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghitung skor pendidikan dalam IPM adalah:

- Normalisasi Tahun-Tahun Sekolah: Nilai rata-rata tahun-tahun sekolah penduduk dewasa dinormalisasi dalam rentang 0 hingga 1 dengan menggunakan rumus yang serupa dengan yang digunakan untuk kesehatan.
- Normalisasi Angka Partisipasi Sekolah: Angka partisipasi sekolah anak-anak juga dinormalisasi dalam rentang 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan partisipasi penuh.

3. **Dimensi Pendapatan (Income Dimension**): Ini mencakup pendapatan riil per kapita sebagai indikator utama. Pendapatan riil per kapita mencerminkan tingkat ekonomi dan keadilan pendapatan dalam masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghitung skor pendapatan dalam IPM adalah:

   Normalisasi Pendapatan: Nilai pendapatan per kapita dinormalisasi dalam rentang 0 hingga 1 dengan menggunakan rumus yang serupa dengan yang digunakan untuk kesehatan dan pendidikan.

4. **Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** Setelah normalisasi dari ketiga dimensi di atas, skor-skornya dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah dimensi (biasanya 3) untuk mendapatkan nilai akhir IPM. Rumus umumnya adalah:

   IPM = (Skor Kesehatan + Skor Pendidikan + Skor Pendapatan) / Jumlah Dimensi

   Setelah menghitung IPM, nilai akhir akan berada dalam rentang antara 0 dan 1. Nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik, sementara nilai yang lebih rendah mengindikasikan tingkat pembangunan yang lebih rendah.

Penghitungan IPM dapat disesuaikan dengan data yang tersedia dan kebijakan prioritas masing-masing negara atau wilayah, tetapi metodologi dasarnya tetap mempertimbangkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan sebagai dimensi kunci dalam menilai pembangunan manusia.

E. Mengukur Keberhasilan Pembangunan Manusia

Modal manusia *(human capital)* merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa "*social development is economic development*" (Mubyarto, 2004). Menurut Todaro (2000), sumber daya manusia dari suatu bangsa, bukan modal fisik atau sumber daya material, merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Laporan tahunan UNDP secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama *(sustainable)*. Agar berjalan positif dan berkelanjutan harus ditunjang oleh kebijakan sosial *(social policy)* pemerintah yang pro pembangunan manusia (sosial).

Mengukur keberhasilan pembangunan manusia melibatkan penggunaan berbagai indikator dan metrik untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat yang paling umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tetapi ada juga metode dan indikator lain yang digunakan bersama-sama dengan IPM. Berikut adalah beberapa langkah umum yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IPM adalah salah satu alat yang paling umum digunakan. IPM menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, untuk memberikan gambaran holistik tentang kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pengukuran keberhasilan diukur dengan melihat tingkat IPM suatu negara atau wilayah dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia.
2. **Pendapatan Riil per Kapita**: Selain dari IPM, pendapatan riil per kapita juga digunakan sebagai indikator utama. Peningkatan pendapatan riil per kapita mencerminkan peningkatan ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Angka Harapan Hidup**: Angka harapan hidup adalah indikator kesehatan yang penting. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan perbaikan dalam akses terhadap perawatan kesehatan, keamanan pangan, dan lingkungan yang lebih sehat.
4. **Rata-Rata Tahun-Tahun Sekolah**: Untuk dimensi pendidikan, rata-rata tahun-tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa adalah indikator yang digunakan. Peningkatan nilai ini menunjukkan kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan.
5. **Tingkat Partisipasi Sekolah**: Tingkat partisipasi sekolah anak-anak adalah indikator penting dalam menilai keberhasilan pendidikan. Peningkatan tingkat partisipasi menunjukkan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pendidikan.
6. **Kesenjangan dan Ketidaksetaraan**: Selain melihat nilai rata-rata, mengukur keberhasilan pembangunan manusia juga melibatkan memeriksa tingkat ketidaksetaraan dalam

masyarakat. Hal ini mencakup kesenjangan pendapatan, kesenjangan pendidikan, dan kesenjangan kesehatan. Penurunan kesenjangan dan ketidaksetaraan merupakan indikator positif dalam mencapai keberhasilan pembangunan manusia yang lebih merata.

7. **Indikator Kualitatif:** Selain indikator kuantitatif, pengukuran keberhasilan pembangunan manusia juga dapat mencakup indikator kualitatif seperti akses ke layanan publik, akses ke pekerjaan yang layak, partisipasi politik, hak asasi manusia, dan kualitas lingkungan hidup.

8. **Pemantauan Tujuan** Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs): Indikator SDGs yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dari berbagai aspek.

Pengukuran keberhasilan pembangunan manusia bukan hanya tentang data statistik, tetapi juga tentang dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif yang mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif serta analisis ketidaksetaraan adalah kunci dalam mengukur dan memahami keberhasilan pembangunan manusia. ***

Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat, sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah

(HR. Athabrani)

BAB 12

PEREKONOMIAN DGITAL DAN TEKNOLOGI

Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, perekonomian digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam perubahan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi yang terus berkembang, memberikan dampak luar biasa pada cara bisnis dan ekonomi beroperasi. Perekonomian digital adalah hasil dari evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah paradigma tradisional bisnis dan menghadirkan peluang serta tantangan baru bagi para pelaku ekonomi.

Dalam bab ini, akan mempelajari berbagai aspek penting yang terkait dengan perekonomian digital dan bagaimana teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan ini. Kami akan mengulas bagaimana perusahaan, baik besar maupun kecil, mengadaptasi diri terhadap lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi digital. Selain itu, akan dibahas juga dampak perekonomian digital pada inovasi, lapangan kerja, dan inklusi sosial.

Teknologi telah memungkinkan perusahaan untuk merespons pasar dengan lebih cepat, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, bersamaan dengan manfaat-manfaat ini, ada juga risiko-risiko baru yang perlu dipertimbangkan, seperti masalah privasi data, keamanan siber, dan dampak sosial ekonomi dari otomatisasi.

A. Pengertian Perekonomian Digital dan Teknologi

Perekonomian digital mengacu pada sistem ekonomi yang sangat tergantung pada teknologi digital, terutama internet, untuk berbagai aspek kegiatan ekonomi. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola, bertransaksi, berkomunikasi, dan mengoptimalkan proses bisnis serta aktivitas ekonomi lainnya. Perekonomian digital melibatkan perusahaan, individu, dan pemerintah yang aktif terlibat dalam ekosistem digital yang melibatkan komputasi awan, perdagangan elektronik, aplikasi seluler, analisis data, dan berbagai teknologi digital lainnya.

Dalam perekonomian digital, informasi dan data memiliki peran sentral, dan banyak transaksi dan interaksi bisnis terjadi secara online. Ini mencakup pembelian online, perbankan digital, pemasaran online, pengelolaan rantai pasokan berbasis teknologi, layanan pelanggan melalui platform digital, dan banyak lagi. Perekonomian digital juga menciptakan peluang baru untuk inovasi dan menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya.

Teknologi adalah penggunaan pengetahuan, alat, mesin, sistem, dan metode untuk menciptakan solusi atau memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Ini mencakup berbagai aspek seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi manufaktur, teknologi energi, teknologi kesehatan, dan banyak

lagi. Teknologi dapat berupa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), atau kombinasi dari keduanya.

Dalam konteks perekonomian digital, teknologi sering kali merujuk pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti komputer, jaringan komputer, internet, perangkat seluler, perangkat lunak aplikasi, dan infrastruktur digital yang mendukung operasi bisnis dan aktivitas ekonomi secara umum. Teknologi juga dapat mencakup inovasi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), blockchain, dan berbagai teknologi lainnya yang terus mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi.

Penggunaan teknologi secara efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di berbagai sektor ekonomi. Ini juga memungkinkan penciptaan nilai tambah yang signifikan, menggerakkan inovasi, dan membentuk arah perkembangan masa depan dalam konteks perekonomian digital. Teknologi menjadi dasar dari transformasi ekonomi dan bisnis menuju era digital.

B. Dampak Transformasi Digital Pada Perekonomian Indonesia

Transformasi digital telah memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain di seluruh dunia. Dampak tersebut melibatkan berbagai aspek ekonomi dan perubahan dalam cara bisnis dan pemerintahan beroperasi. Berikut adalah beberapa dampak utama transformasi digital pada perekonomian Indonesia:

1. **Pertumbuhan Ekonomi**: Transformasi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini mencakup pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), e-commerce, dan start-up teknologi. Semakin banyak usaha baru yang muncul dalam ekosistem

digital, menciptakan lapangan pekerjaan dan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) negara.

2. **Peningkatan Akses**: Melalui perluasan akses internet, termasuk peningkatan akses melalui perangkat seluler, penduduk Indonesia sekarang memiliki akses yang lebih besar ke layanan dan informasi online. Ini memungkinkan inklusi digital dan memberikan peluang kepada lebih banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti perdagangan online dan pembayaran digital.
3. **Perubahan dalam Pola Konsumsi**: E-commerce telah mengubah cara masyarakat Indonesia berbelanja. Konsumen kini lebih cenderung berbelanja secara online, yang memengaruhi ritel tradisional dan meningkatkan permintaan akan layanan pengiriman dan logistik. Hal ini juga memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk lebih mudah memasarkan produk mereka secara online.
4. **Inovasi Bisnis:** Transformasi digital mendorong inovasi bisnis di berbagai sektor. Perusahaan mulai mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
5. **Fintech dan Keuangan Digital**: Sektor keuangan mengalami perubahan besar dengan munculnya fintech dan layanan keuangan digital. Layanan perbankan digital, pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi digital semakin populer, memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional.
6. **Pemerintahan Digital:** Pemerintah Indonesia juga mengadopsi transformasi digital dalam layanan publik, termasuk pelayanan pajak, e-government, dan sistem informasi kependudukan. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah.

7. **Tantangan Keamanan Siber**: Sambil membawa banyak manfaat, transformasi digital juga memunculkan tantangan terkait keamanan siber dan privasi data. Ancaman siber seperti serangan siber dan pencurian data menjadi perhatian serius bagi perusahaan dan pemerintah.

Dengan terus berkembangnya teknologi digital dan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur digital, Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam perekonomian digital. Namun, perlu diingat bahwa untuk memaksimalkan manfaat dari transformasi digital, juga perlu fokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi serta upaya untuk mengatasi isu-isu keamanan siber dan regulasi yang sesuai.

C. Tantangan Regulasi Dan Kebijakan Terkait Ekonomi Digital

Tantangan regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital melibatkan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi dalam lingkungan digital yang cepat berubah. Dalam menghadapi perekonomian digital, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai isu kompleks yang melibatkan privasi data, keamanan siber, persaingan, dan inovasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengatur ekonomi digital:

1. **Privasi Data**: Penanganan data pribadi menjadi lebih penting dalam ekonomi digital. Tantangan melibatkan pembuatan regulasi yang melindungi privasi individu sambil memungkinkan perusahaan untuk menggunakan data untuk inovasi dan operasional mereka. Penting untuk menemukan

keseimbangan yang tepat antara privasi individu dan penggunaan data yang sah.

2. **Keamanan Siber**: Ekonomi digital rentan terhadap serangan siber, pencurian data, dan aktivitas kriminal online lainnya. Regulasi dan kebijakan harus fokus pada perlindungan infrastruktur digital, melibatkan perusahaan untuk melindungi data pelanggan, dan menetapkan sanksi untuk pelanggaran keamanan siber.
3. **Persaingan dan Monopoli**: Perekonomian digital sering kali didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Tantangan di sini adalah memastikan persaingan yang sehat dan mencegah perusahaan besar mengendalikan pasar sepenuhnya. Regulasi antimonopoli dan kebijakan persaingan diperlukan untuk memastikan pasar tetap kompetitif.
4. **Perpajakan:** Pemerintah perlu menangani isu perpajakan dalam konteks ekonomi digital. Beberapa perusahaan teknologi beroperasi di berbagai yurisdiksi, membuat perpajakan dan pengenaan pajak yang adil menjadi tantangan. Regulasi perpajakan perlu disesuaikan agar dapat menangani transaksi digital dan model bisnis yang berubah.
5. **Regulasi Cross-Border**: Ekonomi digital sering melintasi batas negara. Ini membuat regulasi lintas batas menjadi kompleks. Perjanjian dan kerja sama internasional penting untuk mengatasi isu-isu seperti perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum lintas batas.
6. **Kekurangan Talent**: Perekonomian digital membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknologi yang tinggi. Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi.

7. **Kepatuhan Regulasi**: Memastikan bahwa perusahaan dan individu mematuhi regulasi merupakan tantangan. Pemerintah harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif untuk menangani pelanggaran regulasi dan perlindungan konsumen.
8. **Inovasi**: Sementara regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen dan mendorong persaingan, terlalu banyak regulasi dapat menghambat inovasi. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara melindungi kepentingan publik dan mendukung perkembangan teknologi baru.

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Regulasi dan kebijakan yang tepat dapat membantu memastikan bahwa ekonomi digital berkembang dengan cara yang menguntungkan semua pihak, sambil tetap menjaga kepentingan publik dan perlindungan konsumen.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza Wajalla

(HR. Ahmad)

DAFTAR PUSTAKA

Ahluwalia, L. 2020. "Empowerment Leadership And Performance: Antecedents". *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 7*(1), 283.http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo deTitulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIAMETODOL

Alfarabi, M. Andri, dkk. 2014. "Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi". *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.* Vol. 1. No. 3. (Januari-Maret, 2014).

Almath, Mohammad Faiz. 1994. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad.* Terj. A. Aziz Salim Basyarahil dari jusul asli *Qabasun Min Nuuri Muhammad SAW*. Jakarta: Gema Insani Press.

Amir, Amri. 2007. *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan EkonomiDalam Era Globalisasi*. Bogor: Biografika.

Anggarini, D. R., & Permatasari, B. 2020. *Pengaruh Nilai Tukar Dolar Dan Inflasi Terhadap Perekonomian Indonesia. 1(2)*

Azid, Toseef, et al. 2013. "Labor Market In The Environment of Tawhidi Methodology". *Humanomics.* Vol 29 No 4 2013, hal 276-292.

Boediono. 2014. *Ekonomi Moneter.* Yogyakarta: BPFE.

Christianingrum, Ratna. 2021. "Disparitas Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Budget*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. 2020. "Penerapan Teknologi Tabungan Untuk

Siswa Di SD Ar-Raudah Bandar Lampung". *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, *1*, 25–30.

Fadly, M., & Wantoro, A. 2019. "Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan". *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, *1*, 46–55.

Fadly, M., Muryana, D. R., & Priandika, A. T. 2020. "Sistem Monitoring Penjualan Bahan Bangunan Menggunakan Pendekatan Key Perfomance Indicator". *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1 (1), 15–20.

Fahrika, A. Ika dan Juliannsyah Roy. 2020. "Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang ditempuh". *INOVASI.* 16. (2). 2020.

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. 2021. Mapping Potential Sectors Based On Financial And Digital Literacy Of Women Entrepreneurs: A Study Of The Developing Economy. *10* (2), 318–327.https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12

Febrian, A., & Ahluwalia, L. 2020. "Analisis Pengaruh Ekuitas Merek pada Kepuasan dan Keterlibatan Pelanggan yang Berimplikasi pada Niat Pembelian di E-Commerce". J. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management*, *13*(3), 254. https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i3.19967

Garnham, Nicolas. 1999. *Capitalism and Communication Global Culture and The Economics of Information*,.

Hanum, Nurlaela. 2018. "Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Langsa". *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol. 2. No. 2 (Oktober, 2018)

Haryono, Erwin. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap Kuat*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423.aspx. Diakses pada 02-09-2023.

Helen, Sri Mintarti, Fitriadi. 2017. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja" *Jurnal INOVASI*, 13 (1) 2017.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/13/5-lapangan-usaha-sebagai-kontributor-tertinggi-perekonomian-indonesia-2022. diakses pada 04-09-2023.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html. Diakses pada 04-09-2023.

Huda, Nurul, et al. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis.* Jakarta: Kencana.

Isbah, Ufira dan Rita Yuni Iyan. 2016. "Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Tahun VII, No. 19. (November 2016).

Jan, Rodlyah Hasan. 2022. *Eksistensi Sistem Kapitalis di Indonesia*.

Jhingan, M.L. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cetakan ke-15. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kemenkeu. 2021. *Empat Penyebab Ketimpangan di Indonesia Versi Bank Dunia.* https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/empat-penyebab-ketimpangan-di-indonesia-versi-bank-dunia/, diakses pada 17 Oktober 2021

Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. 2020. Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek. *International Journal of …*, *3*(2),

18–23. https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836

Kosumo, Sisilia, dkk. 2016. "Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate". *Efisiensi: Jurnal Berkala Ilmiah*. Vol. 16. No. 2. 2016.

L. F., & Permatasari, B. 2020. "Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. Jembatan". *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, *17*(2), 227–238. https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455.

Larasati Ahluwalia, K. P. 2020. "Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Covid-19". *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VII (2), 119–128.

Last, G. 2021. *A Summary of Economic Development Terms - 2nd Edition*.

Lia Febria Lina, B. P. 2019. *Kredibilitas Selebriti Mikro Pada Niat Beli Produk Di Media Sosial. 1(2), 41–50.*

Lina, L. F., & Nani, D. A. 2020. Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi. *Performance*, *27* (1), 60–69.

Ma'ruf, Ahmad dan Latri Wihastuti. 2008. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 9. No. 1. (April, 2008).

Mankiw et al. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: Salemba Empat.

Mankiw, N. Gregory. 2016. *Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

_____. 2005. *Macroeconomics, 6th Edition,* New York: Worth Publishers.

_____. 2000. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.

Mantra, Ida Bagus. 2000. *Demografi Umum*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Maruta, Heru. 2014. "Sejarah Sistem Ekonomi". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita.* Vol. 3. No. 1, (Juni, 2014).

Nafziger. 2006. *Economic Development*, 4th ed, Cambridge: Univercity Press.

Nani, D. A. 2019. "Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia". *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, *2*(1), 25. https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280

Nani, D. A., & Ali, S. 2020. "Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments". *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *7*(1), 33–50. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671

Nani, D. A., & Safitri, V. A. D. 2021. "Exploring The Relationship Between Formal Management Control Systems, Organisational Performance And Innovation: The Role Of Leadership Characteristics". *Asian Journal of Business and Accounting*, *14*(1), 207–224. https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no1.8

Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. 2020. "Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *2*(1), 130–144. https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87

Pratama, Agung Rifqi. 2018. "Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *VeJ*. Vol. 4. No. 2. (2018).

Putong, Iskandar. 2013. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putri, A. D., & Ghazali, A. 2021. *Analysis Of Company Capability Using 7s Mckinsey Framework To Support Corporate*

Succession (Case Study: Pt X Indonesia). *11*(1), 45–53. https://doi.org/10.22219/mb.v11i1.

Putri, Yulia dan Mike Triani. 2019. "Analisis Pasar Tenaga Kejra Sektor Industri terhadap Tingkat Upah di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 1. No. 2. (Mei, 2019).

Rachbini, Didik J. 2001. *Ekonomi Politik Uang*. Jakarta: Rajawali Press.

Rahmadi, Selamet dan Parmadi. 2019. "Pengaruh Ketimpangan Pendpaatan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Pulau di Indonesia". *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 14. No. 2. (Juni-Desember, 2019)

Rivani, Edmira. 2014. "Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) dalam mengelompokkan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 5. No. 1. (Juni, 2014).

Rosmalasari, T. D. 2017. "Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik Sebelum dan Pada Masa Krisis". *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI*, 3 (2 Agustus), 393–400.

Rosyidi, Suherman. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rusmini, dkk. 2023. "Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covod-19". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 12, No. 1, (Januari, 2023).

Safitri, V. A. D., & Nani, D. A. 2021. " Does Good Corporate Governance and Eco–Efficiency Really Contribute To Firm Value? an Empirical Study in Indonesian State-Owned Enterprises (Soes)". *Akuntabilitas*, *15* (1), 73–88.https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12526

Salim, Amir., dkk. 2021. "Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Sharia: Jurnal Pemikiran dan*

Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol. 7. No. 1. (Agustus, 2021).

Salvatore, Dominick, 2006. *Schaum's Outlines: Mikroekonomi* (Terjemahan Bahasa Indonesia), Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga.

Septiani, Elvina dan Yanti Puspitasari. 2022. "Penerapan Sistem Ekonomi di Indonesia". *Pusdansi.org*. 2 (1) 2022.

Simanjuntak, Thamrin. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soleh, Ahmad. 2017. "Masalah Ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Enomomos*. Vol. 6. No. 2. (Juli, 2017).

Sukirno, Sadono. 2012. *Makro ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwarni, E., & Handayani, M. A. 2021. Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia's Economic Post COVID-19. *Business Management and Strategy*, *12*(2), 19. https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794

Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta: Indonesia.

Tikson, D. T. 2005. *Indikator-Indikator Pembangunan Ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2003. *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited.

_____, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-sembilan. Jakarta:

Erlangga.

Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wahiba, W. 2014. "The Reletionship Between Economic Growth and Income Inequality"*. International Journal of Economics and Financial* Issues, 4 (1),135- 143.

Wardana, Deddy Puja. 2016. "Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Pembangunan Manusia di kalimantan Timur". *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol. 12. No. 1. (2016).

Wijayanto, Hendara dan Samsul Ode. 2019. "Dinamika Permaslaahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia". *Administratio: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol. 10. No. 1. 2019.

BIODATA PENULIS

MAHMUD., lahir di Mojokerto 09 Agustus 1976. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di STAI Al-Amien (IDIA) Sumenep lulus tahun 2020. Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, lulus tahun 2005 di Universitas Negeri Surabaya, S2 Manajemen SDM, Lulus Tahun 2005 di Universitas Wijaya Putra Surabaya, dan S3 Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Tulungagung (UIN SATU) 2020. Selain Pendidikan formal penulis juga mengenyam pendidikan di Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik IAI Uluwiyah Mojokerto sekaligus sebagai Ketua STIE Darul Falah Mojokerto. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya: *Pengantar Studi Islam Jilid 1-5* (Thoriq Al-Fikri, 2012); *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Thoriq Al-Fikri, 2012); *Bimbingan dan Konseling Belajar* (Thoriq Al-Fikri, 2014); *Ilmu Pendidikan Islam* (Thoriq Al-Fikri, 2014); *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Thoriq Al-Fikri, 2015); *Filsafat Pendidikan Islam* (Kopertais 4 Press, 2015); *Psikologi Pendidikan* (Thoriq Al-Fikri, 2015); *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Thoriq Al-Fikri, 2016); *Politik dan Etika Pendidikan* (YPU, 2016); *Belajar Pembelajaran* (Thoriq Al-Fikri, 2016); *Metodologi Penelitian* (Thoriq Al-Fikri, 2016); *Etika Bisnis* (YPU, 2017); *Seluk Beluk Pendidikan Islam* (YPU, 2017); *Guru dan Murid Perspektif Islam* (YPU, 2017); *Aliran-Aliran Pendidikan dari Klasik sampai Moderen* (YPU, 2017); *Isu-Isu Pendidikan Kontemporer* (YPU, 2017); *Problematika Pendidikan Kontemporer* (YPU, 2017); *Problematika Siswa di Sekolah/Madrasah* (YPU, 2017); *Wawasan Manajemen Pendidikan Islam* (YPU, 2019); *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Manajemen Pendidikan Islam Bermutu* (YPU, 2019); *Landasan Kependidikan* (YPU, 2019); *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (YDFM, 2020); *Etika Bisnis dan Profesi* (YDFM, 2020); *Wawasan Manajemen Pendidikan Islam* (YDFM, 2021); *Manajemen Pendidikan Islam Ttansformatif* (YDFM, 2021), dan lain-lain.

DEDDY AHMAD FAJAR, lahir di Mojokerto, 09 Pebruari 1986. Dosen Jurusan Manajemen ini adalah alumni Universitas Negeri Surabaya (S1) dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta (S2), dan sekarang sedang menempuh Program Doktoral (S3) Prodi Ekonomi Syari'ah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain Pendidikan formal penulis juga mengenyam pendidikan di Pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang; Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Jawa Tengah, serta beberapa pondok pesantren lainnya.

Selain mengajar, ia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan sekaligus pengaruh Pondok Pesantren Darul Falah Mojosari Mojokerto. Penulis juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto serta Jamaah Tariqoh Qadariyah An-Naqsabandiyah.

Penulis juga aktif mengisi serta berperan serta dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop pelatihan dan lain-lain. Ia juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah. Beberapa tulisannya antara lain: *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (YDFM, 2020); *Pendidikan Agama Islam* (YDFM, 2020); *Manajemen Operasional* (YDFM, 2020). ***

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia merupakan topik yang begitu penting dan relevan dalam konteks global saat ini. Buku ini menggali berbagai aspek ekonomi yang membentuk negara kepulauan terbesar di dunia ini, serta peranannya dalam kancah ekonomi internasional.

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keragaman budayanya, dan populasi yang besar, memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan perekonomiannya. Buku ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa, mengulas tantangan dan peluang yang dihadapinya, serta perubahan signifikan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Buku sederhana ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi mereka yang ingin lebih memahami dinamika ekonomi Indonesia.

Semoga bermanfaat. Amin. ***

YDF

Penerbit
YAYASAN DARUL FALAH
MENGABDI UNTUK ANAK NEGERI